



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2017



Kata Pengantar

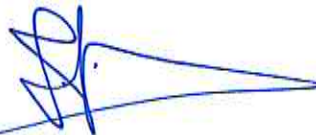
Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan telah dilakukan revisi berdasarkan perkembangan yang sangat dinamis dalam periode tahun 2017. Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan acuan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 berdasarkan periode pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2017 ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada masa mendatang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah termasuk peran dan fungsi Ditjen Perkeretaapian, untuk menuju sistem perencanaan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkeretaapian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017.

Jakarta, Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620709 199203 1 002

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator bidang perkeretaapian mempunyai tugas untuk menata penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh guna memastikan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Untuk mewujudkan visi tersebut Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api;
5. Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Untuk memastikan terwujudnya perwujudan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut di atas maka telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 18 (delapan belas) indikator kinerja pelaksanaan pembangunan perkeretaapian.

Sesuai dengan dokumen Revisi Penjanjian Kinerja 2017 telah ditetapkan target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,28
SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 <i>Modal Share</i> angkutan penumpang kereta api	% total nasional	4,0
	IK3 <i>Modal Share</i> angkutan barang kereta api	% total nasional	0,2
SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55
	IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	10,70
	IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana dan SDM)	%	30
SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	65
	IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20
	IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	6,04
SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	15,53
	IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	7,47
SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan	%	30

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian		
SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	13
SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	20
SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp	1000
	IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	85
	IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	87,5
	IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	60 (level 2)

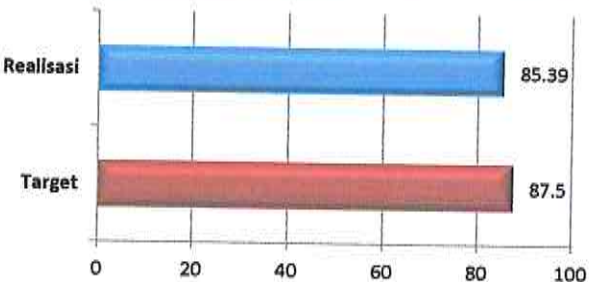
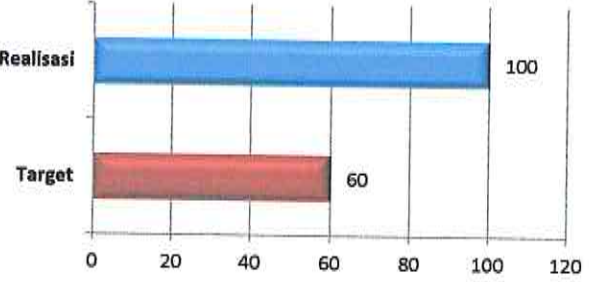
Hasil pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	CAPAIAN KINERJA 2017	% CAPAIAN
Sasaran 1 : Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian		
IKP 1: Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Realisasi: 0.25 Target: 0.28	89,29
Sasaran 2 : Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah		
IKP 2 : <i>Modal Share</i> angkutan penumpang kereta api	Realisasi: 5.03% Target: 4.00%	125,75
IKP 3 : <i>Modal Share</i> angkutan barang kereta api	Realisasi: 0.23% Target: 0.20%	115,00
Sasaran 3 : Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api		
IKP 4 : Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Realisasi: 0.26 Target: 0.55	152,73

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	CAPAIAN KINERJA 2017	% CAPAIAN
IKP 5 : Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Realisasi: 6.59 Target: 10.7	138,41
IKP 6 : Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	Realisasi: 97.64% Target: 30.00%	325,47
Sasaran 4 : Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api		
IKP 7 : Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	Realisasi: 66,05 Target: 65	101,62
IKP 8 : Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	Realisasi: 20 Target: 20	100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	CAPAIAN KINERJA 2017	% CAPAIAN
IKP 9 : Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	Realisasi: 15.32% Target: 6.04%	253,64
Sasaran 5 : Meningkatkan KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api		
IKP 10 : Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	Realisasi: 18.05% Target: 15.53%	116,23
IKP 11 : Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	Realisasi: 7.53% Target: 7.47%	100,80
Sasaran 6 : Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian		
IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Realisasi: 33% Target: 30%	110,00
Sasaran 7 : Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF		

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	CAPAIAN KINERJA 2017	% CAPAIAN
IKP 13 : Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	A horizontal bar chart comparing 'Realisasi' (blue bar) and 'Target' (red bar). Both bars extend to the 13% mark on the x-axis, which ranges from 0% to 15% with increments of 5%.	100
Sasaran 8 : Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional		
IKP 14 : Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	A horizontal bar chart comparing 'Realisasi' (blue bar) and 'Target' (red bar). The 'Realisasi' bar extends to 37.02% and the 'Target' bar extends to 20% on the x-axis, which ranges from 0% to 40% with increments of 10%.	185,10
Sasaran 9 : Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian		
IKP 15 : Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	A horizontal bar chart comparing 'Realisasi' (blue bar) and 'Target' (red bar). The 'Realisasi' bar extends to 932.497 and the 'Target' bar extends to 1000 on the x-axis, which ranges from 0 to 1200 with increments of 200.	93,25
IKP 16 : Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	A horizontal bar chart comparing 'Realisasi' (blue bar) and 'Target' (red bar). The 'Realisasi' bar extends to 82.19% and the 'Target' bar extends to 85.00% on the x-axis, which ranges from 0.00% to 100.00% with increments of 20.00%.	96,69

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	CAPAIAN KINERJA 2017	% CAPAI-AN
IKP 17 : Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	 Realisasi: 85.39 Target: 87.5	97,59
IKP 18 : Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	 Realisasi: 100 Target: 60	166,67
Rata – Rata Capaian Kinerja		131,62

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	I-3
1.3. Struktur Organisasi	I-4
a. Visi dan Misi	I-4
b. Tujuan dan Sasaran	I-6
c. Struktur Organisasi	I-9
1.4. Sumber Daya Manusia	I-13
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	I-13
b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	I-14
c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian	I-17
d. Direktorat Sarana Perkeretaapian	I-19
e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	I-21
1.5. Potensi, Isu strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	1-24
a. Potensi dan Isu Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1-24
b. Permasalahan yang Dihadapi	1-26
1.6. Sistematika Laporan	1-26

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN**

- | | | |
|-----|--|-------|
| 2.1 | Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019 | II-1 |
| 2.2 | Rencana Kinerja Tahun 2017 | II-8 |
| 2.3 | Revisi Perjanjian Kinerja 2017 | II-11 |

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN**

- | | | |
|------|--|--------|
| 3.1 | Tahapan Pengukuran Kinerja | III-2 |
| 3.2 | Pengukuran Capaian Kinerja | III-5 |
| 3.3 | Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Peningkatan Keselamatan dan SDM Perkeretaapian | III-6 |
| 3.4 | Capaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan ATP | III-8 |
| 3.5 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlindungan Sebidang | III-9 |
| 3.6 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian | III-11 |
| 3.7 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api (Pelemparan Batu) | III-14 |
| 3.8 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian (Penyempurnaan/Revisi) | III-16 |
| 3.9 | Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penyederhanaan Perijinan Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian | III-17 |
| 3.10 | Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) | III-19 |

3.11	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang KA <i>Public Service Obligation</i> (PSO)	III-26
3.12	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Perkeretaapian yang Diturunkan.	III-28
3.13	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Prasarana Perkeretaapian yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan	III-32
3.14	Capaian Indikator Kinerja Terbangunnya Jalur Kereta Api	III-33
3.15	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sarana Kereta Api	III-37
3.16	Capaian Indikator Kinerja Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian	III-39
3.17	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Lintasan/Rute Angkutan Perintis Kereta Api	III-42
3.18	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Lintasan/Rute Angkutan Kereta Api Perintis Menjadi Komersial	III-48
3.19	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Wilayah Perkotaan Yang Menerapkan Sistem Angkutan Massal Berbasis Kereta Api	III-48
3.20	Realisasi Anggaran	III-51

BAB IV : PENUTUP

4.1	Kesimpulan	IV-1
4.2	Saran	IV-3

Daftar Gambar

			Halaman
Gambar	1.1	Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian	I-10
Gambar	1.2	Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I	I-11
Gambar	1.3	Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II	I-11
Gambar	1.4	Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian	I-12
Gambar	1.5	Struktur Organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian	I-12
Gambar	1.6	Komposisi Pegawai Setditjen Perkeretaapian Berdasarkan Tingkat Pendidikan (A) Tingkat Golongan/ Kepangkatan (B)	I-14
Gambar	1.7	Komposisi Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Berdasarkan Tingkat Pendidikan (A) Tingkat Golongan/ Kepangkatan (B)	I-17
Gambar	1.8	Komposisi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Berdasarkan Tingkat Pendidikan (A) Tingkat Golongan/ Kepangkatan (B)	I-18
Gambar	1.9	Komposisi Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Berdasarkan Tingkat Pendidikan (A) Tingkat Golongan/ Kepangkatan (B)	I-20
Gambar	1.10	Komposisi Pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Berdasarkan Tingkat Pendidikan (A) Tingkat Golongan/ Kepangkatan (B)	I-23
Gambar	1.7	Diagram Alur Grand Strategi Pembangunan Perkeretaapian Indonesia	I-21
Gambar	3.1	Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio Konektivitas Antar Wilayah	III-4
Gambar	3.2	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang	III-5
Gambar	3.3	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017	III-6

			Halaman
Gambar	3.4	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>) Tahun 2017	III-7
Gambar	3.5	Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-8
Gambar	3.6	Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-10
Gambar	3.7	Capaian Kinerja Prosentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Kereta Api Tahun 2017	III-11
Gambar	3.8	Capaian Kinerja Prosentase Wilayah Perkotaan Yang Tersedia Layanan Angkutan Kereta Api Perkotaan Tahun 2017	III-12
Gambar	3.9	Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017	III-13
Gambar	3.10	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penyediaan Tempat Duduk Kereta Api PSO Dan Perintis Tahun 2017	III-14
Gambar	3.11	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api Yang Terbangun Tahun 2017	III-15
Gambar	3.12	Capaian Kinerja Prosentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan Dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2017	III-17
Gambar	3.13	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Awal (OBC/FBC) Program Pembangunan yang Akan Didanai Dengan Skema Pendanaan Alternatif Tahun 2017	III-18
Gambar	3.14	Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian Yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017	III-19

			Halaman
Gambar	3.15	Capaian Kinerja Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-20
Gambar	3.16	Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-21
Gambar	3.17	Capaian Kinerja Nilai Akip Ditjen Perkeretaapian	III-22
Gambar	3.18	Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	III-23
Gambar	3.19	Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio Konetivitas Antar Wilayah	III-33
Gambar	3.20	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017	III-34
Gambar	3.21	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017	III-35
Gambar	3.22	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>) Tahun 2017	III-36
Gambar	3.23	Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-37
Gambar	3.24	Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-38
Gambar	3.25	Capaian Kinerja Prosentase <i>Capaian On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Kereta Api Tahun 2017	III-39
Gambar	3.26	Capaian Kinerja Prosentase Wilayah Perkotaan Yang Tersedia Layanan Angkutan Kereta Api Perkotaan Tahun 2017	III-40
Gambar	3.27	Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017	III-43
Gambar	3.28	Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017	III-44

Gambar	3.29	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api Yang Terbangun Tahun 2017	III-46
Gambar	3.30	Capaian Kinerja Prosentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan Dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2017	III-47
Gambar	3.31	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Awal (OBC/FBC) Program Pembangunan yang Akan Didanai Dengan Skema Pendanaan Alternatif Tahun 2017	III-48
Gambar	3.32	Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian Yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017	III-49
Gambar	3.33	Capaian Kinerja Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-50
Gambar	3.34	Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-52
Gambar	3.35	Capaian Kinerja Nilai Akip Ditjen Perkeretaapian	III-52
Gambar	3.36	Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	III-55
Gambar	3.37	Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio Konetivitas Antar Wilayah	III-57
Gambar	3.38	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017	III-61
Gambar	3.39	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017	III-63
Gambar	3.40	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>) Tahun 2017	III-66
Gambar	3.41	Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-69

Gambar	3.42	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Perkeretaapian (Sarana, Prasarana dan SDM) Tahun 2017	III-71
Gambar	3.43	Capaian Kinerja Prosentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Kereta Api Tahun 2017	III-74
Gambar	3.44	Capaian Kinerja Prosentase Wilayah Perkotaan yang Tersedia Layanan Angkutan Kereta Api Perkotaan Tahun 2017	III-76
Gambar	3.45	Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017	III-81
Gambar	3.46	Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017	III-83
Gambar	3.47	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api yang Terbangun Tahun 2017	III-86
Gambar	3.48	Capaian Kinerja Prosentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan Dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2017	III-89
Gambar	3.49	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Awal (OBC/FBC) Program Pembangunan yang Akan Didanai Dengan Skema Pendanaan Alternatif Tahun 2017	III-92
Gambar	3.50	Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017	III-95
Gambar	3.51	Capaian Kinerja Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-97
Gambar	3.52	Capaian Kinerja Prosentase Penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017	III-100

Gambar	3.53	Capaian Kinerja Nilai Akip Ditjen Perkeretaapian	III-102
Gambar	3.54	Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	III-105
Gambar	3.54	Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	III-105

Daftar Tabel

			Halaman
Tabel	2.1	Arahan Kebijakan dan Strategis Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019	II-1
Tabel	2.2	Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017	II-8
Tabel	2.3	Alokasi Perubahan Pagu Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017	II-11
Tabel	2.4	Dana Luncuran SBSN Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017	II-13
Tabel	2.5	Rencana Kerja Dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017	II-19
Tabel	2.6	Revisi Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017	II-20
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio Konektivitas Antar Wilayah	III-3
Tabel	3.2	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017	III-4
Tabel	3.3	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2017	III-5
Tabel	3.4	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>) Tahun 2017	III-7
Tabel	3.5	Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-8
Tabel	3.6	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Perkeretaapian (Sarana, Prasarana dan SDM) Tahun 2017	III-9

Tabel	3.7	Capaian Kinerja Prosentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-11
Tabel	3.8	Capaian Kinerja Prosentase Wilayah Perkotaan yang Tersedia Layanan Angkutan Kereta Api Perkotaan Tahun 2017	III-12
Tabel	3.9	Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017	III-13
Tabel	3.10	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penyediaan Tempat Duduk Kereta Api PSO dan Perintis Tahun 2017	III-14
Tabel	3.11	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api yang Terbangun Tahun 2017	III-15
Tabel	3.12	Capaian Kinerja Prosentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2017	III-16
Tabel	3.13	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Awal (OBC/FBC) Program Pembangunan yang Akan Didanai Dengan Skema Pendanaan Alternatif Tahun 2017	III-18
Tabel	3.14	Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017	III-19
Tabel	3.15	Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-20
Tabel	3.16	Capaian Kinerja Prosentase Penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	III-21
Tabel	3.17	Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	III-22
Tabel	3.18	Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	III-23
Tabel	3.19	Realisasi Penumpang KA PSO Tahun 2017	III-44

Tabel	3.20	Realisasi Penumpang KRL Jabodetabek Tahun 2017	III-45
Tabel	3.21	Realisasi Penumpang KA Perintis Tahun 2017	III-34
Tabel	3.22	Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-51
Tabel	3.23	Tingkat Maturasi SPIP	III-54
Tabel	3.24	Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio Konetivitas Antar Wilayah	III-57
Tabel	3.25	Target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional Tahun 2017	III-58
Tabel	3.26	Capaian Kinerja <i>Modal Share</i> Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017	III-61
Tabel	3.27	Capaian Kinerja Modal Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2017	III-62
Tabel	3.28	<i>Rate Of Accident</i> (RoA) Transportasi Perkeretaapian	III-65
Tabel	3.29	Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>) Tahun 2017	III-65
Tabel	3.30	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-67
Tabel	3.31	Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-68
Tabel	3.32	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Perkeretaapian (sarana, prasarana dan SDM) Tahun 2017	III-70
Tabel	3.33	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-73
Tabel	3.34	Capaian Kinerja Prosentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2017	III-74
Tabel	3.35	Capaian Kinerja Prosentase Wilayah Perkotaan yang Tersedia Layanan Angkutan Kereta Api Perkotaan Tahun 2017	III-75
Tabel	3.36	Wilayah Perkotaan yang Tersedia Layanan Angkutan Kereta Api Perkotaan	III-75

Tabel	3.37	Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017	III-80
Tabel	3.38	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penyediaan Tempat Duduk Kereta Api PSO Dan Perintis Tahun 2017	III-82
Tabel	3.39	Realisasi Penumpang KA PSO Tahun 2017	III-83
Tabel	3.40	Realisasi Penumpang KRL Jabodetabek Tahun 2017	III-84
Tabel	3.41	Realisasi Penumpang KA Perintis Tahun 2017	III-84
Tabel	3.42	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-85
Tabel	3.43	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api Yang Terbangun Tahun 2017	III-86
Tabel	3.44	Daftar Realisasi Rekerjaan Jalur Kereta Api Tahun 2017	III-87
Tabel	3.45	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-88
Tabel	3.46	Capaian Kinerja Prosentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan Dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Tahun 2017	III-89
Tabel	3.47	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-91
Tabel	3.48	Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Awal (OBC/FBC) Program Pembangunan Yang Akan Didanai Dengan Skema Pendanaan Alternatif Tahun 2017	III-92
Tabel	3.49	Capaian Kinerja Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian Yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017	III-95
Tabel	3.50	Pegawai Ditjen Perkeretaapian Yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis S.D Tahun 2017	III-96
Tabel	3.51	Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-97
Tabel	3.52	Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017	III-98

Tabel	3.53	Capaian Kinerja Prosentase Penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	III-100
Tabel	3.54	Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	III-101
Tabel	3.55	Tingkat Maturasi SPIP	III-104
Tabel	3.56	Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	III-105
Tabel	3.57	Rincian Dana Tidak Terserap Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016	III-108
Tabel	4.1	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017	IV-2

Daftar Lampiran

- A. Rencana Strategis (RS) 2015 - 2019 Ditjen Perkeretaapian
- B. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017
- C. Capaian Pengukuran Kinerja (PKK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017
- D. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKP) Ditjen Perkeretaapian Triwulanan Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan transportasi kereta api yang handal dan layak operasi maka diperlukan investasi yang relatif cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan daya dukung prasarana dan sarana kereta api, baik melalui pembiayaan Pemerintah maupun Swasta. Mengingat transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan transportasi tersebut khususnya transportasi kereta api baik melalui mekanisme pembiayaan APBN atau APBD, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Swasta sepenuhnya.

Transportasi kereta api yang handal dan layak operasi tersebut, saat ini sektor transportasi perkeretaapian terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun secara regulasi bidang perkeretaapian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maka sistem penyelenggaraan perkeretaapian yang sebelumnya masih bersifat sentralistik dan monopolistik berubah menjadi bersifat multioperator yaitu dengan memberikan peningkatan peran swasta dan pemerintah daerah secara luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Program Prioritas Infrastruktur Pembangunan Nasional yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian seperti diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) tahun 2030 yang mempunyai peran dan andil untuk meningkatkan serta mendorong perekonomian Nasional.

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian didanai berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan terdapat beberapa kegiatan yang didanai oleh PLN (Pinjaman Luar Negeri), serta Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN/SUKUK). Guna mengetahui capaian pelaksanaan pembangunan tersebut terhadap seluruh kinerja perkeretaapian, tentunya diperlukan suatu monitoring dan evaluasi dalam rangka menemukan hasil capaian dan permasalahan yang ada yang akan dapat meningkatkan hasil kinerja dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai wakil Pemerintah Pusat yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (publik) serta kualitas dan kinerja Instansi Pemerintah yang baik, termasuk didalamnya aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun secara manajerial kepemimpinan melalui aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka memenuhi amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja Direktorat Jenderal perkeretaapian tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tingkat unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2017 sebagai pengungkapan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2017, hal ini berdasarkan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan diawal Tahun 2017 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komitmen dimaksud merupakan amanat dan tanggung jawab Ditjen Perkeretaapian untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis tahun 2015-2019.

Pemenuhan sasaran strategis dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun Anggaran 2017 dengan

membandingkan dari Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA TA.2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

a. Visi dan Misi

Visi Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan adalah :

“ Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional ”.

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi tersebut disampaikan sebagai berikut :

- 1) **Handal** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara;
- 2) **Berdaya saing** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM dan perusahaan jasa dan industri pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif;
- 3) **Berintegrasi** diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani;
- 4) **Berteknologi** diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
- 5) **Bersinergi dengan industri** diindikasikan oleh adanya pola kerjasama yang kuat serta pemanfaatan semaksimal mungkin barang

dan jasa dari industri dalam negeri dalam penyelenggaraan perkeretaapian;

- 6) **Terjangkau** diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api;
- 7) **Memberikan nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, baik sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, ideologi dan politik, serta pertahanan dan keamanan
- 8) **Berkelanjutan** diindikasikan dengan berkelanjutannya penyediaan layanan kereta api sesuai prinsip-prinsip investasi sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara berimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkesinambungan dalam jangka panjang
- 9) **Ketahanan nasional** suatu kondisi dinamis keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- 2) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api;
- 3) Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api;
- 4) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api;

- 5) Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional;
- 6) Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut diatas merupakan rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Berbagai upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi kereta api tetapi juga upaya dalam melengkapi dan memperkuat berbagai pranata pendukung penyelenggaraan perkeretaapian sehingga terwujud sistem perkeretaapian nasional yang handal, maju, modern, terbuka, dan adaptive terhadap perkembangan dan tantangan jaman.

Berbagai upaya yang dilakukan tetap berada dalam kerangka lingkup tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, serta kewenangan yang diembankan oleh UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kepada Pemerintah (c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian) selaku pembina penyelenggaraan perkeretaapian nasional dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan semua pihak terkait dengan perkeretaapian.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Renstra Tahun 2015-2019 disampaikan sebagaimana pada tabel 1.1. Tujuan dan sasaran tersebut sudah merepresentasikan indikasi mengenai pencapaian visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian berikut dengan pemenuhan kondisi dan persyaratannya.

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019

MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api	Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api	Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api	Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api
Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api	Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api	Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi kereta api	Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api
Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional	1. Peningkatan kualitas regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional 2. Peningkatan peran badan usaha dalam skema pendanaan alternatif pembangunan perkeretaapian	1. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian 2. Meningkatkan peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF
Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia	1. Peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian	1. Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional 2. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran, diperlukan penyempurnaan mulai dari penyiapan regulasi terutama dalam mewujudkan eksistensi Ditjen Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian, peningkatan kapabilitas sumber daya, investasi sarana dan prasarana KA, sampai dengan perbaikan manajemen pengelolaan.

Dengan mengkaji sasaran pembangunan perkeretaapian di Indonesia dan kebijakan umum pembangunan bidang perhubungan maka dapat disusun berbagai langkah perbaikan yang diperlukan untuk membawa kondisi perkeretaapian Indonesia menuju kondisi yang diharapkan minimal sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas 2030).

Sasaran pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian yang ingin dicapai pada Tahun 2030 antara lain:

- 1) Jaringan perkeretaapian nasional mencapai 12.100 km (tersebar di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) termasuk jaringan kereta api Kota/ perkotaan sepanjang 3.800 km.
- 2) Sarana angkutan penumpang dengan jumlah lokomotif 2.840 unit, kereta api antar kota 28.335 unit dan perkotaan sebanyak 6.020 unit.
- 3) Sarana angkutan barang dengan jumlah lokomotif 1.985 unit dan gerbong 39.645 unit.

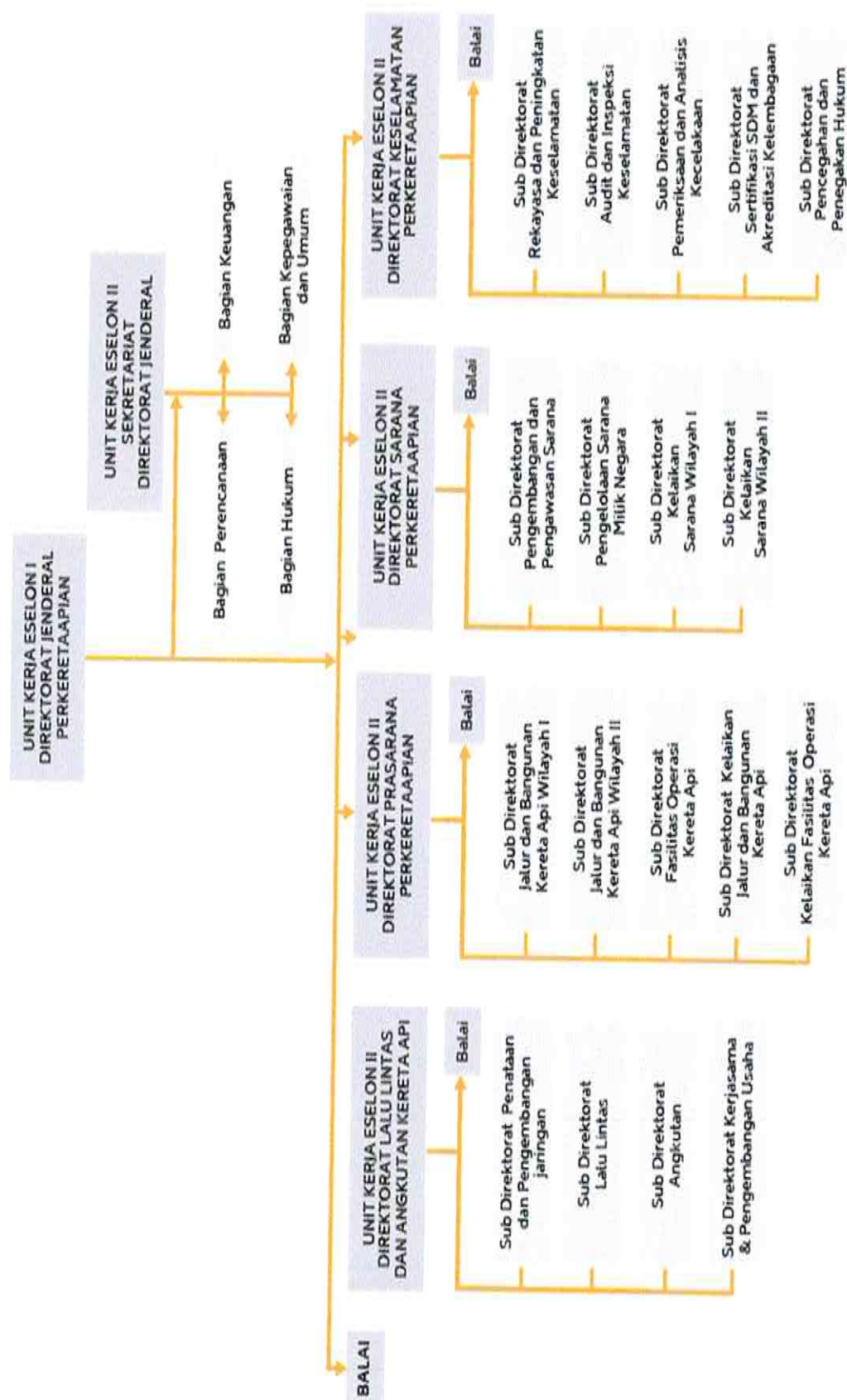
Pengembangan pelayanan perkeretaapian di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua direncanakan mampu melayani perjalanan penumpang sebesar 929,5 juta org/tahun termasuk melayani perjalanan penumpang pada 15 wilayah perkotaan dan barang sebesar 995,5 juta ton/tahun.

c. Struktur Organisasi

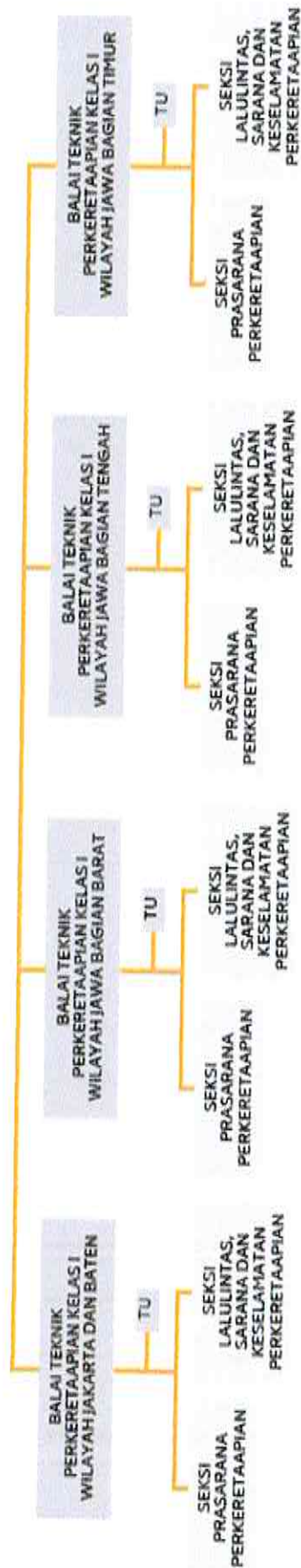
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- 3) Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- 4) Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
- 5) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten;
 - b) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;
 - c) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah;
 - d) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur;
 - e) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara;
 - f) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat;
 - g) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
 - h) Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - i) Balai Perawatan Perkeretaapian.

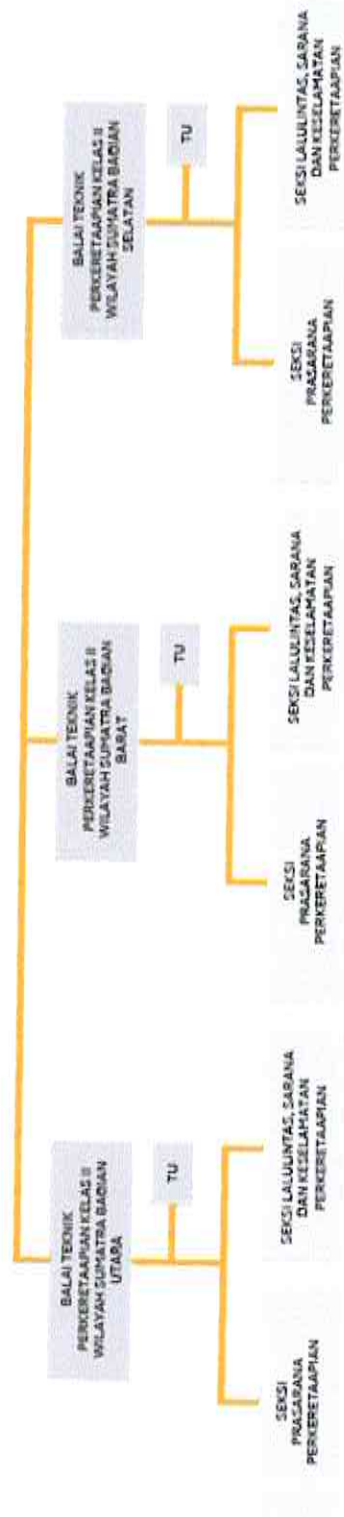
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sedangkan untuk Balai Teknik Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian dan untuk Balai Pengujian Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian serta untuk Balai Perawatan Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 s.d 1.5 berikut ini :



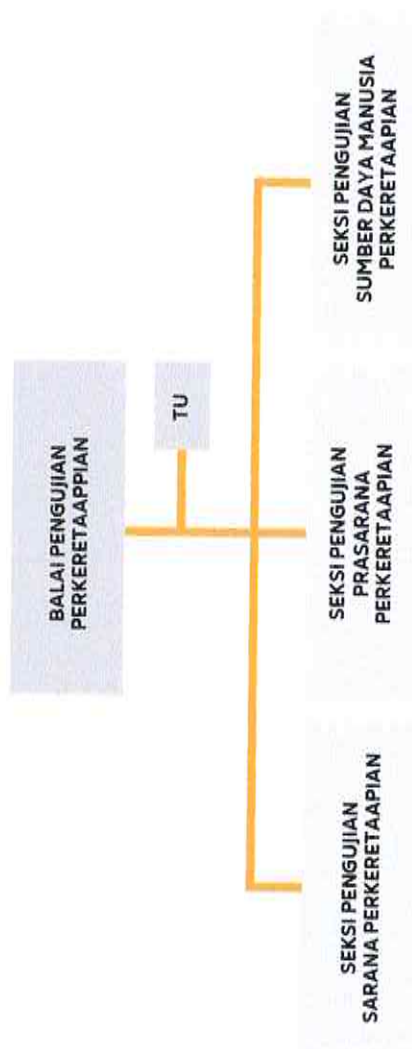
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian



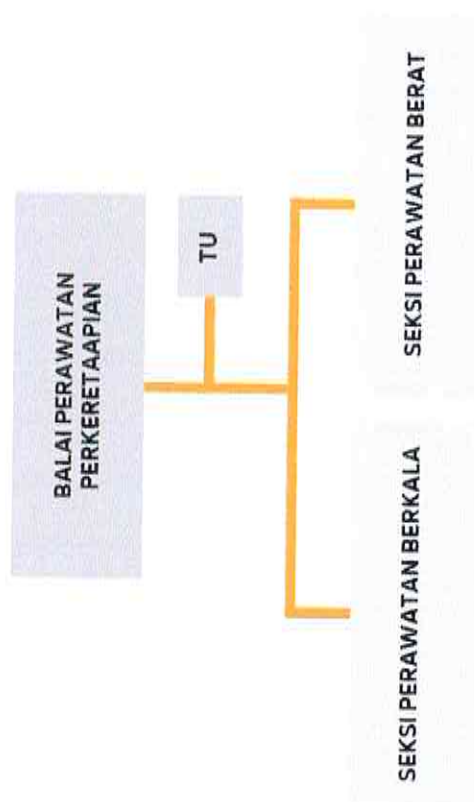
Gambar Diagram 1.2 : Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I



Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II



Gambar Diagram 1.4 : Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian



Gambar 1.5 : Struktur Organisasi Balai Perawatan Perkeretaapian

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan Tahun 2017 berjumlah 597 dengan rincian 337 pegawai dikantor pusat dan 260 pegawai tersebar di Balai Perkeretaapian sebagaimana diuraikan berikut ini :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

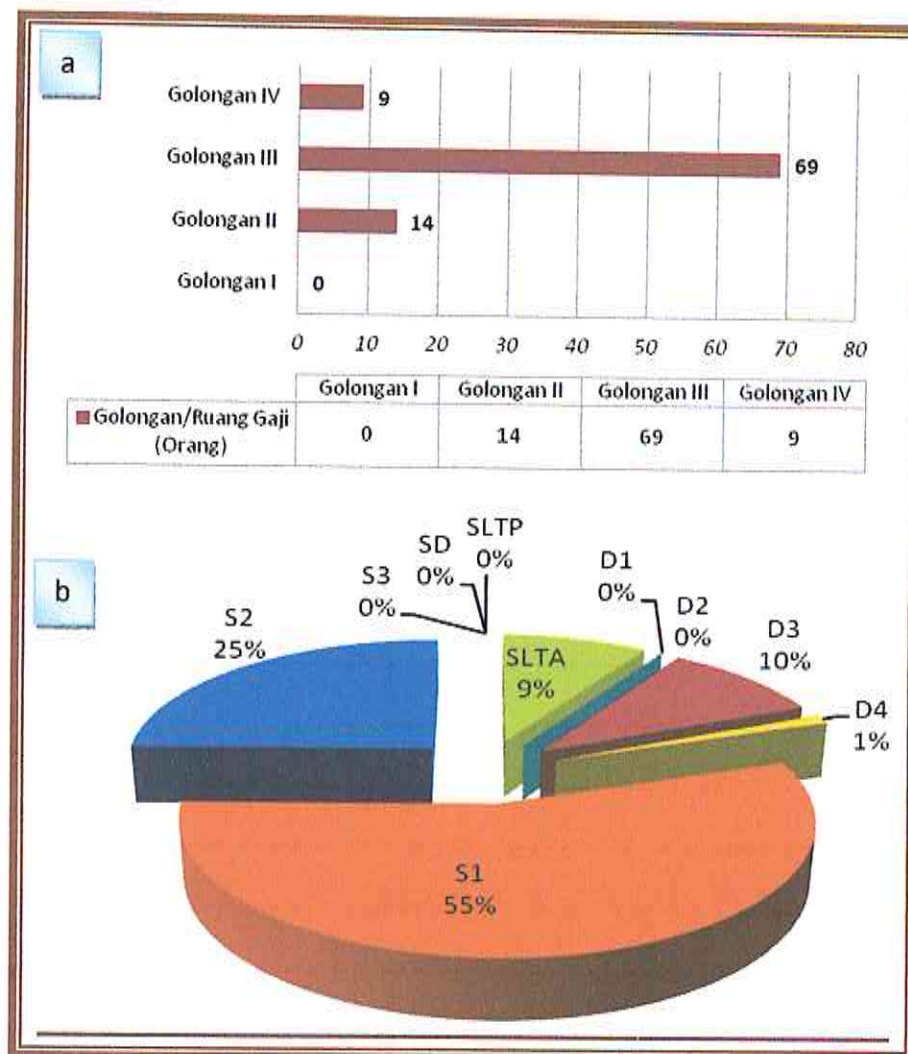
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana dan program pengembangan perkeretaapian, penyusunan data dan informasi serta pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 3) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan transportasi perkeretaapian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerjasama luar negeri;
- 4) Penyiapan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- 5) Penyiapan penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdiri atas:

- 1) Bagian Perencanaan;
- 2) Bagian Keuangan;
- 3) Bagian Hukum; dan
- 4) Bagian Kepegawaian dan Umum.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2017 secara total pegawai 95 Orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Setditjen Perkeretaapian
berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur,

serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian.

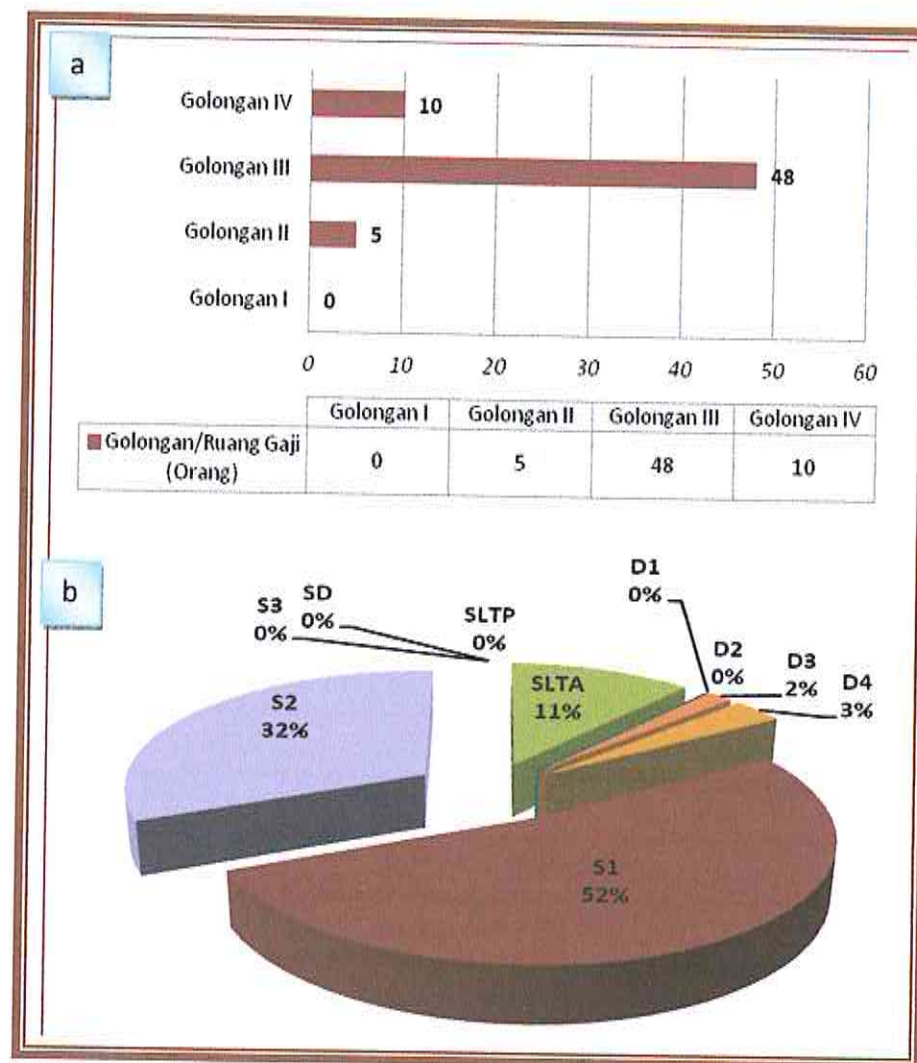
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 2) Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan serta rencana jaringan pelayanan perkeretaapian;
- 5) Penyiapan penyusunan bahan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian;
- 6) Penyiapan bahan perumusan pedoman perhitungan, pelaksanaan dan evaluasi biaya penggunaan, dan pengelolaan prasarana perkeretaapian;
- 7) Penyiapan pelaksanaan penetapan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, izin usaha, izin operasi, dan izin lintas pelayanan di bidang perkeretaapian;
- 8) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian; dan
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan;
- 2) Subdirektorat Lalu Lintas;
- 3) Subdirektorat Angkutan;
- 4) Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tahun 2017 secara total pegawai 57 orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

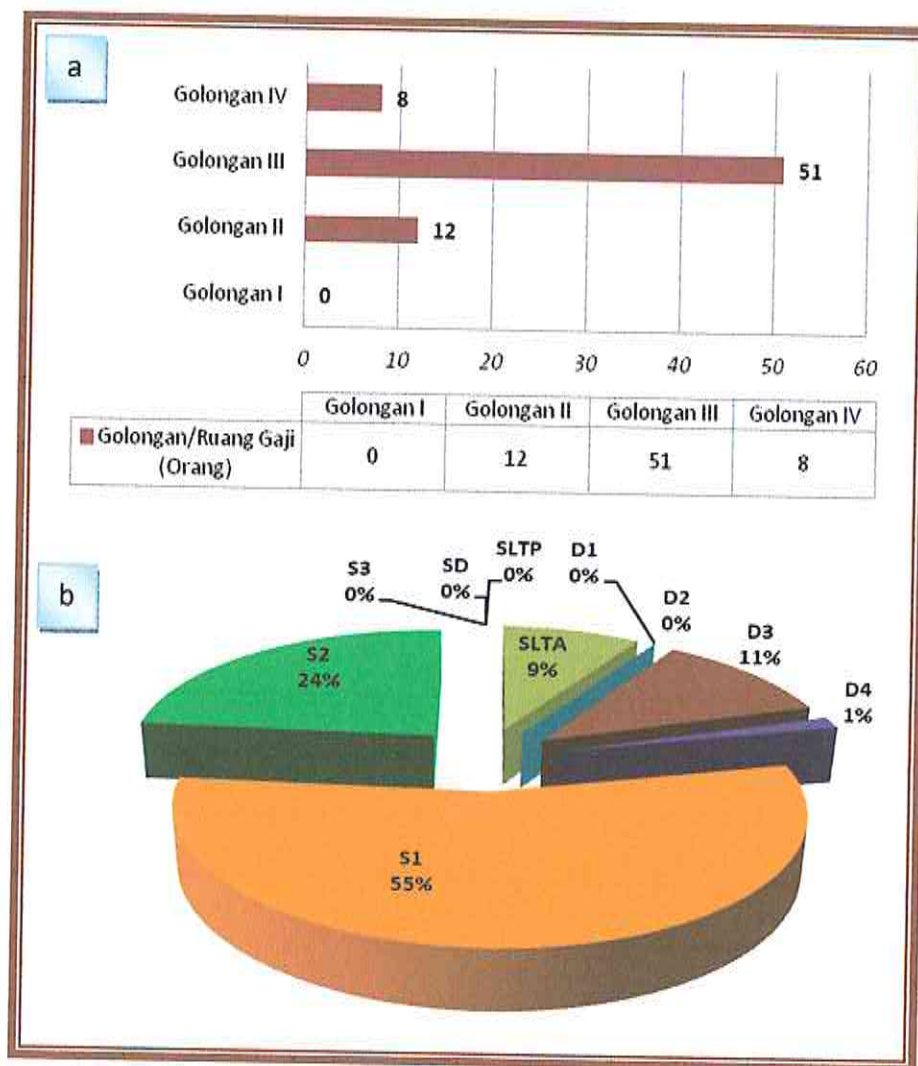
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api; perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- 2) Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- 3) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- 5) Penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan prasarana termasuk material baru dan akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi prasarana perkeretaapian;
- 6) Penyiapan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi pembangunan, perawatan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian serta pengusahaan prasarana perkeretaapian milik negara;
- 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta pengujian prasarana perkeretaapian; dan
- 8) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terdiri atas :

- 1) Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;
- 2) Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;
- 3) Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;
- 4) Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- 5) Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2017 secara total pegawai 70 orang, dapat dikelompokkan sebagai berikut



Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

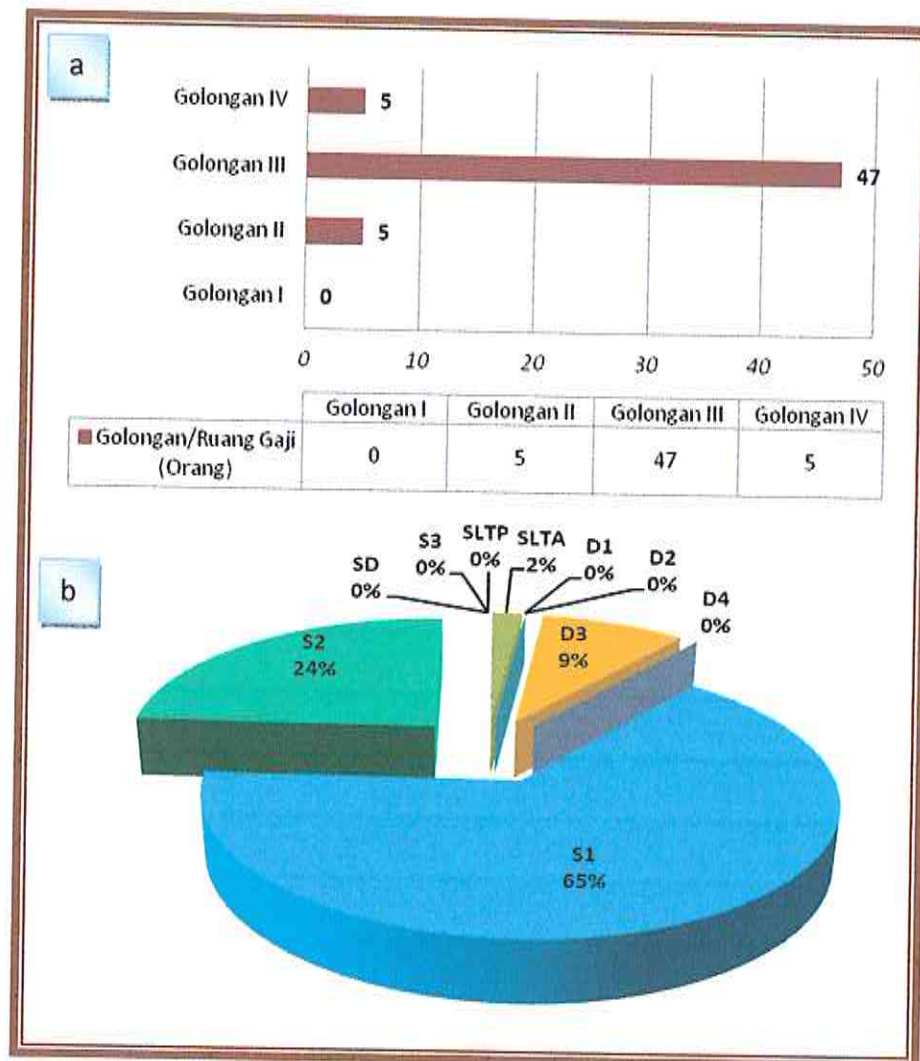
d. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian.

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai total sumber daya manusia 57 Orang, terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;
- 2) Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- 3) Subdirektorat Kelaikan Wilayah I;
- 4) Subdirektorat Kelaikan Wilayah II; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2017 terdiri dari 57 Orang, dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan/kepangkatan digambarkan pada Gambar. 1.8.



Gambar 1.5
Komposisi Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian
berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- 2) Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;

- 3) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana;
- 5) Penyiapan pengembangan sistem informasi sarana;
- 6) Penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas sarana;
- 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana; dan
- 8) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai 5 Eselon III dan 1 Eselon IV, terdiri atas:

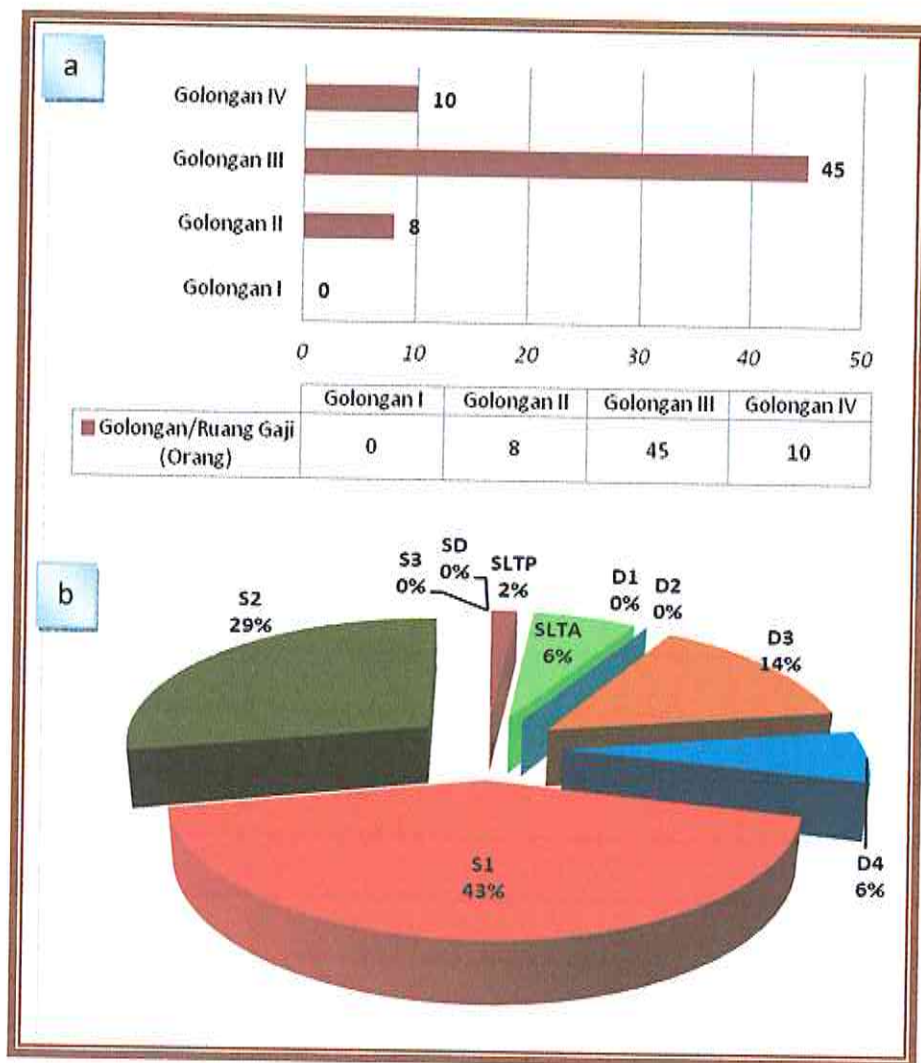
- 1) Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- 2) Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- 3) Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- 4) Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;
- 5) Subdirektorat Pencegahan & Penegakan Hukum; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;

- 2) Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- 3) Penyiapan perumusan dan pembinaan teknis di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- 4) Penyiapan penyusunan dan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 5) Penyiapan pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian;
- 6) Penyiapan pelaksanaan analisis perkembangan kondisi keselamatan perkeretaapian;
- 7) Penyiapan pemeriksaan dan audit keselamatan terhadap penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan perkeretaapian;
- 8) Penyiapan pelaksanaan promosi keselamatan melalui diseminasi hal-hal khusus tentang keselamatan, dalam bentuk seminar, kampanye keselamatan;
- 9) Penyiapan penerapan penegakan peraturan dan penindakan hukum yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian;
- 10) Penyiapan pemeliharaan dokumen akreditasi dan sertifikasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, infraksi (pelanggaran aturan), dan laporan kecelakaan; dan
- 11) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Komposisi sumber daya manusia (SDM) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2017 terdiri dari 59 Orang, dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat golongan/ kepangkatan sebagai berikut :



Gambar 1.6
Komposisi Pegawai Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan tingkat pendidikan (a) tingkat golongan/ kepangkatan (b)

1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

a. Potensi & Isu Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- 1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

- a) Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
- c) Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
- e) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;

- f) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
- g) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

2) Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

- a) Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
- b) Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
- c) Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

b. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan perkeretaapian antara lain :

- 1) Keterbatasan pendanaan melalui APBN sehingga perlu adanya sumber pendanaan alternatif yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- 2) Kesiapan ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan, dalam pembangunan perkeretaapian;
- 3) Keterbatasan jumlah SDM Perkeretaapian secara kuantitas dan kualitas;

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tahun 2017 ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Ditjen Perkeretaapian selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 yang telah dilakukan reviu, membandingkan dengan tahun sebelumnya serta target dan realisasi pencapaian dari tahun 2015-2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan unit kerja/instansi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ditjen Perkeretaapian tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika penyusunan yang mengacu pada pedoman peraturan tersebut diatas ialah sebagai berikut :

- a. **Bab I,** Pendahuluan memuat gambaran singkat mengenai unit kerja Ditjen Perkeretaapian yang termuat dalam kedudukan, tugas dan fungsi sebagai regulator dibidang Perkeretaapian, tugas, fungsi, dan struktur organisasi termasuk visi, misi, sasaran dan tujuan, sumber daya manusia dengan komposisi dan jumlah pegawai dengan penekanan kepada aspek strategis unit organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) pada sajian

grand strategy organisasi disertai kebijakan umum yang sedang dihadapi organisasi, ditutup dengan sistematika pelaporan.

- b. **Bab II**, Perencanaan Kinerja memuat materi berisikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) 2017 serta revisi Perjanjian Kinerja (PK) 2017 disusun berdasarkan kelompok Sasaran pada setiap kinerja dalam Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai capaian dasar pengukuran kinerja Ditjen Perkeretaapian di tahun 2017.
- c. **Bab III**, Akuntabilitas Kinerja Ditjen Perkeretaapian memuat materi berisikan metode pengukuran untuk analisis capaian kinerja unit kerja dan realisasi anggaran. Dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis unit kerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017, Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2015-2017, Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Reviu Renstra), Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kontribusi Terhadap Capaian IKU Kementerian Perhubungan termasuk pelaporan realisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2017.
- d. **Bab IV**, Penutup materi berisikan ringkasan LKIP berupa kesimpulan dan saran-saran yang akan dilakukan unit kerja dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja.
- e. **Lampiran-lampiran**, Terdiri dari Rencana Strategis (RS) 2015 - 2019 Ditjen Perkeretaapian, Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017, Capaian Pengukuran Kinerja (PKK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

II.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2015-2019

Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.1 Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Renstra Kementerian Perhubungan
Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia	Pengembangan jaringan jalur kereta api di Sumatera, Jawa&Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua	• Penyusunan masterplan jalur kereta api di Sumatera, Jawa&Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua • Penyambungan jalur kereta api Trans Sumatera • Pengembangan jaringan jalur pada pulau besar baru (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua)
	Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Membangun jalur kereta akses ke bandara dan pelabuhan	• Pembangunan akses kereta api ke beberapa pelabuhan dan bandara internasional dan Pelabuhan Penyeberangan Merak • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur Kereta Api Akses ke Bandara dan Pelabuhan • Pengadaan material/peralatan untuk Jalur KA Akses Bandara/Pelabuhan
SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	Peningkatan daya saing moda kereta api perkeretaapian	a. Meningkatkan pangsa muatan angkutan penumpang kereta api	• Peningkatan jumlah lintas pelayanan angkutan penumpang perkotaan dan antar kota hingga mampu meningkatkan pangsa menjadi > 7,5% • Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang • Peningkatan kinerja penyelenggaraan Angkutan Lebaran , Natal, dan Tahun baru

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
		b. Meningkatkan pangsa muatan angkutan barang kereta api	• Optimalisasi kapasitas lintas jalur Ganda Lintas Utara Jawa dan lintas lainnya hingga dapat meningkatkan jumlah peti kemas terangkut menjadi sekitar 1,5 juta TEUs/th dan pangsa muatan barang menjadi 5% • Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan kapasitas layanan angkutan barang • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang intermodality pada stasiun strategis di pelabuhan dan kawasan Industri
SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan kinerja pengendalian transportasi kereta api	a. Meningkatkan kinerja pemeliharaan dan operasional prasarana dan sarana perkeretaapian	• Peningkatan pemenuhan kebutuhan IMO • Pengurangan <i>backlog</i> pemeliharaan prasarana melalui peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api, peningkatan/rehabilitasi jembatan, peningkatan persinyalan dan telekomunikasi, serta perlistrikan dan bangunan operasional • Pengurangan <i>backlog</i> pemeliharaan sarana kereta api melalui pemeliharaan, pembaruan dan modifikasi sarana
		b. Meningkatkan penyediaan regulasi, kebijakan, serta sistem pendukung keselamatan perkeretaapian	• Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana • Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan • Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api
	Peningkatan keselamatan dalam pengoperasian perkeretaapian	Meningkatkan kinerja audit, inspeksi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian	• Peningkatan kegiatan pemeriksaan/inspeksi keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kegiatan audit keselamatan dan safety assessment • Peningkatan pemantauan keselamatan dalam lalu lintas kereta api • Persiapan dan pelaksanaan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, dan resertifikasi ISO manajemen mutu audit dan inspeksi keselamatan • Pengadaan peralatan pendukung kegiatan audit dan inspeksi

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			• Peningkatan kegiatan sosialisasi/promosi keselamatan kepada masyarakat dan instansi terkait • Kerjasama luar negeri di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan kemampuan teknis bidang audit dan keselamatan • Peningkatan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang keselamatan perkeretaapian
	Peningkatan jumlah sertifikat pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian	a. Meningkatkan penyediaan regulasi dan fasilitas pendukung kegiatan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan penyediaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian
		b. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan sertifikasi sarana kereta api • Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan sertifikasi prasarana kereta api • Peningkatan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi
	Peningkatan keamanan asset dan operasional KA	a. Meningkatkan kinerja pengamanan operasional kereta api	• Peningkatan jumlah dan kompetensi petugas keamanan kereta api • Peningkatan kinerja pengamanan di stasiun • Peningkatan efektivitas kegiatan dan koordinasi pengamanan operasional kereta api
		b. Meningkatkan kinerja pengawasan terhadap asset perkeretaapian	• Peningkatan pengawasan terhadap asset prasarana perkeretaapian • Peningkatan penyediaan fasilitas pengamanan asset prasarana perkeretaapian
SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api	a. Meningkatkan kinerja pengoperasian KA	• Peningkatan kegiatan perencanaan operasi kereta api • Penyusunan dan penetapan GAPEKA • Peningkatan kinerja pemantauan dan evaluasi GAPEKA

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
		b. Meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan/ kedatangan KA	• Peningkatan kinerja operasional layanan di stasiun kereta api • Peningkatan kinerja pemantauan dan pengendalian operasional lintas KA • Peningkatan penyediaan fasilitas operasi kereta api • Peningkatan kinerja sistem persinyalan dan telekomunikasi kereta api
	Penambahan jumlah kota yang menerapkan angkutan massal berbasis jalan rel	Membangun jaringan kereta api perkotaan	• Pembangunan kereta api perkotaan sejumlah kota Metropolitan/Besar, (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Palembang, Manado, Medan, Batam, Padang, dan lain sebagainya • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jaringan Kereta Api Perkotaan • Pengadaan material/peralatan untuk Pembangunan Jaringan KA Perkotaan
	Peningkatan kontribusi moda kereta api dalam angkutan penumpang perkotaan	a. Meningkatkan penyediaan layanan kereta api perkotaan	• Peningkatan pengadaan sarana kereta api perkotaan (KRL, KRDI) • Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan KA perkotaan
		b. Meningkatkan kapasitas jalur kereta api perkotaan	• Peningkatan Jalur ganda/elektrifikasi, pengembangan KA perkotaan, Jalur Layang KA • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Perkotaan • Pengadaan material/peralatan untuk Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Perkotaan
	Peningkatan penurunan efek gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	Meningkatkan implementasi penggunaan teknologi ramah lingkungan berbasis rel	• Pembangunan elektrifikasi jalur KA
SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan angkutan kereta api yang disediakan oleh Pemerintah	a. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PSO kereta api	• Peningkatan kapasitas angkut pada lintas PSO eksisting • Peningkatan jumlah lintas pelayanan KA PSO • Peningkatan efektivitas perencanaan PSO kereta api • Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi PSO kereta api

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
		b. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan KA perintis	• Peningkatan kapasitas angkut pada lintas perintis eksisting • Peningkatan jumlah lintas pelayanan KA perintis • Peningkatan efektivitas perencanaan kereta api perintis • Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi kereta api perintis
	Peningkatan kapasitas pada jalur kereta api eksisting	a. Membangun jalur ganda pada lintas eksisting	• Pembangunan jalur ganda • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Reaktivasi Jalur KA • Pengadaan material/peralatan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api
		b. Melakukan elektrifikasi pada jalur padat	• Pelaksanaan elektrifikasi • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Elektrifikasi Jalur KA • Pengadaan material/peralatan untuk Elektrifikasi Jalur Kereta Api
	Pembangunan jalur kereta api baru	Membangun jalur kereta api baru	• Pembangunan jalur rel kereta api antar kota di lokasi baru, terutama di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur KA • Pengadaan material/peralatan untuk Pembangunan Jalur Kereta Api
	Reaktivasi jalur kereta api non operasi	Melakukan reaktivasi jalur kereta api non-operasi	• Reaktivasi jalur kereta api non-operasi Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Reaktivasi Jalur Kereta Api • Pengadaan material/peralatan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api
SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Peningkatan target deregulasi dan penyederhaan perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Melakukan penyederhanaan regulasi, sertifikasi, perizinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	• Pelaksanaan revisi sejumlah peraturan untuk menyederhanakan proses perizinan, persetujuan, rekomendasi dalam penyelenggaraan perkeretaapian • Pelaksanaan revisi sejumlah peraturan untuk menyederhanakan proses sertifikasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia perkeretaapian
	Menguatnya struktur regulasi penyelenggaraan perkeretaapian	a. Meningkatkan penyediaan regulasi di bidang perkeretaapian	• Penyusunan kajian kerangka regulasi di bidang perkeretaapian • Peningkatan kajian dan penelaahan regulasi di bidang perkeretaapian • Peningkatan jumlah peraturan setingkat Menteri dan Dirjen yang

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			ditetapkan
		b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang perkeretaapian	• Peningkatan efektivitas kegiatan sosialisasi/seminar/wrkshop dalam rangka implementasi regulasi di bidang perkeretaapian • Peningkatan kinerja pengawasan dan bantuan hukum di bidang perkeretaapian
SP7 Meningkatkan peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	Peningkatan kerjasama maupun inisiasi pembangunan program perkeretaapian dengan skema pendanaan alternatif	a. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan awal untuk program pembangunan yang akan di danai dengan skema pendanaan alternatif	• Penyusunan kajian pra kelayakan untuk program pembangunan dengan potensi investasi badan usaha; • Pelaksanaan evaluasi terhadap mekanisme perizinan investasi/penyelenggaraan perkeretaapian oleh pemda dan badan usaha
		b. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah maupun badan usaha	• Koordinasi dan sosialisasi terkait mekanisme pendanaan pembangunan program perkeretaapian dengan skema pendanaan alternatif
SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jumlah SDM Ditjen Perkeretaapian	a. Meningkatkan jumlah SDM regulator perkeretaapian sesuai kebutuhan	• Peningkatan rekrutmen SDM regulator (teknis) untuk pelaksanaan sertifikasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang perkeretaapian • Peningkatan kerjasama dengan lembaga sertifikasi di bidang perkeretaapian
		b. Meningkatkan kualitas SDM regulator di bidang perkeretaapian	• Peningkatan ketersediaan modul pelatihan SDM regulator perkeretaapian • Peningkatan kompetensi SDM regulator dan aparatur perkeretaapian melalui pendidikan dan pelatihan • Pelaksanaan penyegaran/peningkatan tenaga penguji, inspektur, dan auditor
		c. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi SDM perkeretaapian	• Peningkatan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis dan penyegaran SDM perkeretaapian • Peningkatan kinerja pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi akreditasi badan hukum pendidikan dan pelatihan di bidang SDM perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			• Pelaksanaan pengujian kecakapan awak sarana, PPKA, dan penjaga perlintasan • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi SDM perkeretaapian • Pelaksanaan lokakarya kesiagaan dan tanggap darurat SDM perkeretaapian
		d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan regulasi dan fasilitas pendukung pelaksanaan sertifikasi SDM perkeretaapian	• Pengkajian pemetaan kompetensi SDM perkeretaapian, khususnya untuk teknoloi maru (monorel, tram, kereta gantung, dsb) • Kajian kelayakan dan pembangunan fasilitas uji kompetensi SDM perkeretaapian • Pengadaan tanda pengenalan (smart card) kompetensi SDM perkeretaapian • Pengadaan dan peningkatan peralatan sistem monitoring kompetensi SDM perkeretaapian • Pengadaan dan upgrade peralatan dan software simulator pengujian SDM perkeretaapian
SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Peningkatan kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, BMN, dan PNPB di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	• Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingk. Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan Ketepatan Waktu Berita Acara Serah Terima Barang • Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak • Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan • Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/UPT
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Ditjen Perkeretaapian	Peningkatan kemajuan reformasi birokrasi di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	• Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan kinerja Koordinasi pembangunan melalui kegiatan Sosialisasi/Seminar/Workshop/Lokakarya dan Rapat/Rakor/Rakornis/Radin/Raker • Peningkatan efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja • Peningkatan kualitas AKIP melalui peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Hasil

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
			Kegiatan/Kinerja, dan Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian
	Tuntasnya agenda pengembangan kelembagaan perkeretaapian	Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan internal Ditjen Perkeretaapian	• Pelaksanaan kajian, desain, serta pengembangan UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan kinerja humas dan kerjasama luar negeri • Peningkatan kinerja pembinaan dan pengembangan organisasi

II.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015 – 2019. Rincian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
1	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
	Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun
	Tersusunnya laporan survey/studi kebijakan/ masterplan/studi kelayakan bidang pembinaan & peningkatan transportasi perkeretaapian	Jumlah laporan survey/studi kebijakan/ masterplan/studi kelayakan bidang pembinaan & peningkatan perkeretaapian	10 Dokumen
	Terlaksananya kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Perencanaan, Keuangan, Hukum, Kepegawaian dan Umum	4 Kegiatan
	Terlaksananya Belanja Pegawai termasuk Tunjangan	Pembiayaan Belanja Pegawai termasuk Tunjangan	1 Tahun
2	Pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api		
	Terselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
	Terlaksananya Angkutan Kereta Api yang bersubsidi	Jumlah Subsidi Angkutan Kereta Api	2 Kegiatan
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA	Jumlah Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA	21 Dokumen
	Terlaksananya Pembinaan bidang LLAKA	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bidang LLAKA	4 Kegiatan
	Terlaksananya Pembangunan/pengadaan fasilitas/peralatan Lalu Lintas dan Angkutan kereta Api	Pembangunan/pengadaan fasilitas/peralatan Lalu Lintas dan Angkutan kereta Api	2 Paket
3	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api		
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Rel/Emplasemen	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Rel/Emplasemen	246,16 Km'sp
	Terbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	724,43 Km'sp
	Tersedianya material rel	Jumlah km pengadaan rel	550 Km'sp
	Tersedianya material wesel	Jumlah unit pengadaan wesel	200 unit
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	57 Unit
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	Jumlah Pembangunan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over	68 Unit
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional	Rehabilitasi/Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional	7 unit
	Terlaksananya Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional	Jumlah Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional	17 Unit
	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Persinyalan & Telekomunikasi	Jumlah Rehabilitasi / Peningkatan Persinyalan & Telekomunikasi	8 Paket
	Terlaksananya Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi	Jumlah Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi	14 Paket
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA)	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA)	45 Km'sp
	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya)	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya)	1 Unit
	Terlaksananya Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) termasuk gardu Listrik	Jumlah Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) termasuk gardu Listrik	138,50 Km'sp

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
	Terlaksananya Peningkatan/Pembangunan Bangunan Khusus	Jumlah Peningkatan/Pembangunan Bangunan Khusus	5 Unit
	Terlaksananya Pemagaran Fasilitas Pendukung / Sterilisasi	Jumlah Pemagaran Fasilitas Pendukung / Sterilisasi	13 Paket
	Terlaksananya Pengamanan Perlindungan Sebidang	Jumlah Pengamanan Perlindungan Sebidang	45 Paket
	Terlaksananya Pengadaan Lahan	Jumlah Pengadaan Lahan	31 Paket
	Terlaksananya Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (MTT, dll)	Jumlah Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (MTT, dll)	25 Paket
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana Perkeretaapian	Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana Perkeretaapian	90 Dokumen
	Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	Jumlah Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	1 Tahun
	Terlaksananya Pembinaan bidang Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Pembinaan bidang Prasarana Perkeretaapian	4 Kegiatan
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana	Jumlah Administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun
4	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian		
	Terselenggaranya 100% dukungan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah paket kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Teknik Sarana Perkeretaapian	
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian	2 Kegiatan
	Terbangunnya sarana KA yang handal	Jumlah Pembangunan/Pengadaan sarana perkeretaapian	17 Unit
	Terlaksananya Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian (Depo, Balai Yasa, Balai Uji, Peralatan Pengujian)	Jumlah Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian (Depo, Balai Yasa, Balai Uji, Peralatan Pengujian)	14 Paket
	Terlaksananya Perawatan dan Pengoperasian Sarana dan Fasilitas Sarana Milik Negara	Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Sarana dan Fasilitas Sarana Milik Negara	4 Paket
	Tersusunnya Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian	9 Dokumen
	Terlaksananya Pembinaan bidang Sarana Perkeretaapian	Jumlah Pembinaan bidang Sarana Perkeretaapian	6 Kegiatan
	Terlaksananya administrasi dan layanan perkantoran	Jumlah administrasi dan layanan perkantoran	1 tahun
5	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian	3 Kegiatan

NO	KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2017
	Tersedianya Peralatan Keselamatan SDM Perkeretaapian	Jumlah Pembangunan/pengadaan fasilitas /Peralatan Keselamatan Perkeretaapian	20 Paket
	Tersusunnya laporan survey/Studi Kebijakan/Masterplan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah penyusunan studi/kajian/desain/norma/standard/pedoman/criteria/prosedur bidang keselamatan perkeretaapian	9 Dokumen
	Terselenggaranya Pembinaan bidang Keselamatan Perkeretaapi	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bidang Keselamatan Perkeretaap	4 Kegiatan
	Terselenggaranya administrasi dan layanan perkantoran	Jumlah administrasi dan layanan perkantoran	1 Tahun

Pada Rencana Kinerja Tahunan 2017 tersebut di atas masih disajikan dalam bentuk output dan kegiatan berdasarkan kelompok unit kerja, sehingga indikator kinerja yang ditampilkan masih dalam bentuk indikator kinerja kegiatan (IKK).

Keterkaitan antara indikator kinerja kegiatan (output) dengan indikator Kinerja Program (outcome) masih perlu dijabarkan lebih lanjut karena untuk menciptakan outcome perlu keterlibatan pihak lain seperti Operator Perkeretaapian dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu target kinerja yang tertuang dalam Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2017 bukan hanya merupakan hasil kerja (outcome) Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetapi merupakan hasil kerja (outcome) bersama dengan pihak lain.

II.3 REVISI PERJANJIAN KINERJA 2017

A. Perubahan Alokasi Anggaran Tahun 2017

Perubahan alokasi anggaran pada tahun 2017 disebabkan adanya beberapa hal antara lain luncturan pendanaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), efisiensi dan penambahan anggaran (APBNP) serta pencantuman pembiayaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Detail alokasi perubahan anggaran sebagaimana pada tabel II.2 dan tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3

Alokasi Perubahan Pagu Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017

No	Uraian	Pagu Ditjen Perkeretaapian (Rp.)	
		Semula	Menjadi
1).	Total Alokasi	16.022.981.642.000	18.845.733.287.000
a).	Belanja Operasional / Mengikat	196.000.000.000	189.447.949.000
	- Belanja Pegawai termasuk Tunkin	102.200.000.000	102.754.267.000
	- Belanja Barang Mengikat (Keperluan Perkantoran & Penunjang Tupoksi terkait Sarana & Prasarana)	93.800.000.000	86.693.682.000
b).	Belanja Non Operasional/ Tidak Mengikat	15.826.981.642.000	18.656.285.338.000
	- Belanja Barang Tidak Mengikat (termasuk IMO & subsidi)	2.218.734.831.000	1.872.839.071.000
	- Belanja Modal	13.608.246.811.000	16.783.446.267.000
	• Rupiah Murni	5.049.443.119.000	5.133.950.298.000
	• Rupiah Murni Pendamping	482.536.866.000	482.540.000.000
	• Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	7.543.310.000.000	9.749.762.162.000
	• Pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN)	532.956.826.000	1.417.193.807.000

Rincian perubahan alokasi anggaran tersebut antara lain :

- Dana Luncuran SBSN sebesar Rp. 2.206.452.163.000,- meliputi yaitu :

Tabel II.4

Dana Luncuran SBSN Dijen Perkeretaapian Tahun 2017

No	Balai	Kegiatan	Alokasi SBSN 2017 (Rp)			Keterangan
			Semula	Menjadi	Tambahan	
1	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Pembangunan Jalur KA Layang di Kota antara Medan - Bandar Khalipah Baru (MYC 2015 s.d 2018)	908.097.042.000	1.638.616.204.000	730.519.162.000	Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 48,91%, sehingga diperlukan luncuran sisa pendanaan tahun 2016 sebesar Rp. 730,519,162,000,- Kegiatan pembangunan ini meliputi pembangunan jalur KA Layang, pembangunan dan penataan stasiun, pembangunan dan telekomunikasi, pembangunan LAA dan

No	Balai	Kegiatan	Alokasi SBSN 2017 (Rp)			Keterangan
			Secmula	Menjadi	Tambahan	
2	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Pembangunan jalur ganda KA antara Jombang - Madiun lintas Surabaya – Solo (MYC 2016-2018)	1.211.566.460.000	1.288.103.080.550	76.536.620.550	Depo, termasuk supervisi. Pekerjaan yang dilaksanakan antara lain : • Pekerjaan galian dan timbunan jalan KA, pekerjaan struktur bangunan bawah, penataan emplasemen-emplasemen dan pengadaan bantalan beton; • Penyelesaian pekerjaan pembangunan Jembatan dengan bentang kecil; • Pekerjaan penggantian sistem persinyalan dan telekomunikasi elektrik jalur ganda KA antara Jombang - Madiun lintas Surabaya - Solo Balapan.

No	Balai	Kegiatan	Alokasi SBSN 2017 (Rp)			Keterangan
			Semula	Menjadi	Tambahan	
3	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Kegiatan pembangunan jalur kereta api ganda (<i>Double Track</i>) antara stasiun Martapura - Stasiun Baturaja Sumatera Selatan (MYC 2016-2018)	334.499.999.000	743.220.938.000	408.720.939.000	Kegiatannya meliputi pembangunan jalur KA dan supervisi, Pembangunan jembatan dan supervisi, pembangunan persinyalan, pengadaan bantalan beton R.54, Wesel R.54 dan Rel UIC 54 (antara martapura - baturaja).
4	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara) (MYC 2014 s.d 2019)	489.000.000.000	881.090.675.600	392.090.675.600	Penambahan kegiatan luncuran akan digunakan untuk : • Pekerjaan sipil; • Pekerjaan jalan rel meliputi pengadaan material jalan KA, realokasi jalan

No	Balai	Kegiatan	Alokasi SBSN 2017 (Rp)			Keterangan
			Semula	Menjadi	Tambahan	
						KA/Stabling Yard, temporary jalan KA di Emplasement Manggarai , Bekasi Line; • Pekerjaan Fasilitas Operasi;
						Pekerjaan Supervisi
		Paket B2 (1) Modernisasi Fasilitas Perkeretaapian Jatinegara-Bekasi ((MYC 2015- 2018)	369.999.999.320	696.794.777.320	326.794.778.000	Pekerjaan meliputi pekerjaan jalan rel antara st. jatinegara - st. buaran - st. kranji, pekerjaan pembangunan stasiun klender, stasiun buaran, stasiun klender baru, st. cakung, st. Kranji, Pekerjaan Fasilitas Operasi antaran jatinegara - klender,

No	Balai	Kegiatan	Alokasi SBSN 2017 (Rp)			Keterangan
			Semula	Menjadi	Tambahan	
5	Balai Teknik Perkeraaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah	Pekerjaan pembangunan jalur ganda KA antara Cirebon – Kroya (MYC 2015-2018)	77.155.150.000	175.919.701.000	98.764.551.000	klender - bekasi , pekerjaan jalan rel dipo cipinang segmen 1 , pengadaan peralatan Dipo Cipinang, dan Supervisi
			261.366.637.000	434.392.073.000	173.025.436.000	Kegiatannya meliputi pembangunan jembatan antara purwokerto Notog, Jembatan Notog - Kebasen, Terowongan

No	Balai	Kegiatan	Alokasi SBSN 2017 (Rp)			Keterangan
			Semula	Menjadi	Tambahan	
						Notog, Terowongan Kebasen dan pembangunan persinyalan antara Purwokerto - Kroya Lintas Cirebon Kroya

*) Penambahan alokasi anggaran dari dana luncuran SBSN tersebut di atas tidak menambah output pekerjaan di tahun 2017, dikarenakan output pekerjaan dihitung diakhir tahun MYC.

- Perubahan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp. 1.780.362.480.000,- meliputi yaitu :
 - Pencantuman PHLN BTP Jakban (Paket B1) sebesar Rp. 884.236.981.000,-
 - Efisiensi Sesuai INPRES 4 Tahun 2017 sebesar Rp. 162.096.501.000,-
 - Tambahan Pagu Rupiah Murni BTP Jateng (Adi Soemarmo) sebesar Rp. 314.094.000.000,-
 - Pemenuhan Efisiensi sesuai INPRES 4 Tahun 2017 sebesar Rp. 419.934.998.000,-

Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 berdasarkan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel. II.5
Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	
		SEMULA	MENJADI
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian	243.904.201.000	226.336.375.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	255.796.166.000	228.680.870.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api	15.230.415.668.000	18.135.779.214.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	193.386.578.000	170.406.913.000
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	99.479.029.000	84.529.915.000
TOTAL		16.022.981.642.000	18.845.733.287.000

B. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Reviu Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian terdapat 9 (sembilan) sasaran dan 18 (Delapan belas) Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.6

Revisi Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	BASE LINE	TARGET CAPAIAN 2017
Stakeholders Perspective	SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,26	0,28
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 <i>Modal share</i> angkutan penumpang kereta api	% total nasional	3,76	4,0
		IK3 <i>Modal share</i> angkutan barang kereta api	% total nasional	0,18	0,2
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP3 Meningkatkan KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55	0,55
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	13,34	10,70
		IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	10	30
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	63,72	65
		IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20	20
		IK9 Prosentase penurunan gas rumah	%	0,91	6,04

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	BASE LINE	TARGET CAPAIAN 2017
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SP5 Meningkatkan KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	kaca dari subsektor perkeretaapian			
		IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	12,2	15,53
		IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	4,1	7,47
	SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	0	30
		IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	13	13
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	10	20
		IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp	920	1000
	SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	60,17	85
		IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	85,36	87,5
		IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	0	60 (level 2)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkesinambungan melaksanakan manajemen kinerja secara kontinyu yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara berkala melalui monitoring triwulan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 termasuk revisinya yang salah satu perangkatnya dengan menggunakan sistem aplikasi *E-Performance*. Penggunaan terhadap sistem aplikasi tersebut, dilakukan dalam rangka memudahkan unit kerja terkait dalam melakukan Penyajian Data dan Monitoring Capaian Kinerja yaitu :

1. Identifikasi 9 (sembilan) sasaran dan 18 (Delapan belas) Indikator Kinerja Program (IKP);
2. Pengukuran capaian kinerja dari setiap IKP (dalam %) melalui perbandingan realisasi dengan targetnya; dan
3. Memudahkan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melakukan monitoring terhadap Capaian Kinerja Unit kerja dibawahnya yaitu eselon II dan III Mandiri;

Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2017 menyajikan capaian kinerja tahun 2017 dan capaian kinerja tahun 2015-2016 sesuai indikator kinerja dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan Reviu Rencana Strategis Direktorat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019.

III.1. TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan cara perhitungan prosentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan **tidak tercapai sesuai dengan target**, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan **tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran**, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2017;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 Dalam Dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019;
4. Analisis Penyebab Tercapai/Tidak tercapai Kinerja;
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

III.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada awal tahun 2017 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, namun pada Akhir Triwulan IV dilakukan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019 yang juga memuat penyempurnaan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dari yang bersifat *output* menjadi *outcome*. Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.004/SK. 94/DJKA/12/17 tanggal 11 Desember 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015 – 2019.

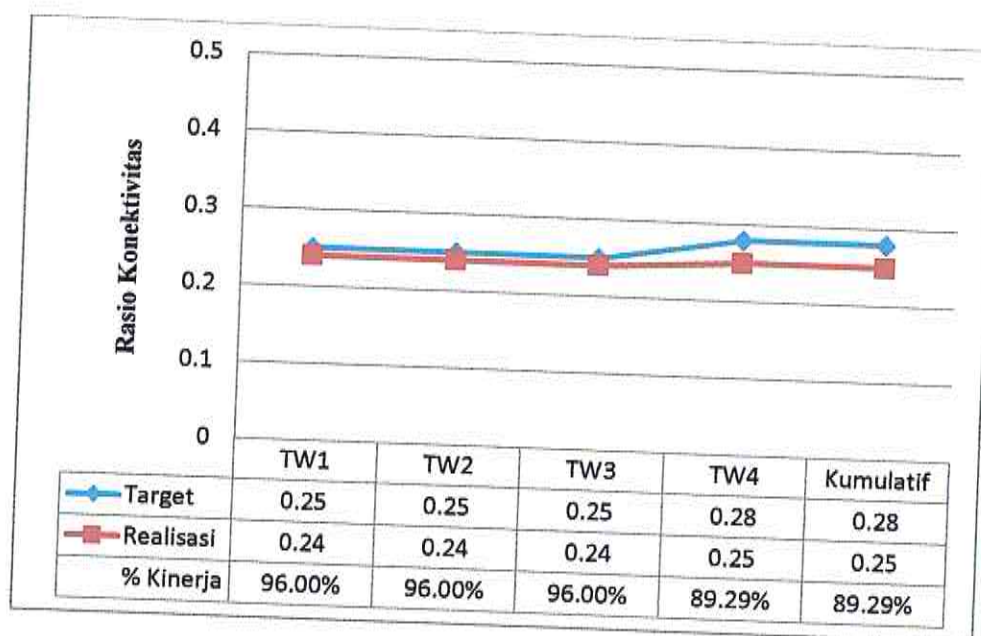
Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2017 melaksanakan target pembangunan berdasarkan 9 (sembilan) sasaran dan 18 (Delapan belas) Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, dimana pada pelaksanaannya ada yang tidak mencapai target, mencapai target, bahkan melebihi target secara umum Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

III.2.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Pertama

Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah pada Tahun 2017 sebesar 0,25 atau Capaian Kinerja sebesar 89,29% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,28. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.1 dan Gambar III.1.

Tabel III.1
Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio konektivitas antar Wilayah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	89,29



Gambar III.1
Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio konektivitas antar Wilayah

III.2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Kedua

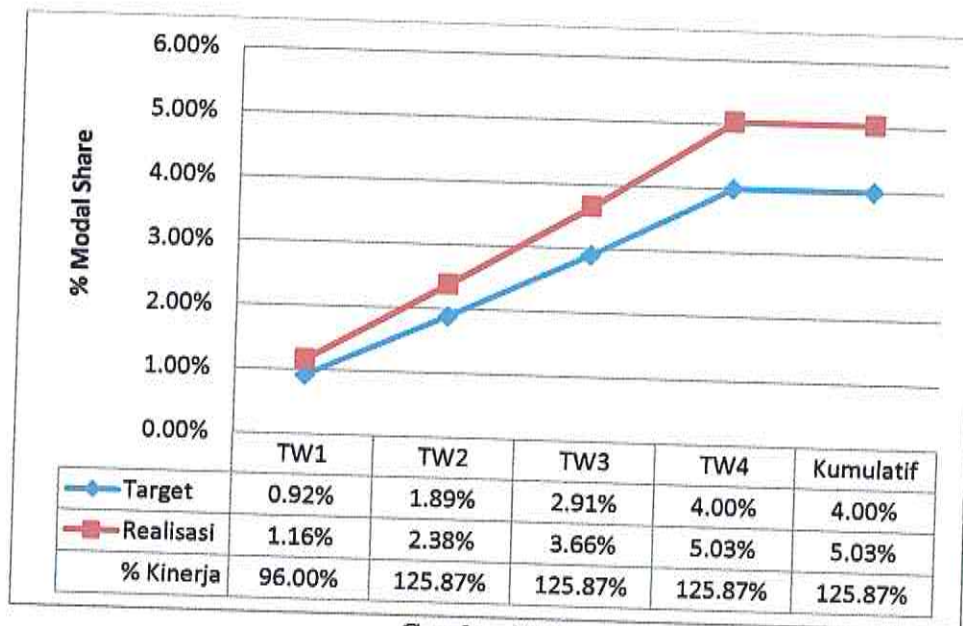
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedua adalah **Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah**, yang diukur dengan 2 IKP yaitu :

1. IKP 2 yaitu *Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api*

Realisasi *Modal share* angkutan penumpang kereta api pada tahun 2017 sebesar 5,03%, atau capaian kinerja sebesar 125,87% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 4%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.2 dan Gambar III.2

Tabel III.2
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Modal share angkutan penumpang kereta api	%	4,0	1,16	2,38	3,66	5,03	5,03	125,87



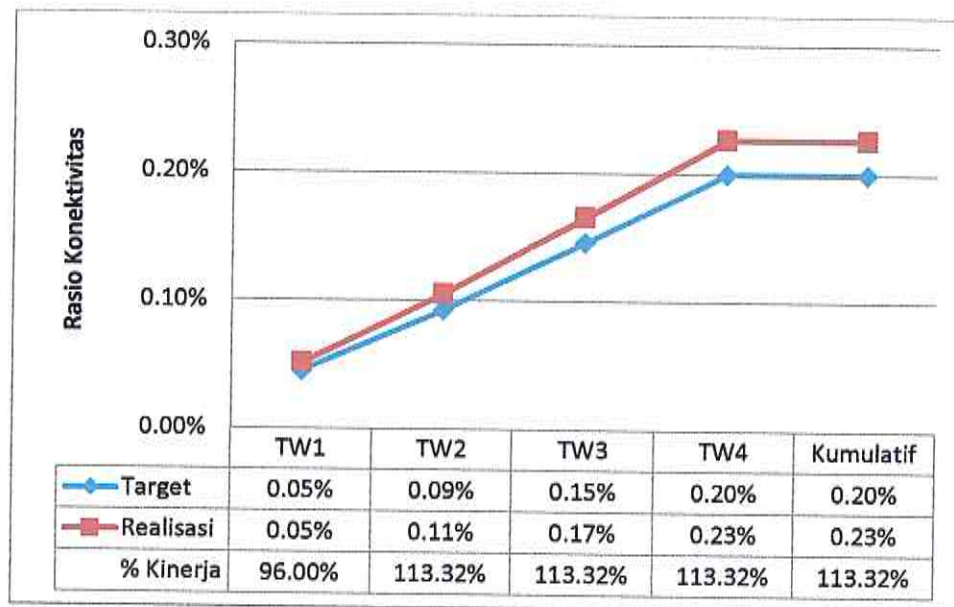
Gambar III.2
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api
Tahun 2017

2. IKP 3 yaitu *Modal Share* Angkutan Barang Kereta Api

Realisasi *Modal share* angkutan barang kereta api pada tahun 2017 sebesar 0,23%, atau capaian kinerja sebesar 113,32% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,2 %. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Gambar III.3

Tabel III.3
Capaian Kinerja *Modal share* Angkutan Barang Kereta Api
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Modal share angkutan penumpang kereta api	%	0,2	0,2	0,05	0,11	0,17	0,23	0,23



Gambar III.3
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api
Tahun 2017

III.2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Ketiga

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ketiga adalah **Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 4 yaitu Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)

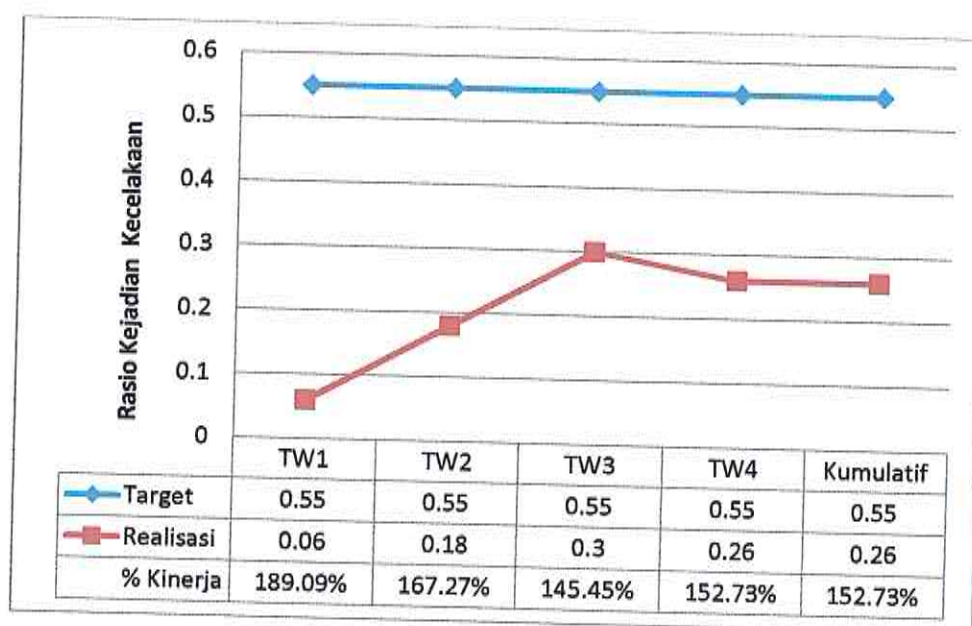
Capaian Indikator Kinerja Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada tahun 2017 sebesar 152,73%. Pada Tahun 2017 telah terjadi 17 kali kejadian kecelakaan perkeretaapian dengan menggunakan perhitungan *Rate of Accident* (RoA) yang merupakan Salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu :

$$\text{Rate of Accident} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Realisasi Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada Tahun 2017 sebesar 0,26 Ratio kecelakaan/ 1 juta km atau capaian kinerja sebesar 152,73% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.4 dan Gambar III.4

Tabel III.4
Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*rate of accident*) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	Ratio kecelakaan / 1 juta km	0,55	0,06	0,18	0,30	0,26	0,26	152,73



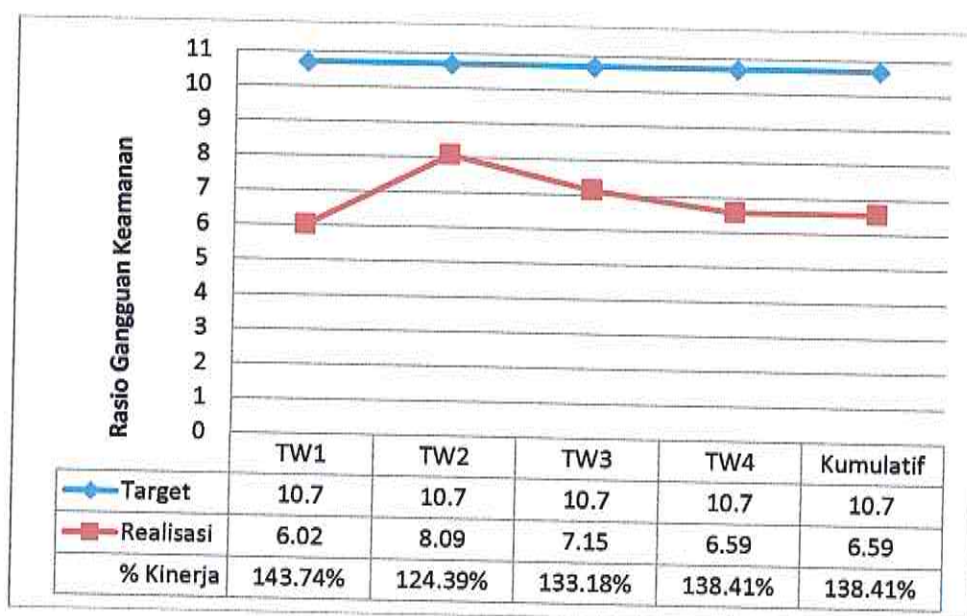
Gambar III.4
Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*rate of accident*) Tahun 2017

2. IKP 5 yaitu Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Realisasi Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 6,59 Ratio gangguan keamanan / 1 juta km atau Capaian sebesar 138,41% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 10,7 Ratio gangguan keamanan/ 1 juta km. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.5 dan Gambar III.5

Tabel III.5
Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Ratio gangguan keamanan / 1 juta km	10,7	6,02	8,09	7,15	6,59	6,59	138,41



Gambar III.5
Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017

3. IKP 6 yaitu Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

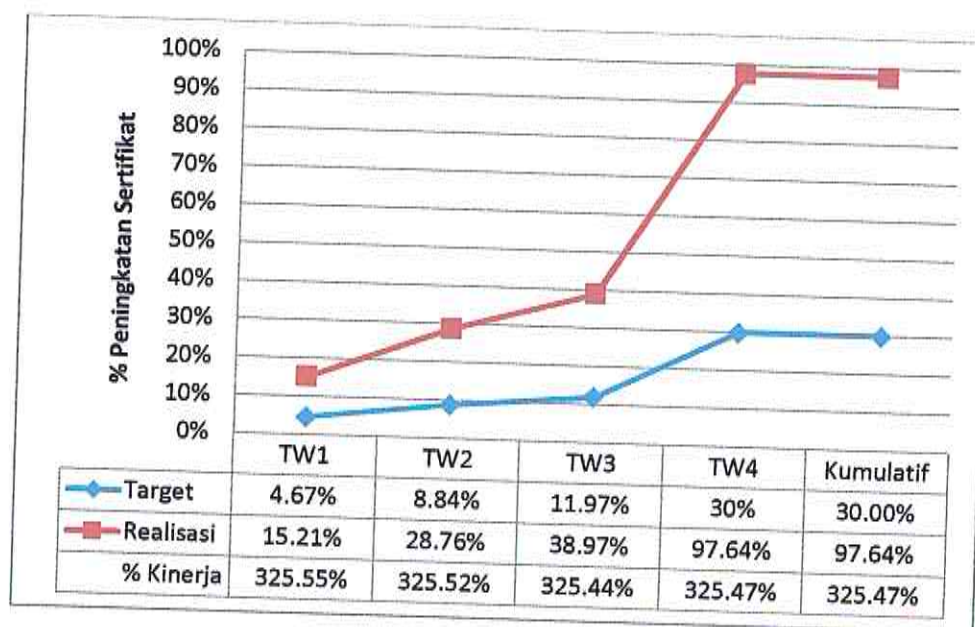
Penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM) Tahun 2017 sebanyak 10.139 sertifikat atau Capaian Kinerja sebesar 325,47% dari target yang ditetapkan sebanyak 3.115 sertifikat atau 30% dari total target sertifikasi sampai dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2017 telah diterbitkan sertifikat perkeretaapian sebanyak 10.139 sertifikat terdiri dari :

- a) Sertifikat SDM Operator Perkeretaapian sebanyak 6.146 sertifikat
- b) Sertifikat Sarana Perkeretaapian sebanyak 3.533 sertifikat
- c) Sertifikat Prasarana Perkeretaapian sebanyak 460 sertifikat

Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.6 dan Gambar III.6

Tabel III.6
Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	30	15,21	28,76	38,97	97,64	97,64	325,47%



Gambar III.6
Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017

III.2.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Keempat

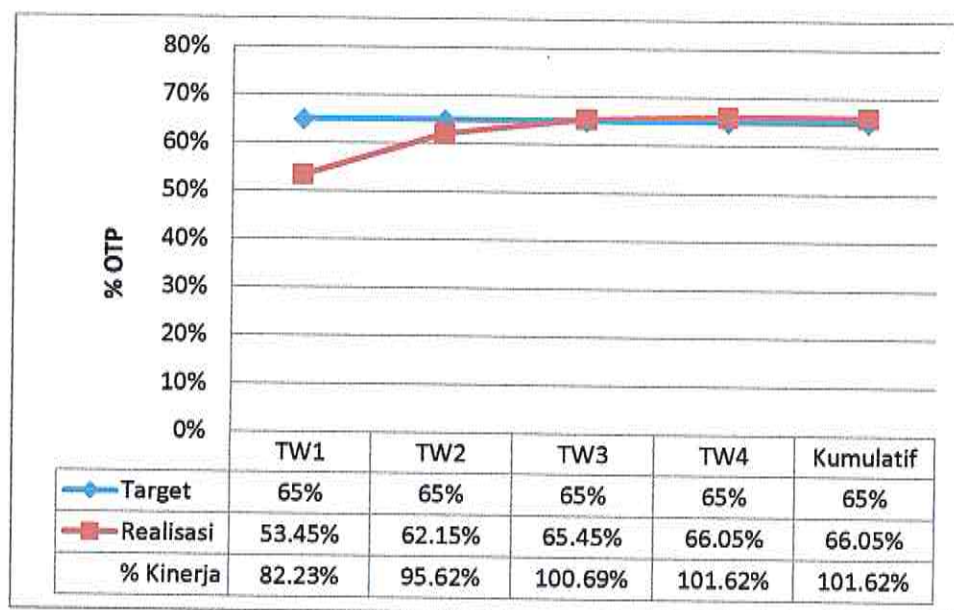
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang keempat adalah **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 7 yaitu Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

Realisasi Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 66,05% atau capaian kinerja sebesar 101,62% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 65%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.7 dan Gambar III.7

Tabel III.7
Capaian Kinerja Prosentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2017

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	65	53,45	62,15	65,45	66,05	66,05	101,62%



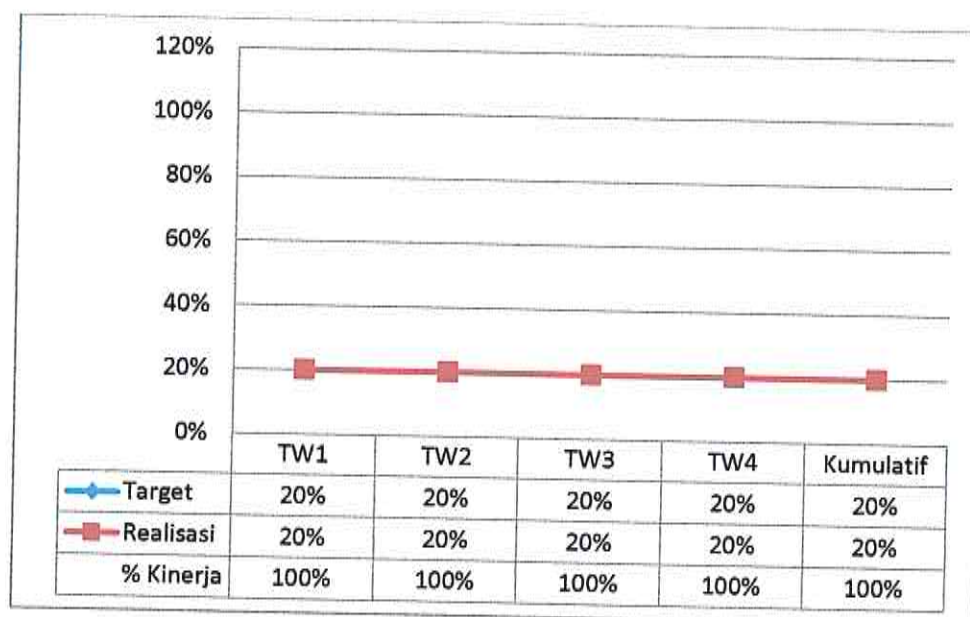
Gambar III.7
Capaian Kinerja Prosentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Kereta Api Tahun 2017

2. IKP 8 yaitu Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

Realisasi prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan pada tahun 2017 sebesar 20% (6 kota) atau Capaian Kinerja sebesar 20% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 20% (6 Kota). Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.8 dan Gambar III.8

Tabel III.8
Capaian Kinerja Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan Tahun 2017

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20	20	20	20	20	20	100



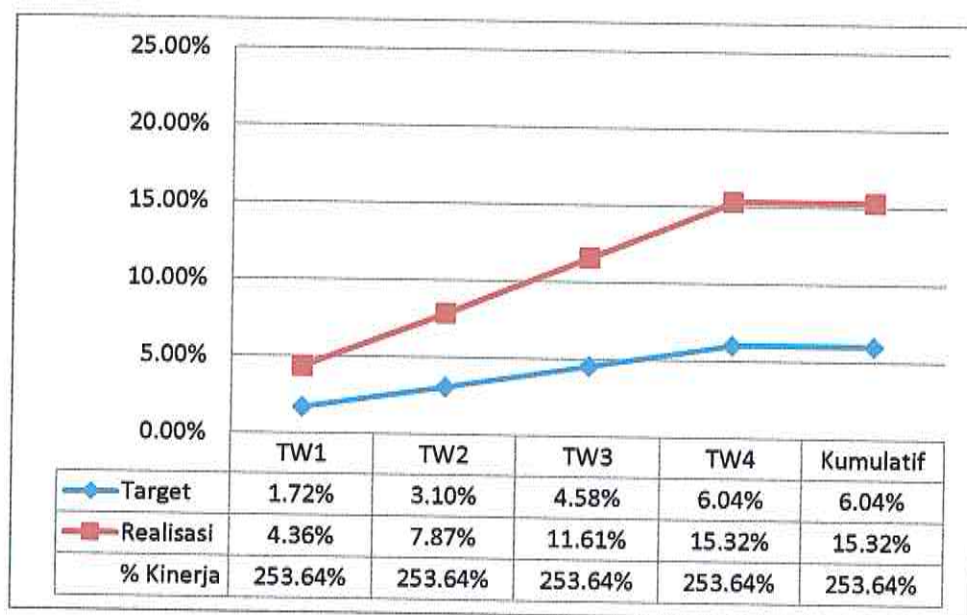
Gambar III.8
Capaian Kinerja Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan Tahun 2017

3. IKP 9 yaitu Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

Realisasi Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 15,32% (3,817 Juta ton CO₂e) atau capaian kinerja sebesar 253,64% dari target yang ditetapkan sebesar 6,04% (3,51 Juta ton CO₂e). Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.9 dan Gambar III.9

Tabel III.9
Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	6,04	4,36	7,87	11,61	15,32	15,32	253,64 %



Gambar III.9
Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017

III.2.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Kelima

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kelima adalah **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**, yang diukur dengan 2 IKP yaitu :

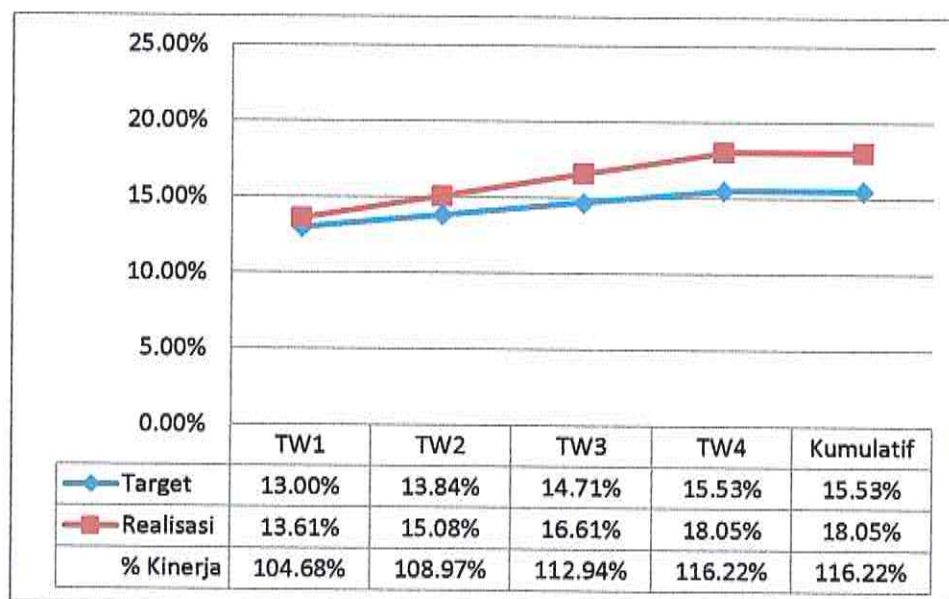
1. IKP 10 yaitu Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

Realisasi Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis Tahun 2017 mencapai 18,05% atau capaian kinerja sebesar 116,23% dari target yang ditetapkan sebesar 15,53%. Analisis capaian & realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.10 dan Gambar III. 10

Tabel III.10

Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penyediaan Tempat Duduk Kereta Api PSO dan Perintis Tahun 2017

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	15,53	13,61	15,08	16,61	18,05	18,05	116,23



Gambar III.10

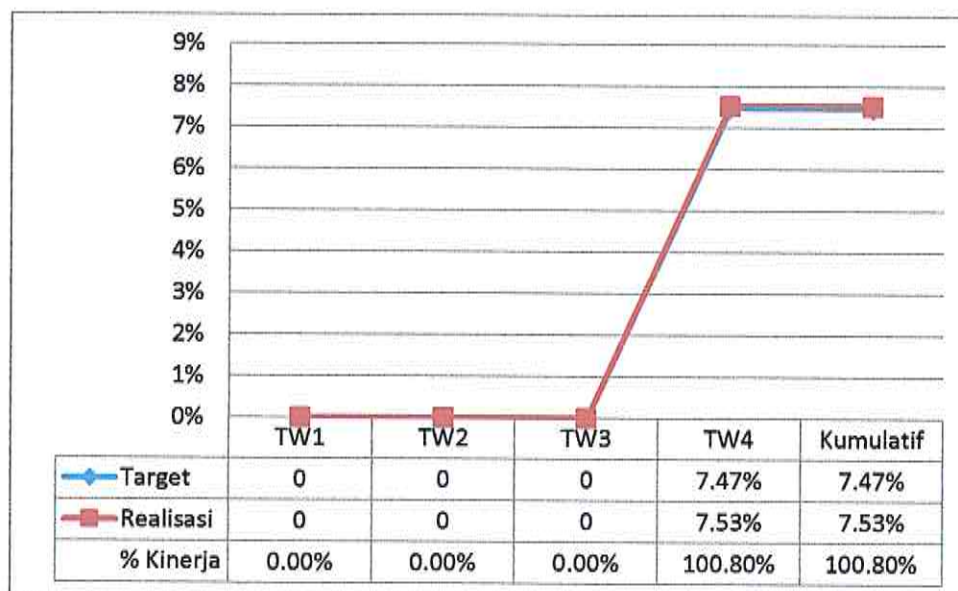
Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penyediaan Tempat Duduk Kereta Api PSO dan Perintis Tahun 2017

III.2.1.6. IKP 11 yaitu Capaian Indikator Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

Realisasi Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017 sebesar 7,53% atau capaian sebesar 100,80% dari target yang ditetapkan sebesar 7,47% Km'sp. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.11 dan Gambar III.11

Tabel III.11
Capaian Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	7,47	-	-	-	7,53	7,53	100,80



Gambar III.11
Capaian Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017

III.2.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Keenam

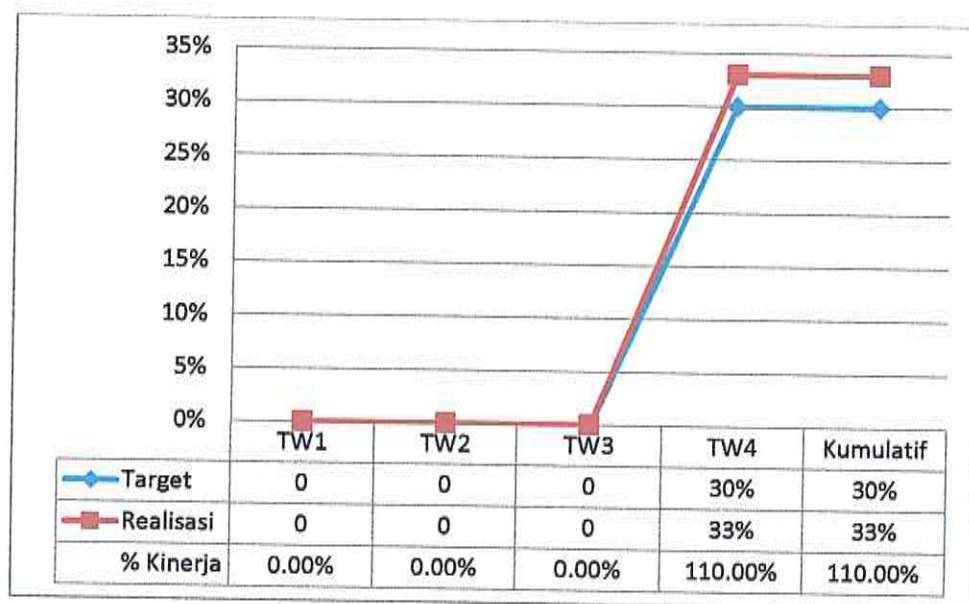
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang keenam adalah **Sasaran Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**, yang diukur dengan IKP 12 yaitu Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian.

Pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 33% atau capaian kinerja mencapai 110% dari target yang telah ditetapkan sebesar 30%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.12 dan Gambar III.12

Tabel III.12

Capaian Kinerja Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	30	-	-	-	33	33	110



Gambar III.12

Capaian Kinerja Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017

III.2.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Ketujuh

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ketujuh adalah **Sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema Pendanaan Alternatif**, yang diukur dengan IKP 13 yaitu Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif.

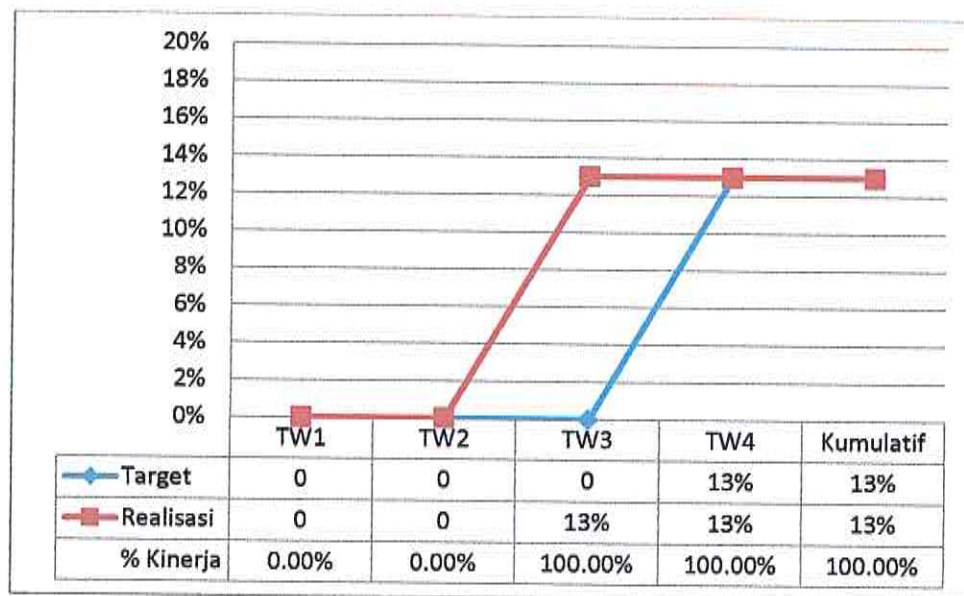
Realisasi Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif Tahun 2017 sebesar 13% (2 dokumen) atau capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 13% (2 dokumen).

Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.13 dan Gambar III.13

Tabel III.13

Capaian Kinerja Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif tahun 2017

Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	13	-	-	-	13	13	100

**Gambar III.13**

Capaian Kinerja Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif tahun 2017

III.2.1.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Kedelapan

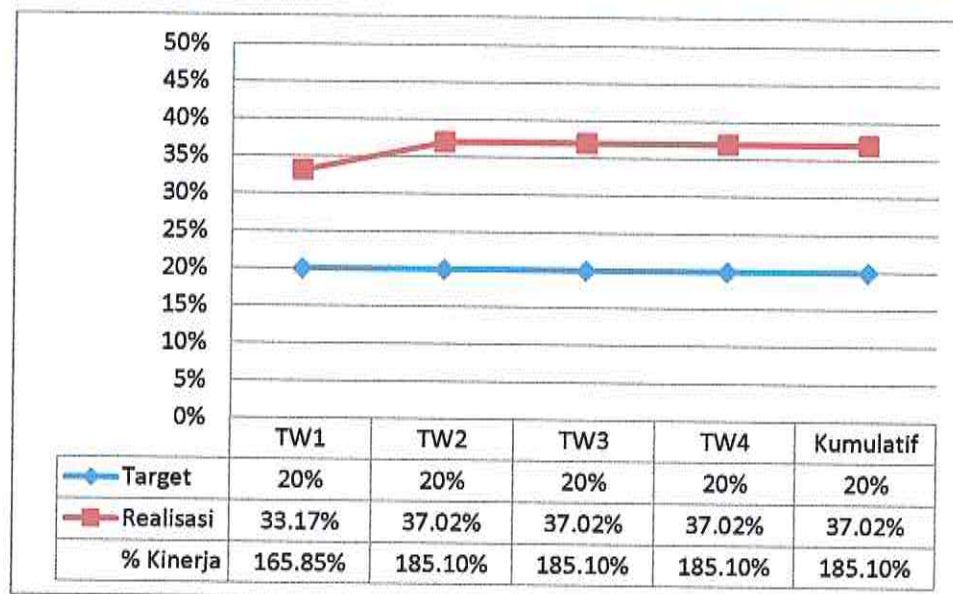
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedelapan adalah **Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional**, yang diukur dengan IKP 14 yaitu **Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis**

Realisasi Indikator Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017 sebesar 37,02% atau capaian sebesar 185,10% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.14 dan Gambar III.14

Tabel III.14

Capaian Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	20	33,17	37,02	37,02	37,02	37,02	185,10



Gambar III.14

Capaian Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017

III.2.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pada Sasaran Kesembilan

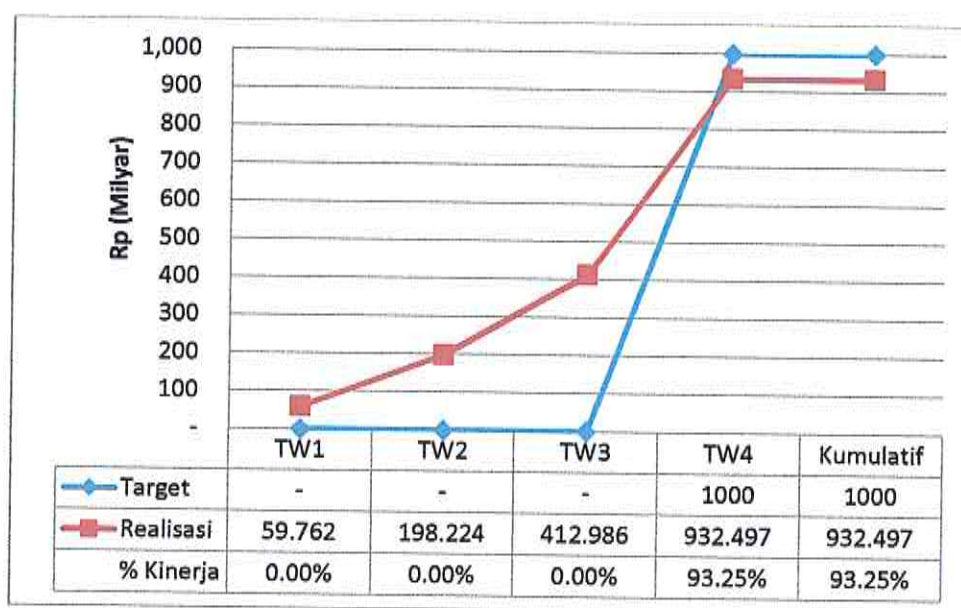
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedelapan adalah Sasaran Mewujudkan Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Ditjen Perkeretaapian, yang diukur dengan IKP yaitu :

1. IKP 15 yaitu Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017 sebesar Rp. 932,497 Milyar atau capai sebesar 93,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000 Milyar. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.15 dan Gambar III.15

Tabel III.15
Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp.	1.000	59,76	198,22	412,98	932,50	932,50	93,25



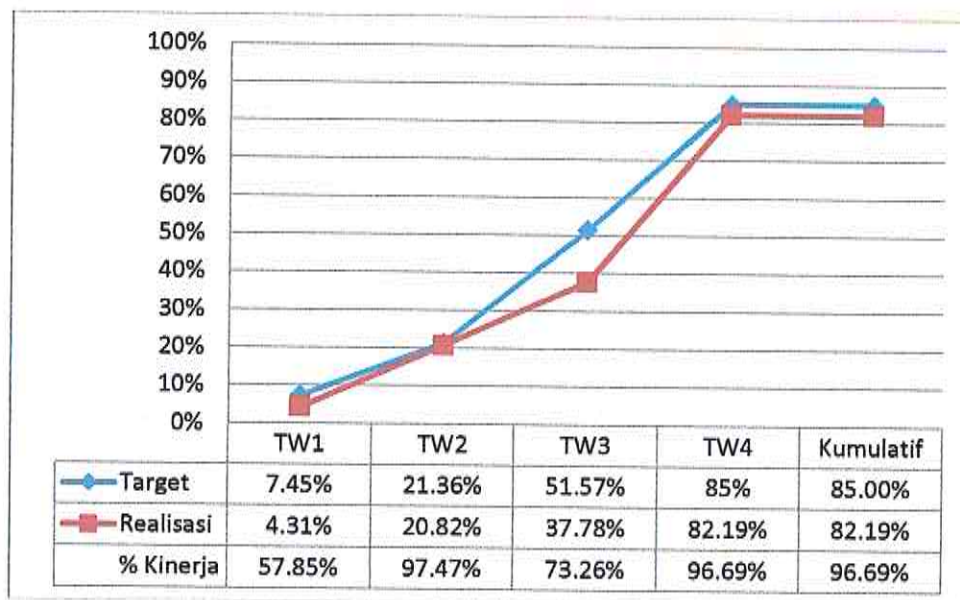
Gambar III.15
Capaian Kinerja Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

2. IKP 16 yaitu Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 82,19 % atau capaian sebesar 96,69% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.16 dan Gambar III.16

Tabel III.16
Capaian Kinerja Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	85	4,31	20,82	37,78	82,19	82,19	96,69



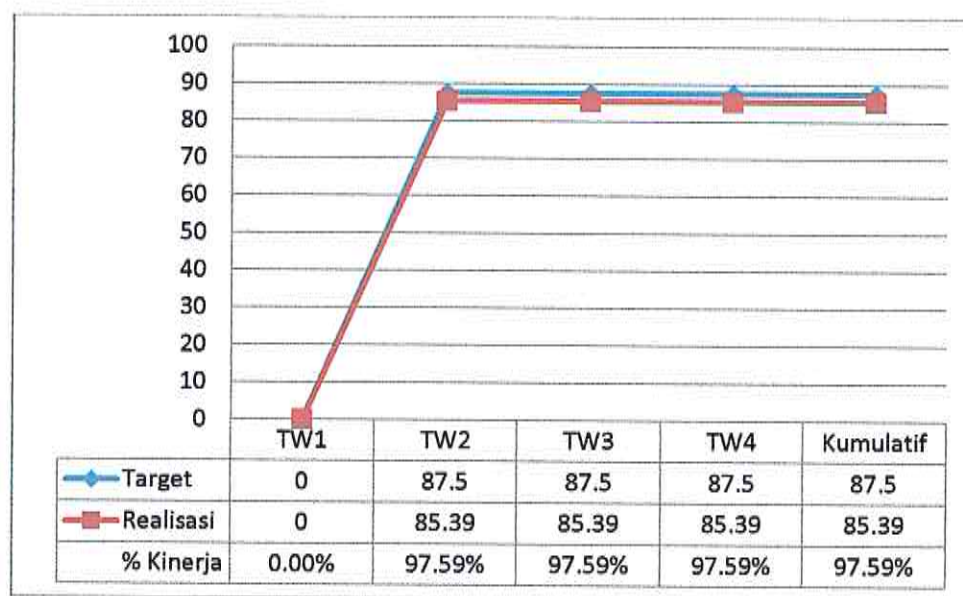
Gambar III.16
Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

3. IKP 17 yaitu Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 85,39 atau capaian sebesar 97,59% dari target yang ditetapkan sebesar 87,50. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.17 dan Gambar III.17

Tabel III.17
Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	87,50	-	85,39	85,39	85,39	85,39	97,59



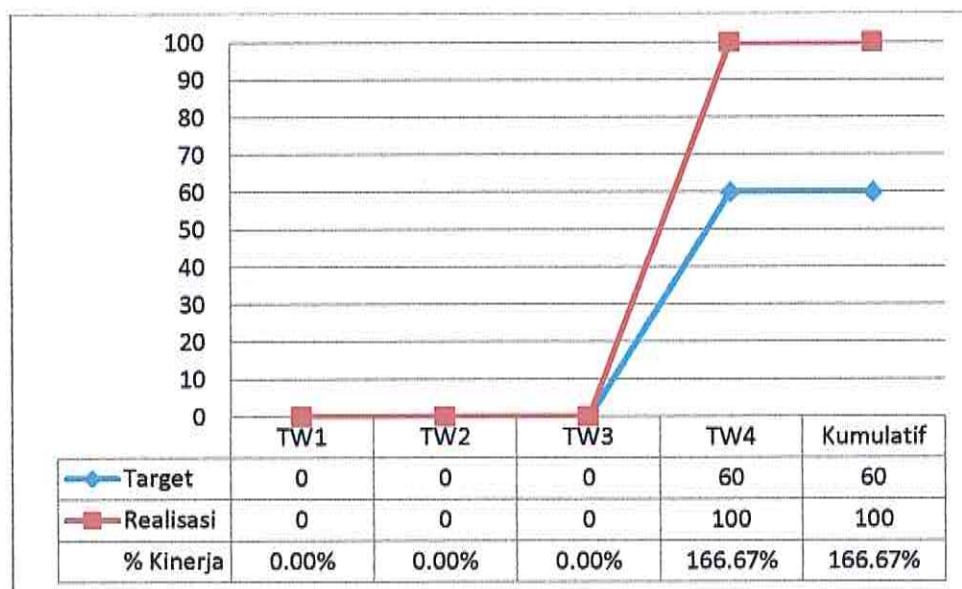
Gambar III.17
Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

4. IKP 18 yaitu Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Realisasi tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 yaitu pada Level 3 (100%) atau capaian kinerja sebesar 166,67% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu pada Level 2 (60%). Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.18 dan Gambar III.18

Tabel III.18
Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	60 Level 2	-	-	-	100 Level 3	100 Level 3	166,67



Gambar III.18
Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

III.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017

Adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan yang dilegalkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan kementerian Perhubungan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja yang semula berbasis *Output* menjadi berbasis *Outcome* tentunya IKP tidak dapat dibandingkan secara presisi dengan tahun sebelumnya namun perbandingan dilakukan dengan mengacu pada persamaan sasaran.

Pada Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat sasaran dan Indikator Kinerja Program baru yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan tahun 2019.

Rincian capaian dapat dilihat pada **Lampiran D**

III.2.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Pertama

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang pertama adalah **Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional**, merupakan sasaran baru dengan IKP yang tidak diukur dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Sasaran ini merupakan *stakeholder perspective*, yang merupakan sasaran utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2017 sebesar 89,29% atau realisasi sebesar 0,25 dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,28.

Rincian capaian dapat dilihat pada **Lampiran D**

III.2.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Kedua

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang kedua adalah **Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah**, merupakan sasaran baru dengan IKP yang tidak diukur dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2017 IKP yang diukur yaitu :

1. Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api

Realisasi *Modal share* angkutan penumpang kereta api pada tahun 2017 sebesar 5,03% atau capaian kinerja sebesar 125,87% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 4%.

2. Modal Share Angkutan Barang Kereta Api

Realisasi *Modal share* angkutan barang kereta api pada tahun 2017 sebesar 0,23%, atau capaian kinerja sebesar 113,32% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,20 %.

Rincian capaian dapat dilihat pada **Lampiran D**

III.2.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Ketiga

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang ketiga adalah **Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api**, yang memiliki inti yang sama dengan sasaran pertama dan kedua Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, yaitu Menurunnya angka kecelakaan transportasi dan Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi. Namun demikian, tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena memiliki indikator kinerja program yang berbeda dan satuan yang berbeda pula.

Pada tahun 2017, IKP yang diukur yaitu :

1. Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)

Capaian Kinerja Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada tahun 2017 sebesar 152,73% atau realisasi sebesar 0,26 Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh dari target yang ditetapkan sebesar 0,55 Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh.

2. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Capaian Kinerja Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 138,41% atau realisasi sebesar 6,59 Kejadian gangguan/ 1 juta km dari target yang ditetapkan sebesar 10,7 Kejadian gangguan/ 1 juta km.

3. Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM Operator)

Capaian Kinerja Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana dan SDM Operator Perkeretaapian) tahun 2017 sebesar 325,47% atau realisasi sebesar 97,64 % dari target yang ditetapkan sebesar 30 %.

Sedangkan pada tahun 2015-2016, IKP yang diukur pada sasaran pertama ada 4 (tiga), yaitu :

- a. Ratio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional (Ratio kecelakaan/1 juta km);
- b. Jumlah Pedoman Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi (dokumen);
- c. Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Unit), dan
- d. Jumlah sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian (Sertifikat).

IKP yang diukur pada sasaran kedua tahun 2015-2016 adalah jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi (jumlah kejadian/tahun).

Rincian perbandingan sasaran ini dapat dilihat sebagaimana **Lampiran D**

III.2.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Keempat

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang keempat sama dengan sasaran ketiga Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 adalah **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**, Namun demikian, tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena memiliki indikator kinerja program yang berbeda dan satuan yang berbeda pula.

Pada tahun 2017, IKP yang diukur adalah:

1. Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

Capaian kinerja Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 101,62% atau realisasi sebesar 66,05% dari target yang ditetapkan pada sebesar 65%.

2. Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

Capaian Kinerja prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan pada tahun 2017 sebesar 20% atau realisasi sebesar 20% (6 kota) dari target yang ditetapkan sebesar 20% (6 Kota).

3. Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

Capaian kinerja Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian sebesar 253,64% atau realisasi sebesar 15,32% (3,817 Juta ton CO₂e) dari target yang ditetapkan sebesar 6,04% (3,51 Juta ton CO₂e).

Sedangkan pada tahun 2015-2016, IKP yang diukur ada 3 (tiga), yaitu:

1. Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi (dokumen);
2. Pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara (IMO);
3. Jumlah Penumpang KA PSO.

Rincian perbandingan sasaran ini dapat dilihat sebagaimana **Lampiran D**

III.2.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Kelima

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang kelima adalah **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**, memiliki kesamaan sasaran keenam dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yaitu Meningkatnya kapasitas sarana dan prasana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi *backlog* maupun *bottleneck* kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antar moda dan antar pulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, kedua sasaran ini tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena memiliki indikator kinerja program yang berbeda dan satuan yang berbeda pula.

Pada tahun 2017, IKP yang diukur adalah:

1. Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

capaian kinerja Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis Tahun 2017 sebesar 116,23% atau realisasi sebesar 18,05% dari target yang ditetapkan sebesar 15,53%.

2. Capaian Indikator Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

Capaian Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017 sebesar 100,80% atau realisasi sebesar 7,53% dari target yang ditetapkan sebesar 7,47% Km'sp.

Sedangkan pada tahun 2015-2016, IKP yang diukur adalah :

1. Peningkatan kapasitas prasana (terbangunnya jalur kereta api Km'sp)
2. Peningkatan kapasitas sarana (Jumlah sarana kereta api); dan
3. Terselenggaranya proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian (proyek).

Rincian perbandingan sasaran ini dapat dilihat sebagaimana **Lampiran D**

III.2.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Keenam

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang keenam adalah **Sasaran Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**, merupakan sasaran baru dengan IKP yang tidak diukur dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2017 IKP yang diukur yaitu Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian, dimana capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 110% atau realisasi sebesar 33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 30%.

Rincian capaian dapat dilihat pada **Lampiran D**

III.2.2.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Ketujuh

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang ketujuh adalah **Sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema Pendanaan Alternatif**, merupakan sasaran baru dengan IKP yang tidak diukur dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2017 IKP yang diukur yaitu Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif, dimana Capaian Kinerja tahun 2017 sebesar 100% atau realisasi sebesar 13% (2 dokumen) dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 13% (2 dokumen).

Rincian capaian dapat dilihat pada **Lampiran D**

III.2.2.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Kedelapan

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang kedelapan adalah **Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional**, merupakan sasaran baru dengan IKP yang tidak diukur dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2017 IKP yang diukur yaitu Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis, dimana Capaian Kinerja Tahun 2017 sebesar 185,10% atau realisasi sebesar 37,02% dari target yang ditetapkan sebesar 20%.

Rincian capaian dapat dilihat pada **Lampiran D**

III.2.2.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017 Pada Sasaran Kesembilan

Sasaran Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yang kesembilan adalah Sasaran Mewujudkan Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Ditjen Perkeretaapian, memiliki kesamaan sasaran keempat dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2019 yaitu Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan *Good Governance*. Namun demikian, tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena memiliki indikator kinerja program yang berbeda dan satuan yang berbeda pula.

Pada tahun 2017, IKP yang diukur adalah:

1. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Capaian Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 93,25% atau realisasi sebesar Rp. 932,497 Milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000 Milyar.

2. Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

Capaian Kinerja Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 96,69% atau realisasi sebesar 82,19 % dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

3. Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 97,59% atau realisasi sebesar 85,39 dari target yang ditetapkan sebesar 87,50.

4. Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Capaian kinerja tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 166,67% atau realisasi pada Level 3 (100%) dari target yang ditetapkan yaitu pada Level 2 (60%).

Sedangkan pada tahun 2015-2016, IKP yang diukur adalah Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian

Rincian capaian dapat dilihat pada **Lampiran D**

III.2. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019

Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk tahun 2017 telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019, namun akhir pada Triwulan IV Tahun 2017 dilakukan Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2017, yang juga memuat penyempurnaan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dari yang bersifat *output* menjadi *outcome*. Dalam Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019, memuat IKP yang disempurnakan dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Pada pelaksanaannya, ada yang tidak mencapai target, mencapai target, bahkan melebihi target.

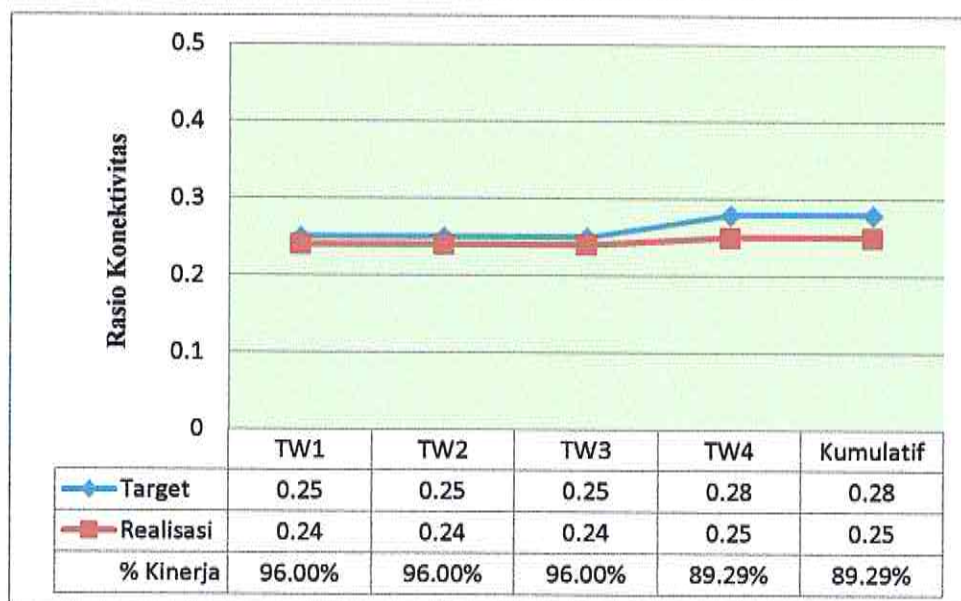
III.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Pertama

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang pertama adalah Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional, yang diukur dengan IKP 1 yaitu **Rasio Konektivitas Antar Wilayah** diukur dengan rasio konektivitas antar wilayah *baseline* tahun 2014 sebesar 0,18 dimana jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA adalah sebanyak 20 lokasi dan ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 0,37 atau sebanyak 42 lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA.

Untuk tahun 2017 Rasio konektivitas antar Wilayah diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung oleh jalur kereta api pada tahun 2017 dengan rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Formulasi untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah yaitu :

$$\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA Sesuai RIPNas}}$$

Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah pada Tahun 2017 sebesar 0,25 atau Capaian Kinerja sebesar 89,29% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,28. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat Gambar III.19



Gambar III.19
Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio konektivitas antar Wilayah

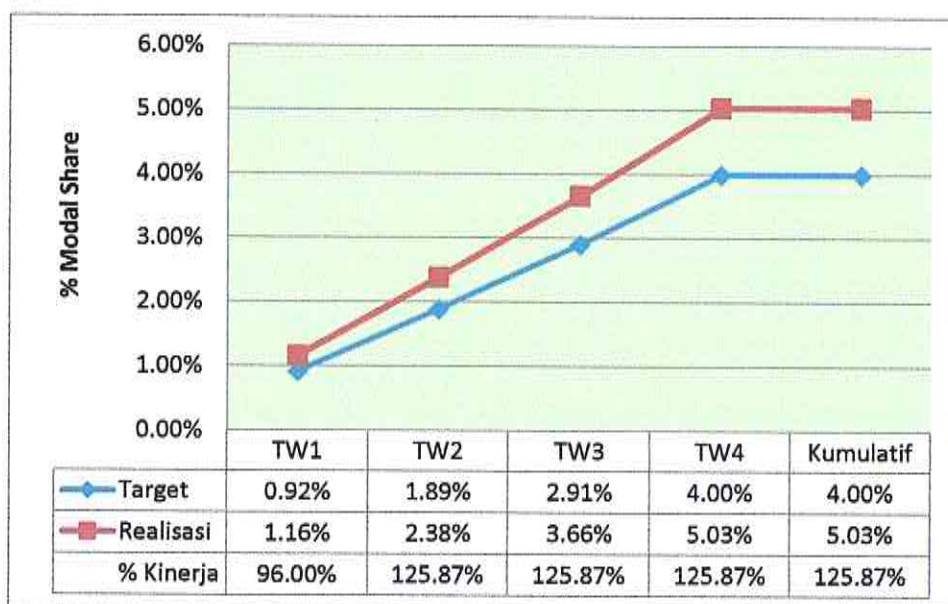
III.2.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Kedua

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedua adalah **Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah**, yang diukur dengan 2 IKP yaitu :

1. IKP 2 yaitu *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api

Modal share angkutan penumpang kereta api diukur melalui persentase antara jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang moda lain secara nasional.

Realisasi *Modal share* angkutan penumpang kereta api pada tahun 2017 sebesar 5,03%, atau capaian kinerja sebesar 125,87% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 4%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Gambar III.20

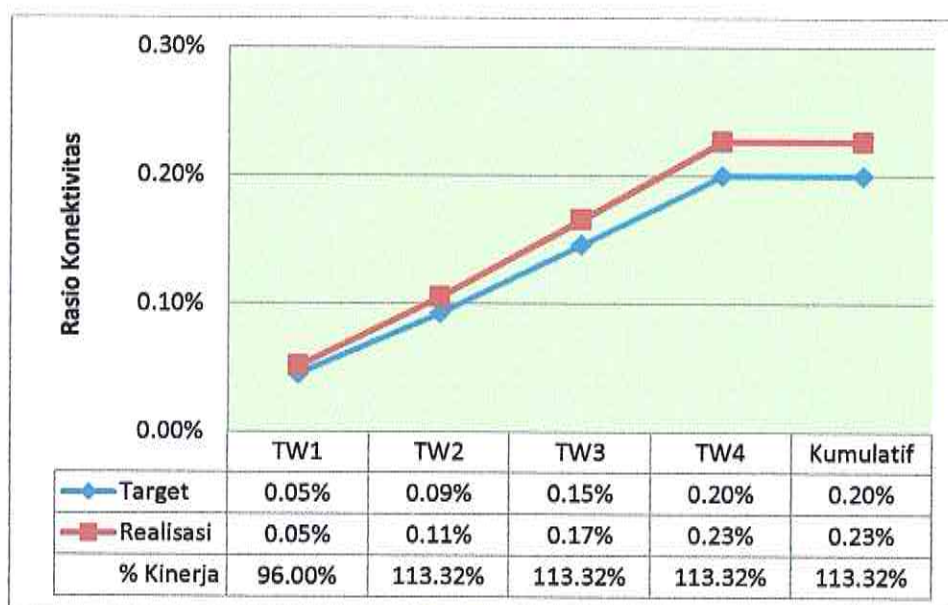


Gambar III.20
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api
Tahun 2017

2. IKP 3 yaitu *Modal Share* Angkutan Barang Kereta Api

Modal share angkutan barang kereta api diukur dengan persentase antara jumlah angkutan barang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan barang moda lain secara nasional.

Realisasi *Modal share* angkutan barang kereta api pada tahun 2017 sebesar 0,23%, atau capaian kinerja sebesar 113,32% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,2%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Gambar III.21



Gambar III.21
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api
Tahun 2017

III.2.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Ketiga

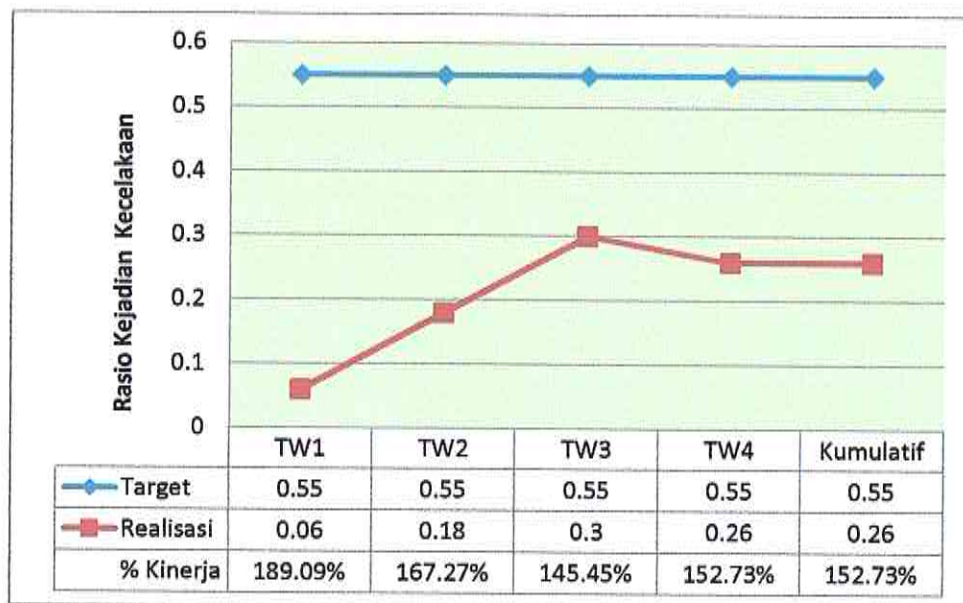
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ketiga adalah **Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 4 yaitu Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)

Capaian Indikator Kinerja Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada tahun 2017 sebesar 152,73%. Pada Tahun 2017 telah terjadi 17 kali kejadian kecelakaan perkeretaapian dengan menggunakan perhitungan *Rate of Accident* (RoA) yang merupakan Salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu :

$$\text{Rate of Accident} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km dan realisasi pada Tahun 2017 sebesar 0,26 Ratio kecelakaan/ 1 juta km atau capaian kinerja sebesar 152,73%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Gambar III.22



Gambar III.22

Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*rate of accident*) Tahun 2017

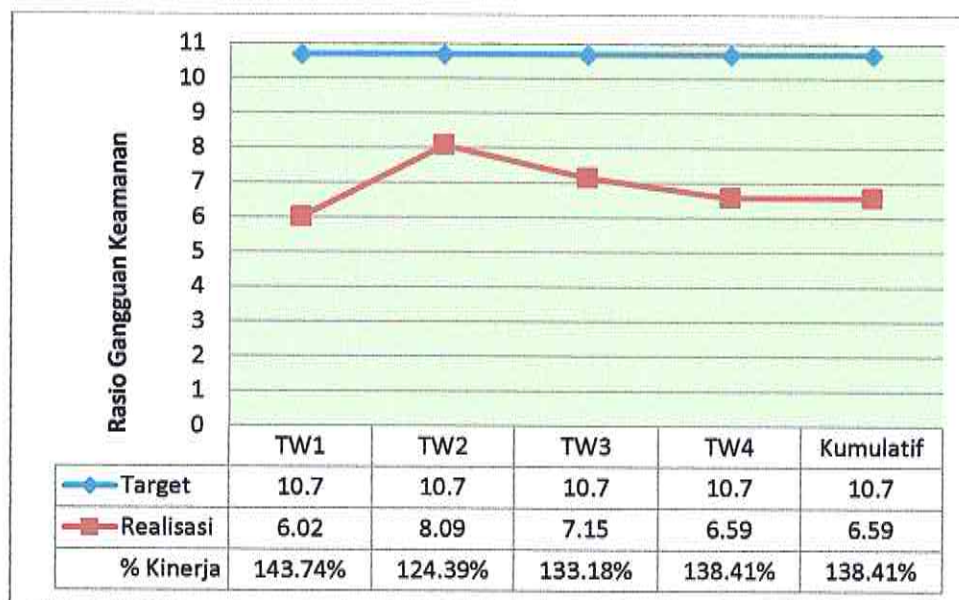
2. IKP 5 yaitu Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Pengukuran dan evaluasi terhadap Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api merupakan upaya Pemerintah dalam penyediaan transportasi kereta api yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api diperoleh dari hasil analisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah gangguan keamanan perkeretaapian dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu :

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan} = \frac{\text{Jml Kejadian Gangguan Keamanan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Realisasi Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 6,59 Ratio gangguan keamanan / 1 juta km atau Capaian sebesar 138,41% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 10,7 Ratio gangguan keamanan/ 1 juta km. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Gambar III.23



Gambar III.23

Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017

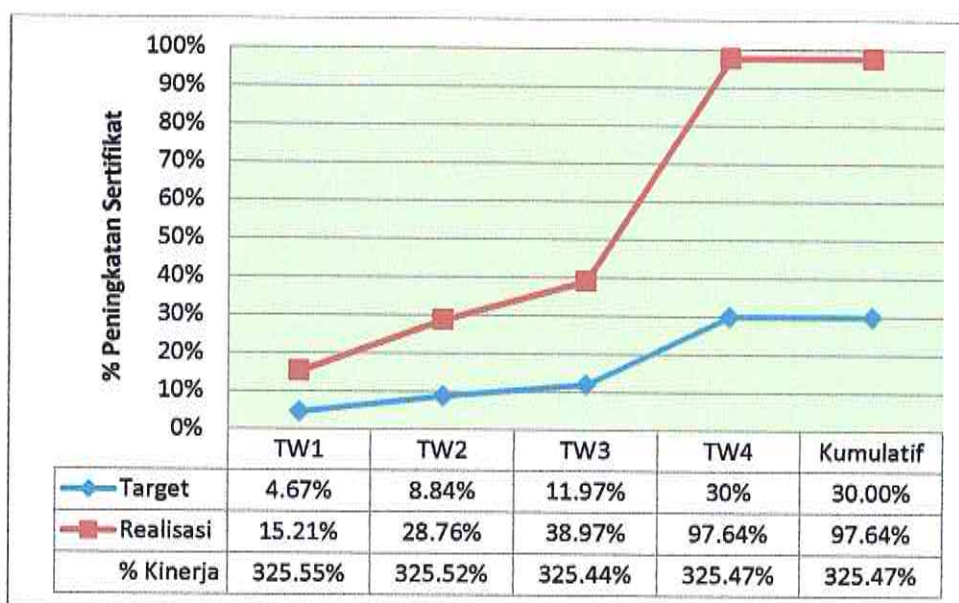
3. IKP 6 yaitu Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian diukur melalui persentase perbandingan jumlah penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana dan SDM Operator Perkeretaapian) tahun berjalan dengan target penerbitan sertifikat perkeretaapian sampai dengan tahun 2019, dimana total target penerbitan sertifikat perkeretaapian sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10.384 sertifikat.

Penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM) Tahun 2017 sebanyak 10.139 sertifikat atau Capaian Kinerja sebesar 325,47% dari target yang ditetapkan sebanyak 3.115 sertifikat atau 30% dari total target sertifikasi sampai dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2017 telah diterbitkan sertifikat perkeretaapian sebanyak 10.139 sertifikat terdiri dari :

- a) Sertifikat SDM Operator Perkeretaapian sebanyak 6.146 sertifikat
- b) Sertifikat Sarana Perkeretaapian sebanyak 3.533 sertifikat
- c) Sertifikat Prasarana Perkeretaapian sebanyak 460 sertifikat

Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Gambar III.24



Gambar III.24

Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017

III.2.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Keempat

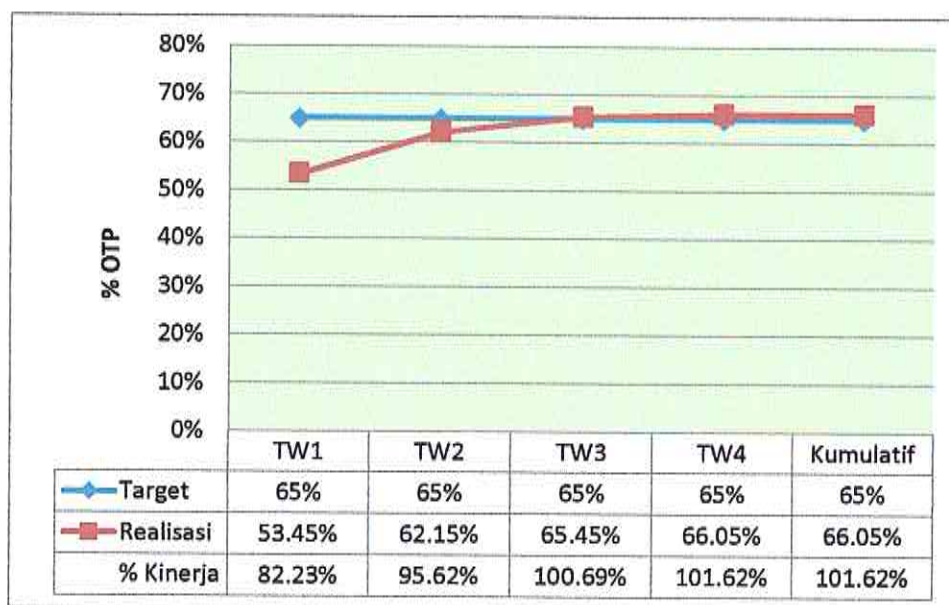
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang keempat adalah **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 7 yaitu Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

On time performance (OTP) atau ketepatan waktu pelayanan transportasi kereta api yang diukur dalam hal ini adalah ketepatan waktu kedatangan untuk seluruh perjalanan kereta api penumpang.

Prosentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api diperoleh dengan cara membandingkan Persentase capaian (OTP) angkutan penumpang kereta api pada tahun berjalan dengan target OTP.

Realisasi Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 66,05% atau capaian kinerja sebesar 101,62% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 65%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel Gambar III.25



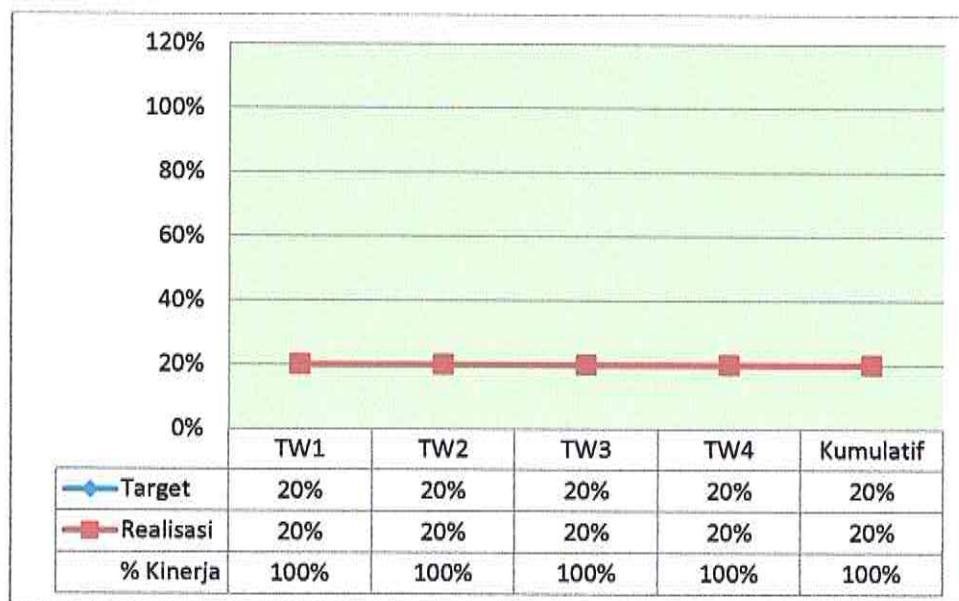
Gambar III.25

Capaian Kinerja Prosentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api
Kereta Api Tahun 2017

2. IKP 8 yaitu Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan diukur melalui persentase peningkatan antara jumlah kota yang terlayani angkutan kereta api perkotaan pada tahun berjalan dibanding dengan jumlah kota yang terlayani angkutan kereta api pada tahun 2016 sebanyak 5 kota

Realisasi prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan pada tahun 2017 sebesar 20% (6 kota) atau Capaian Kinerja sebesar 20% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 20% (6 Kota). Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Gambar III.26



Gambar III.26

Capaian Kinerja Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan Tahun 2017

3. IKP 9 yaitu Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian diukur melalui persentase peningkatan penurunan gas rumah kaca pada tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sebanyak 3,31 Juta ton CO₂e. Dimana pada tahun 2017 target penurunan gas rumah kaca sebesar 3,51 Juta ton CO₂e sehingga diperoleh target

prosentase peningkatan penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian pada tahun 2017 sebesar 6,04%.

Metode perhitungan yang dilakukan untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sub sektor Kereta Api yaitu :

a. Rumus

$$\Delta E = E_{KBM} - E_{KA}$$

dimana, ΔE = Indikasi pengurangan emisi kendaraan bermotor oleh KA (kg/thn)

E_{KBM} = Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA (kg/thn)

E_{KA} = Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn)

$$K_{BBM} = \ell_{BBM} \times p \times q$$

dimana, K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

ℓ_{BBM} = Konsumsi bahan bakar spesifik (ltr/km/pnp)

p = Panjang rata-rata perjalanan (km)

q = Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute tersebut (org/thn)

$$E_{co2} = K_{BBM} \times e_{co2}$$

dimana, E_{co2} = Jumlah emisi CO2 (kg/thn)

K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

e_{co2} = Tingkat emisi bahan bakar (kg/ltr)

b. Koefisien

- Tingkat emisi bahan bakar (Sumber: Studi Kebutuhan Energi Sub Sektor Perkeretaapian, 2009)

$$e_{co2} \text{ Solar} = 2,6664 \text{ kg/ltr}$$

$$e_{co2} \text{ Premium} = 2,2606 \text{ kg/ltr}$$

$$e_{co2} \text{ BBG} = 1,4659 \text{ kg/ltr}$$

- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan penumpang (Sumber: Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS,2010)

$$\ell_{BBM \text{ KA}} = 0,002 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{BBM \text{ BUS}} = 0,0125 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{\text{BBM Mobil}} = 0,020 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{\text{BBM Spd Mtr}} = 0,025 \text{ ltr/pnp/km}$$

- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan barang (Sumber: Studi Pengembangan Transportasi KA yang efisien dan ramah lingkungan, 2010)

$$\ell_{\text{BBM KA}} = 0,00032 \text{ ltr/ton/km}$$

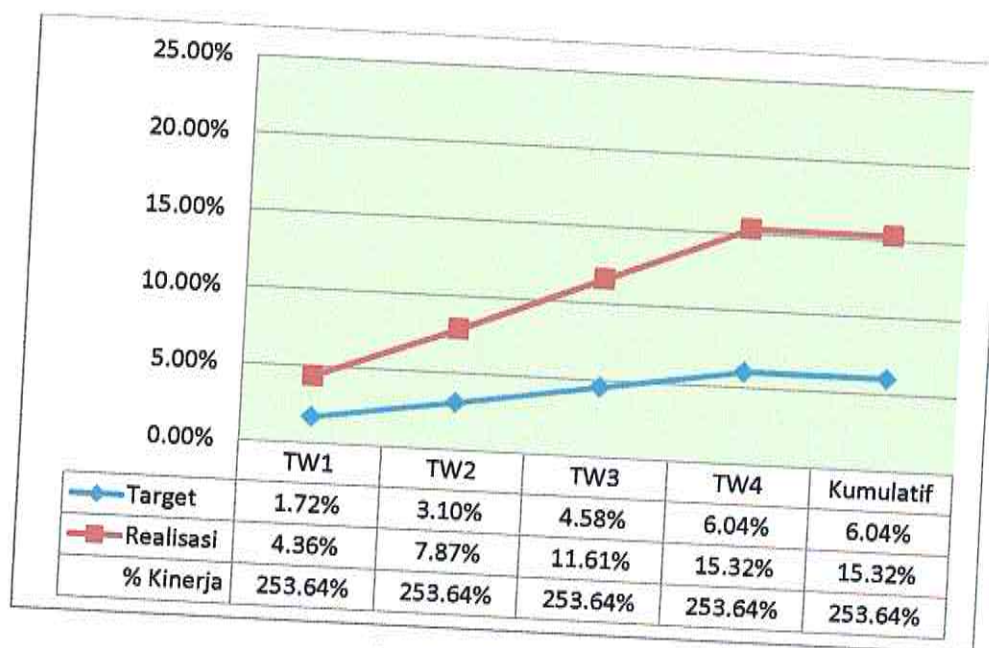
$$\ell_{\text{BBM TRUCK}} = 0,018 \text{ ltr/ton/km}$$

c. Asumsi

- 1) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) dihitung dengan mengalikan prediksi jumlah penumpang tahunan dengan *load factor* sebesar 0,7. *Load factor* sebesar 0,7 diperoleh dari Studi Perhitungan Load Factor Kereta Api Ekonomi Nasional (2009) yang menggambarkan tingkat okupansi penumpang sebesar 70%;
- 2) Panjang rata-rata perjalanan (p) diperoleh dengan mengalikan panjang lintasan dengan 0,5. Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut;
- 3) Proporsi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4.

Metode tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Metode tersebut diatas diperoleh Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 15,32% (3,817 Juta ton CO₂e) atau capaian kinerja sebesar 253,64% dari target yang ditetapkan sebesar 6,04% (3,51 Juta ton CO₂e). Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.27



Gambar III.27
Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017

III.2.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Kelima

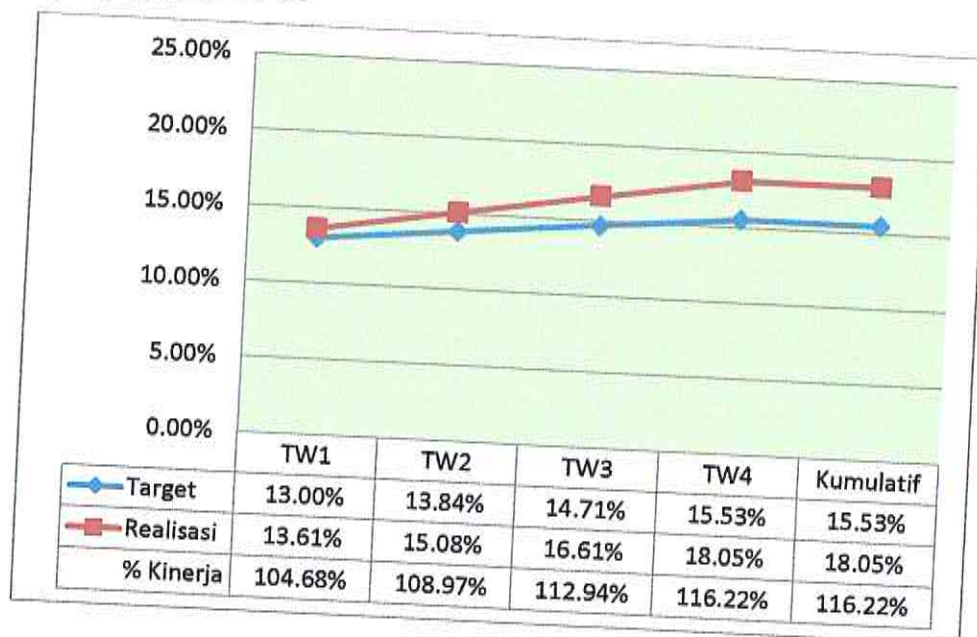
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kelima adalah **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**, yang diukur dengan 2 IKP yaitu :

1. IKP 10 yaitu Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis diukur melalui persentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis pada tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sebanyak 294.839.165 penumpang. Dimana pada tahun 2017 target penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis sebanyak 340.624.392 penumpang sehingga diperoleh target prosentase penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis pada tahun 2017 sebesar 15,34%.

Realisasi Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis Tahun 2017 mencapai 18,05% atau capaian kinerja sebesar 116,23% dari target yang

ditetapkan sebesar 15,53%. Analisis capaian & realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III. 28



Gambar III.28

Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017

Rincian Realisasi penyediaan tempat duduk kereta api PSO terdiri dari KA Penumpang (Jarak Jauh, Jarak dekat, Jarak sedang, KRD Ekonomi dan KA Ekonomi lebar), KRL Jabodetabek dan KA Perintis, dengan rincian jumlah penumpang sebagai berikut :

Tabel III.19

Realisasi Penumpang KA PSO Tahun 2017

Jenis KA	Realisasi Jumlah Penumpang Tahun 2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	*)Triwulan IV
KA Ekonomi Jarak Jauh	1.369.073	1.431.735	1.527.152	1.289.438
KA Ekonomi Jarak Sedang	1.297.858	1.319.442	1.434.645	1.190.271
KA Ekonomi Jarak Dekat	7.616.441	6.150.674	5.776.719	5.530.545
KRD Ekonomi	1.517.574	1.597.067	1.694.727	1.521.199
KA Ekonomi Lebaran	-	59.850	16.975	-
TOTAL	11.800.946	10.558.768	10.450.218	9.531.453

Tabel III.20

Realisasi Penumpang KRL Jabodetabek Tahun 2017

Jenis KA	Realisasi Jumlah Penumpang Tahun 2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	*)Triwulan IV
KRL Jabodetabek	71.364.341	76.870.800	80.467.588	75.554.184
TOTAL	71.364.341	76.870.800	80.467.588	75.554.184

Tabel III.21

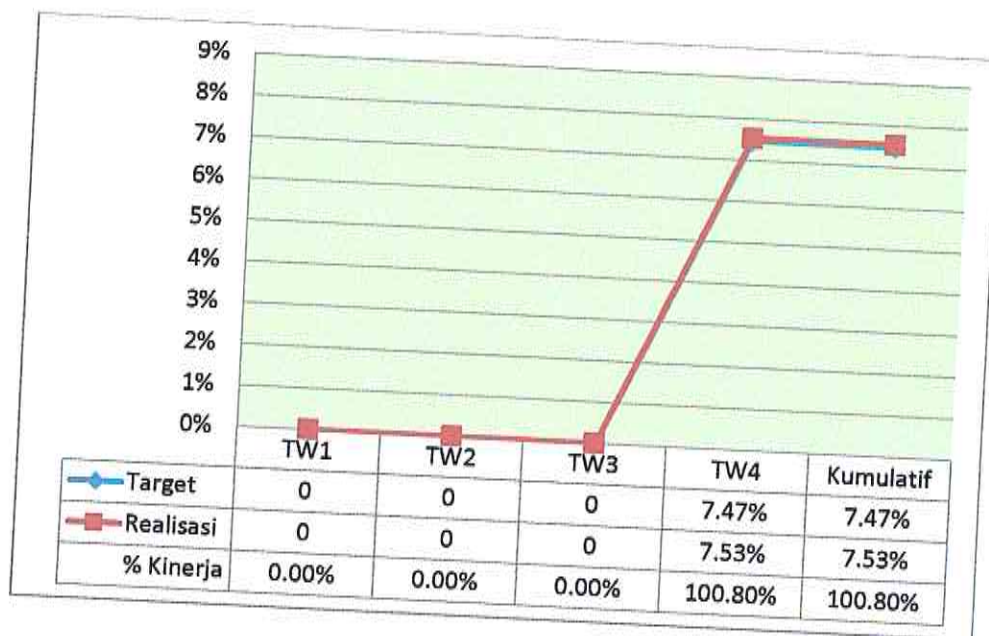
Realisasi Penumpang KA Perintis Tahun 2017

Nama KA	Realisasi Jumlah Penumpang Tahun 2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Cut Meutia	22.118	14.477	9.846	8.698
Lembah Anai	10.814	14.968	12.225	6.634
Kertalaya	9.695	7.829	6.866	8.578
Siliwangi	181.390	201.285	180.693	203.849
Bathara Kresna	28.232	17.935	15.313	18.540
Jenggala	153.270	118.168	107.787	157.837
TOTAL	405.519	374.662	332.730	404.136

2. IKP 11 yaitu Capaian Indikator Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun diukur melalui persentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun pada tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sepanjang 5.196 Km'sp. Dimana pada tahun 2017 target panjang jalur kereta api yang terbangun sepanjang 5.584,2 Km'sp sehingga diperoleh target prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun pada tahun 2017 sebesar 7,47%.

Realisasi Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017 sebesar 7,53% atau capaian sebesar 100,80% dari target yang ditetapkan sebesar 7,47% Km'sp. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.29

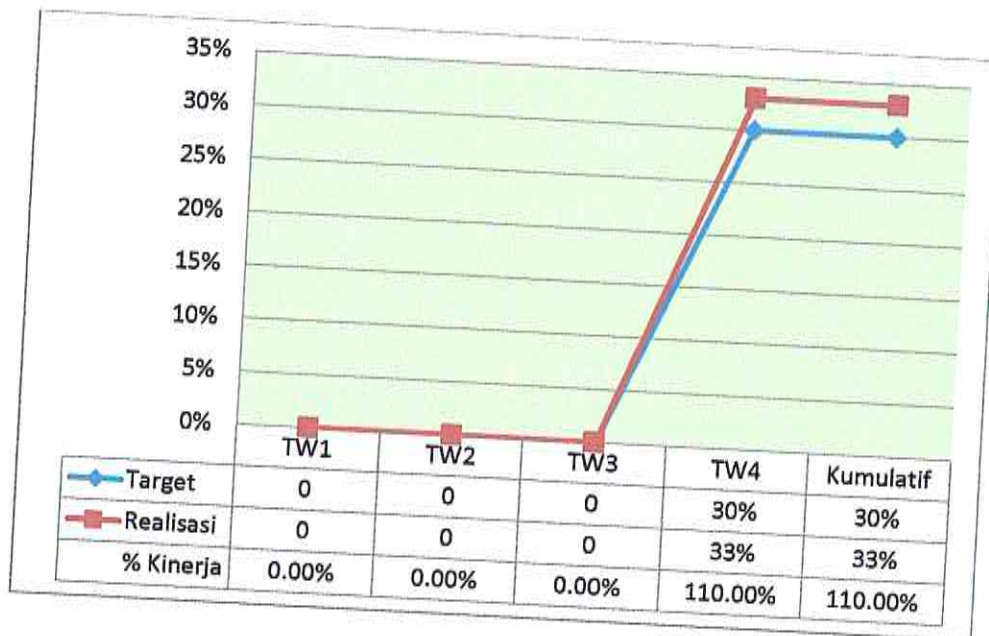


Gambar III.29
Capaian Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017

III.2.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Keenam

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang keenam adalah **Sasaran Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**, yang diukur dengan IKP 12 yaitu Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian.

Pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 33% atau capaian kinerja mencapai 110% dari target yang telah ditetapkan sebesar 30%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.30



Gambar III.30
Capaian Kinerja Prosentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian Tahun 2017

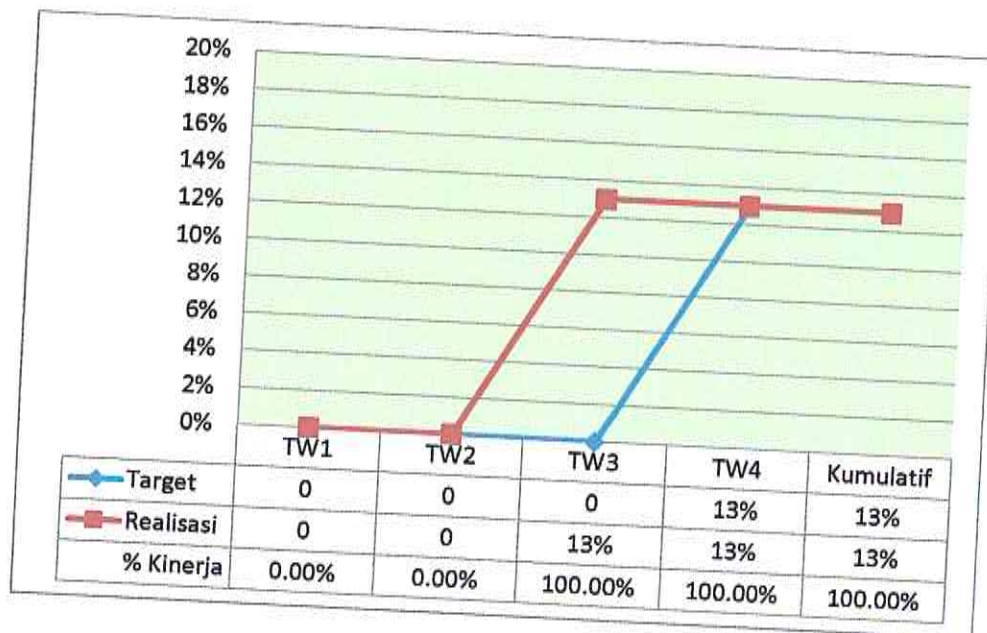
III.2.3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Ketujuh

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ketujuh adalah **Sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema Pendanaan Alternatif**, yang diukur dengan IKP 13 yaitu Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif.

Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif diukur melalui persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif.

Realisasi Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif Tahun 2017 sebesar 13% (2 dokumen) atau capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 13% (2 dokumen).

Dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) yang tersedia pada tahun 2017 sebanyak 2 dokumen yaitu untuk proyek KA Angkutan Batu Bara lintas Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung dan KA Angkutan Batu Bara lintas Tanjung Enim-Tanjung Api. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.31



Gambar III.31
Capaian Kinerja Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif tahun 2017

III.2.3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Kedelapan

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedelapan adalah **Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional**, yang diukur dengan IKP 14 yaitu **Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis**

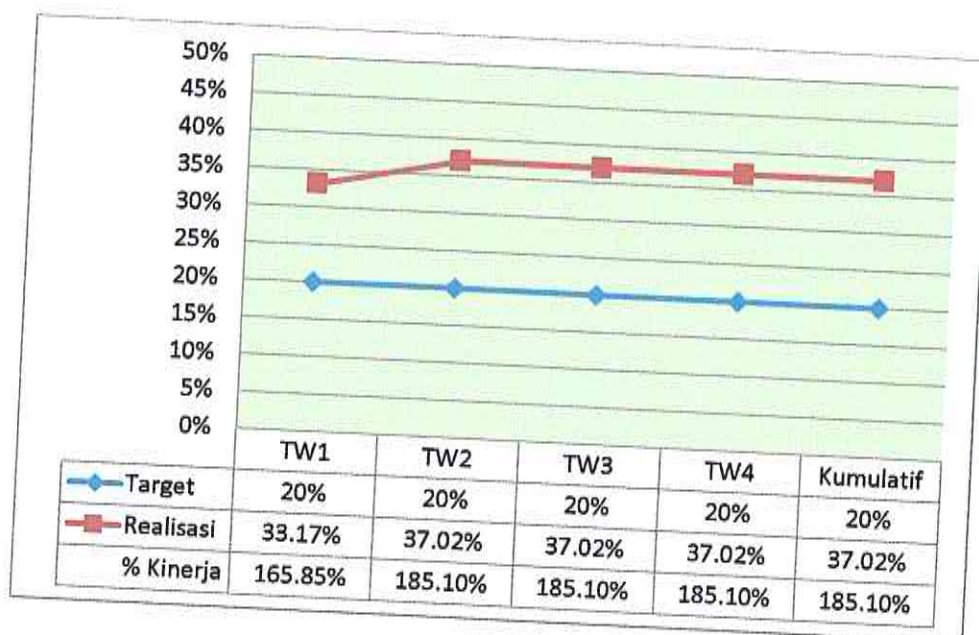
Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017 diukur melalui rasio peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis yang diukur dengan persentase rasio antara

jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat dibandingkan dengan jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian saat ini untuk Jabatan Fungsional Tertentu belum ada dikarenakan Jabatan yang dimaksud diluar lingkup PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, namun saat ini telah memiliki SDM dengan kompetensi teknis yaitu :

- Auditor Perkeretaapian;
- Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
- Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api;
- Tenaga Penguji Awak Sarana Perkeretaapian

Realisasi Indikator Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017 sebesar 37,02% atau capaian sebesar 185,10% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.32



Gambar III.32

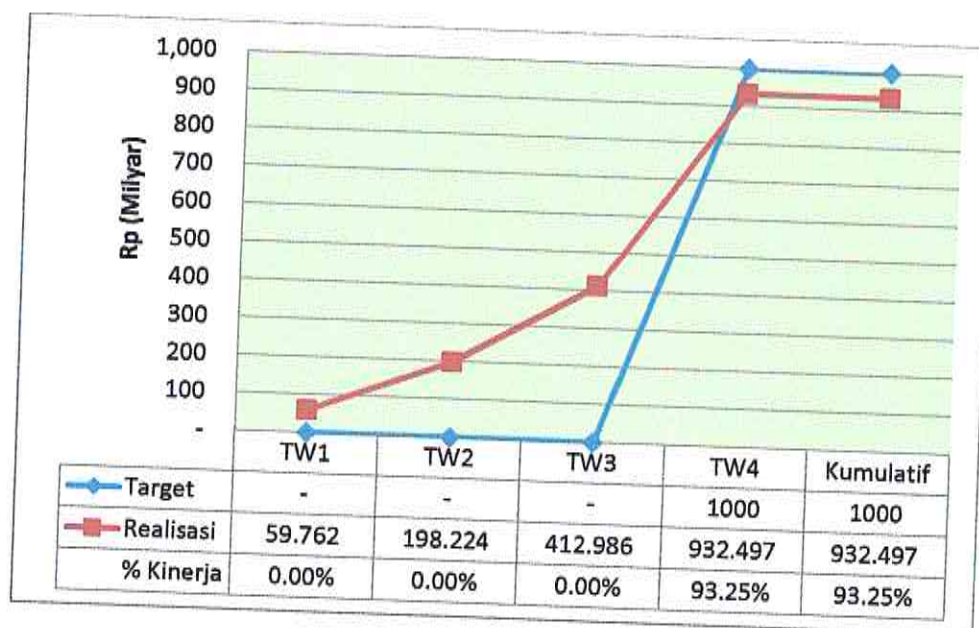
Capaian Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017

III.2.3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Tahun 2017 dalam Reviu Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 Pada Sasaran Kesembilan

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedelapan adalah Sasaran Mewujudkan Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Ditjen Perkeretaapian, yang diukur dengan IKP yaitu :

1. IKP 15 yaitu Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017 sebesar Rp. 932,497 Milyar atau capai sebesar 93,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000 Milyar. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.15



Gambar III.33
Capaian Kinerja Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

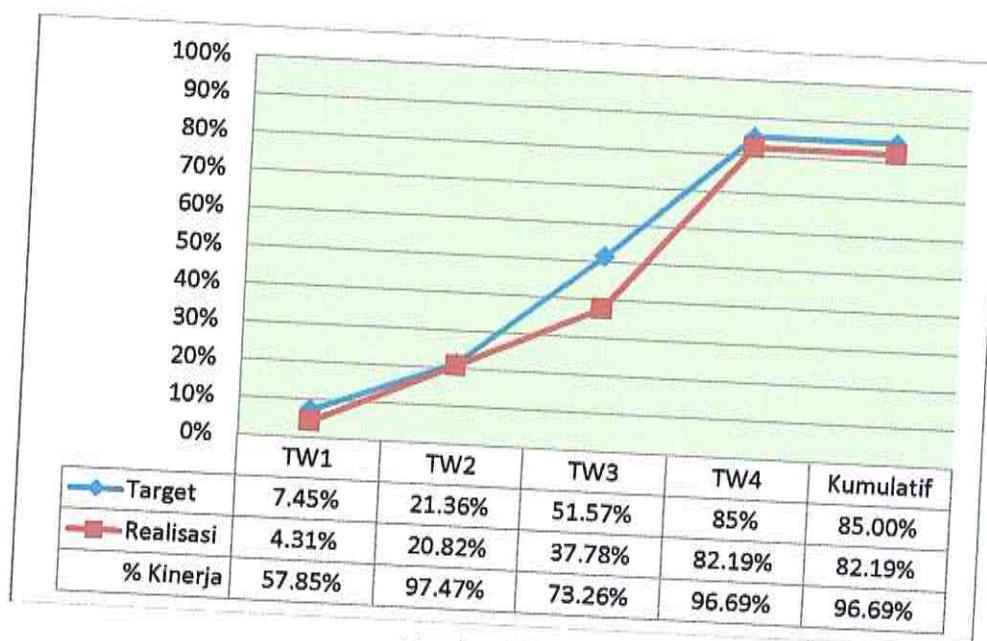
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 sebesar Rp. 932,50 Milyar terdiri dari sebagaimana Tabel III.22

Tabel III.22
Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

NO	JENIS PENDAPATAN	NILAI
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	859,285,627,547
	A. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	3,362,200,000
	B. Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	13,818,620,000
	C. Jasa Pelayanan Penerbitan Ijin Bidang Perkeretaapian	2,398,330,000
	D. Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian	342,309,000
	E. Penggunaan Sarana Perkeretaapian	370,935,000
	F. Pelayanan Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian	134,700,000
	G. TAC (Track Acces Charge)	838,858,533,547
2	Pendapatan Non Fungsional	73,211,929,405
	A. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	54,851,610,265
	B. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8,027,282,211
	C. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-
	D. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,740,501,820
	E. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	121,821
	F. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,752,423,859
	G. Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,791,489,429
	H. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-
	I. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR)	48,500,000
TOTAL		932,497,556,952

2. IKP 16 yaitu Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

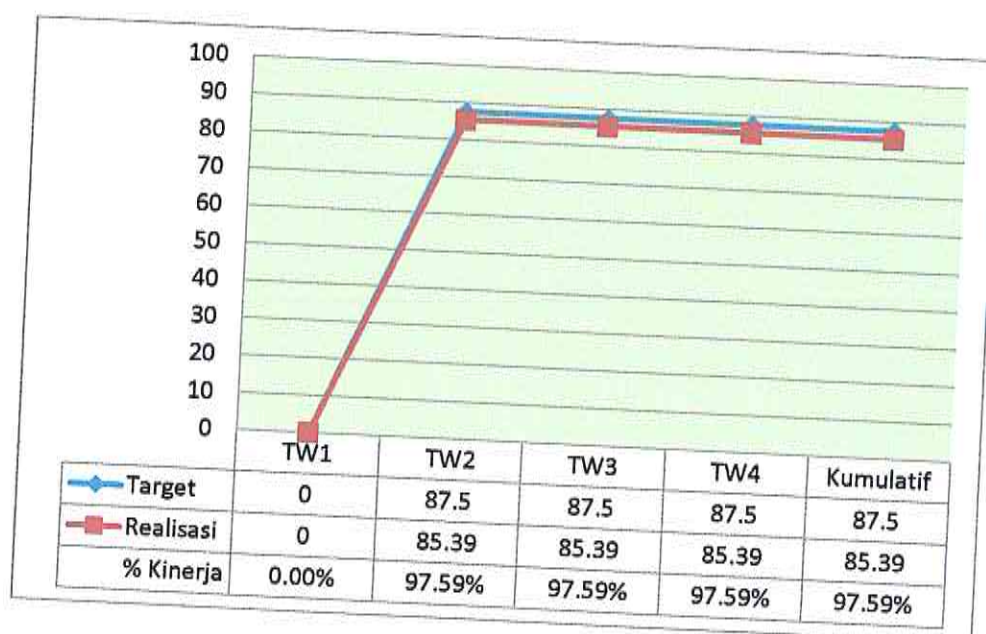
Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 82.19 % atau capaian sebesar 96,69% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.34



Gambar III.34
Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

3. IKP 17 yaitu Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 85.39 atau capaian sebesar 97,59% dari target yang ditetapkan sebesar 87,50. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.35



Gambar III.35
Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

4. IKP 18 yaitu Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Dasar Hukum pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 926 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 78 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 619 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 618 Tahun 2017 Tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

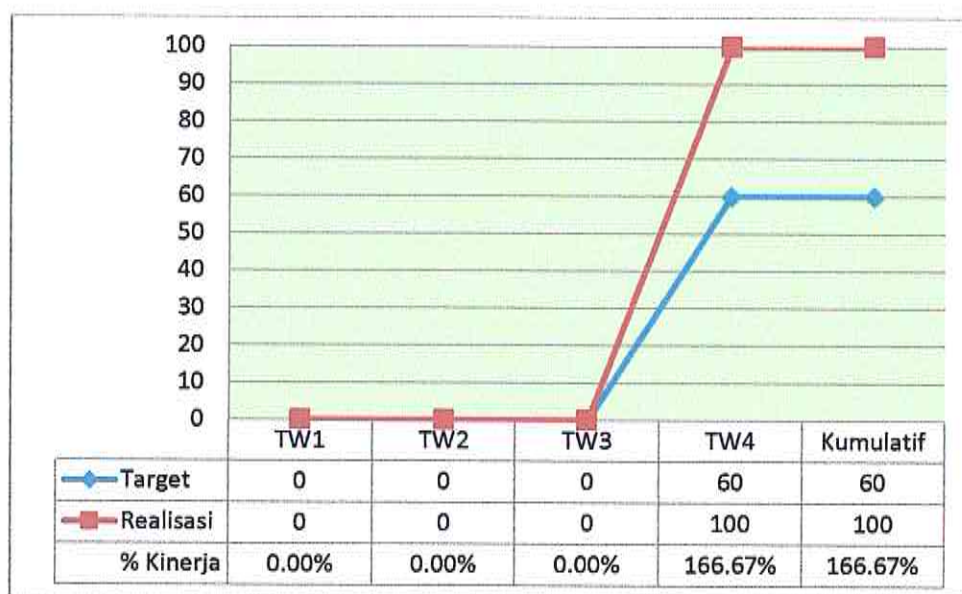
Tingkat maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian diukur dengan capaian tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan dibandingkan dengan target capaian maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian sampai tahun 2019;

Target Tingkat Maturasi/Kematangan implementasi SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2019 yaitu pada Level 3, hal ini sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : S-13/D1/03/02/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peningkatan Kapabilitas , dimana ditargetkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina SPIP pada Tahun 2019 untuk seluruh Kementerian/Lembaga Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP pada **Level 3**. Berikut ini adalah tingkat maturitas SPIP dan karakteristiknya :

Tabel III.23
Tingkat Maturasi SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 0 Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
Level 1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
Level 2 Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Level 3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Level 4 Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.
Level 5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berke- lanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

Realisasi tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 yaitu pada Level 3 (100%) atau capaian kinerja sebesar 166,67% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu pada Level 2 (60%). Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Gambar III.36



Gambar III.36
Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

III.2. 4. Penyebab Keberhasilan Atau Ketidakberhasilan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian.

III.2.4.1. Analisis Pencapaian Sasaran Pertama

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang pertama adalah Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional, yang diukur dengan IKP 1 yaitu **Rasio Konektivitas Antar Wilayah** diukur dengan rasio konektivitas antar wilayah *baseline* tahun 2014 sebesar 0,18 dimana jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA adalah sebanyak 20 lokasi dan ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 0,37 atau sebanyak 42 lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA.

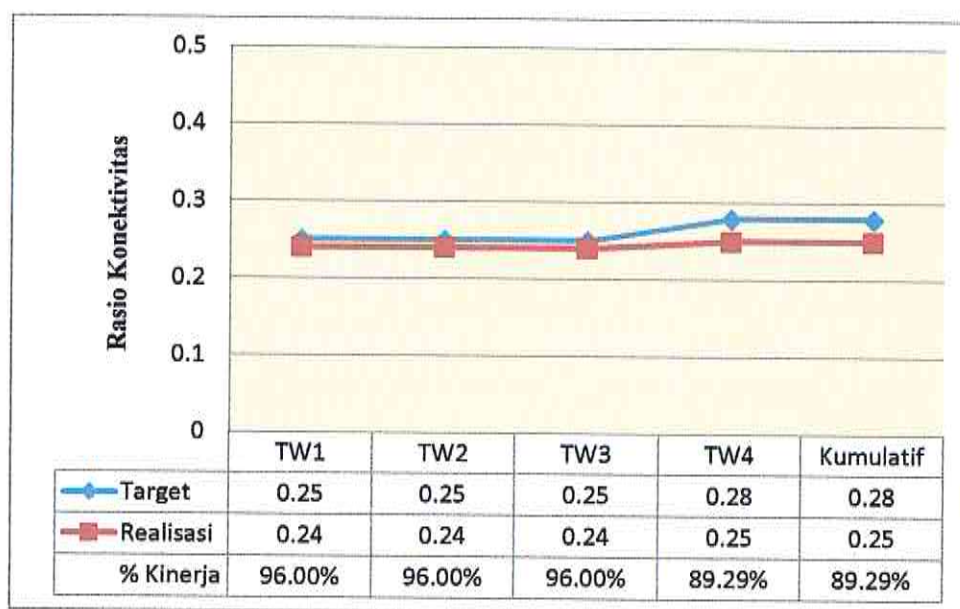
Untuk tahun 2017 Rasio konektivitas antar Wilayah diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung oleh jalur kereta api pada tahun 2017 dengan rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Formulasi untuk Rasio Konektivitas Antar Wilayah yaitu :

$$\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah rencana PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/KSN terhubung jaringan KA Sesuai RIPNas}}$$

Realisasi Rasio Konektivitas Antar Wilayah pada Tahun 2017 sebesar 0,25 atau Capaian Kinerja sebesar 89,29% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,28. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat Tabel III.24 Gambar III.37

Tabel III.24
Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio konektivitas antar Wilayah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	89,29



Gambar III.37
Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio konektivitas antar Wilayah

Target Rasio Konektivitas Antar Wilayah sebesar 0,28 rasio atau sebanyak 32 PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sedangkan realisasi sebesar 0,25 rasio atau sebanyak 28 PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional. Rincian target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.25
Target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional
Tahun 2017

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2017	
		Target	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Jabotabek	√	√
2	Bandung	√	√
3	Semarang	√	√
4	Surabaya	√	√
5	Yogyakarta	√	√
6	Medan	√	√
7	Padang	√	√
8	Palembang	√	√
9	Lampung	√	√
10	Cirebon	√	√
11	Solo	√	√
12	Madiun	√	√
13	Purwokerto	√	√
14	Malang	√	√
15	Tegal	√	√
16	Sukabumi	√	√
17	Rangkasbitung	√	√
18	Makassar	√	-
19	Parepare	√	-
20	Lhokseumawe	√	-
21	Binjai	√	√
22	Besitang	√	√

23	Simpang	√	√
24	Baturaja	√	√
25	Prabumulih	√	√
Simpul Transportasi Bandar Udara			
26	Bandar Udara Kualanamu	√	√
27	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
28	Bandar Udara Soekarno Hatta	-	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
29	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
30	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	-
31	Pelabuhan Tj. Mas	√	-
32	Pelabuhan Merak	√	√
33	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
TOTAL		32	28

Analisis Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya adalah adanya Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional dan Simpul Transportasi Pelabuhan yang belum terhubung dengan jalur kereta api dikarenakan masih dalam proses pembangunan, yaitu :

- Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional sebanyak 3 yaitu Makassar, Pare-Pare dan Lhokseumawe.
- Simpul Transportasi Pelabuhan sebanyak 2, yaitu Pelabuhan Tanjung Mas dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Alternatif Perbaikan Untuk Masa Depan

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah yaitu perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sehingga jalur kereta api dapat terhubung ke Pusat Kegiatan Nasional /Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional dan Simpul Transportasi Pelabuhan tepat waktu sesuai dengan rencana pembangunan. Rencana pembangunan sebagai berikut :

- a) **Makassar dan Pare-Pare** sepanjang 142 Km (Km 0+000 s.d 142+000), saat ini telah terbangun sepanjang 16,1 Km (Km 76+200 s.d 92+300) dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2019 sepanjang 111,65 km antara Km 12+250 s.d 119+150 . Untuk tahun 2018 direncanakan sepanjang 47,65 Km dan tahun 2019 sepanjang 64 Km sedangkan sisanya sepanjang 35 Km antara 0+000 s.d 12+150 (Menghubungkan Makassar) dan antara 119+150 s.d 142+000 (Menghubungkan Pare-Pare) direncanakan pelaksanaannya melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- b) **Lhokseumawe**, Rencana pembangunan jalur KA antara Bireun-Lhokseumawe sepanjang 20 Km, pada tahun 2018 ditargetkan sepanjang 13 Km antara Kreung Mane-Kuta Blang dan sisanya sepanjang 7 Km pada tahun 2019;
- c) **Pelabuhan Tanjung Mas** sepanjang $\pm 2,1$ Km'sp dimana $\pm 1,6$ Km'sp telah selesai pembangunan konstruksi jalan rel di tahun 2017 dan sisanya sepanjang $\pm 0,5$ Km'sp pelaksanaan konstruksi menunggu penertiban lahan oleh PT. KAI sedangkan track di wilayah pelabuhan dilaksanakan oleh PT. Pelindo III yang akan dilaksanakan pada tahun 2018;
- d) **Pelabuhan Kuala Tanjung**, rencana pembangunan Jalur KA antara Bandar Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 21 Km ditargetkan beroperasi pada tahun 2018 untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke.

III.2.4.2. Analisis Pencapaian Sasaran Kedua

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedua adalah **Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah**, yang diukur dengan 2 IKP yaitu :

1. IKP 2 yaitu *Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api*

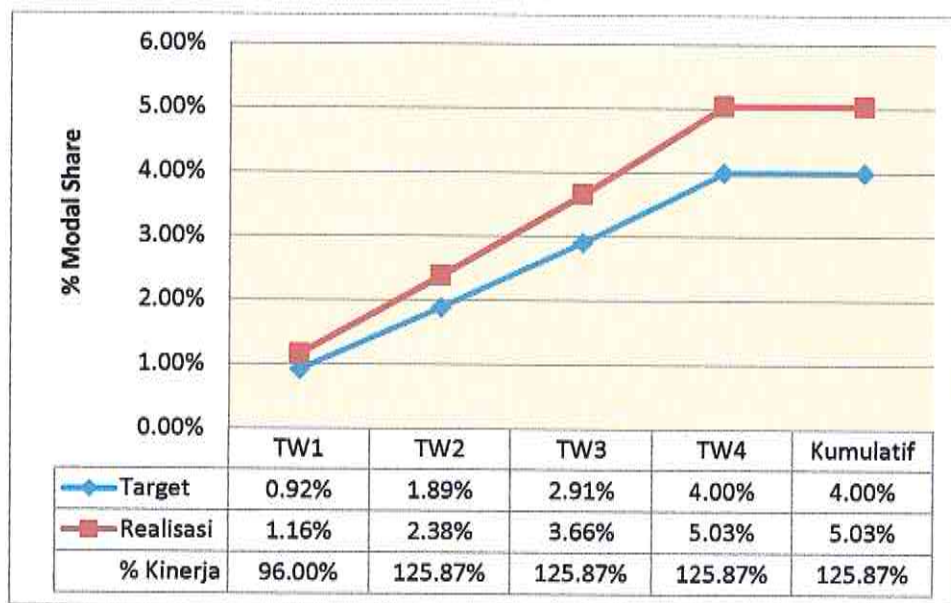
Modal share angkutan penumpang kereta api diukur melalui persentase antara jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang moda lain secara nasional.

Realisasi *Modal share* angkutan penumpang kereta api pada tahun 2017 sebesar 5,03%, atau capaian kinerja sebesar 125,87% dari target yang ditetapkan tahun 2017

yaitu sebesar 4%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.26 dan Gambar III.38

Tabel III.26
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Modal share angkutan penumpang kereta api	%	4,0	1,16	2,38	3,66	5,03	5,03	125,87



Gambar III.38
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api
Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Realisasi *Modal share* angkutan penumpang kereta api tahun 2017 sebesar 5,03%, dimana jumlah penumpang kereta api terangkut sebanyak 390.934.523 penumpang. Keberhasilan capaian kinerja sebesar 125,87% didukung dengan adanya kebijakan/kegiatan/kondisi yang mengarah pada *Shifting* moda yaitu :

- a) Penyediaan tarif angkutan kereta api yang terjangkau oleh masyarakat melalui pemberian subsidi berupa Subsidi Angkutan Perintis dan *Public Service Obligation* (PSO) untuk angkutan penumpang perkotaan, jarak menengah dan jarak jauh;
- b) Adanya penambahan fasilitas perpindahan moda berupa stasiun (Bekasi Timur baru) sehingga memberikan kemudahan akses perpindahan moda;
- a) Adanya perpanjangan lintas pelayanan KRL yang semula dari Tanah Abang sampai dengan Maja mulai 1 April 2017 beroperasi sampai dengan Rangkasbitung;
- c) Peningkatan kualitas pelayanan jasa transportasi perkeretaapian;
- d) Kemacetan lalu lintas jalan raya di wilayah perkotaan sehingga mendorong masyarakat berpindah menggunakan angkutan moda kereta.

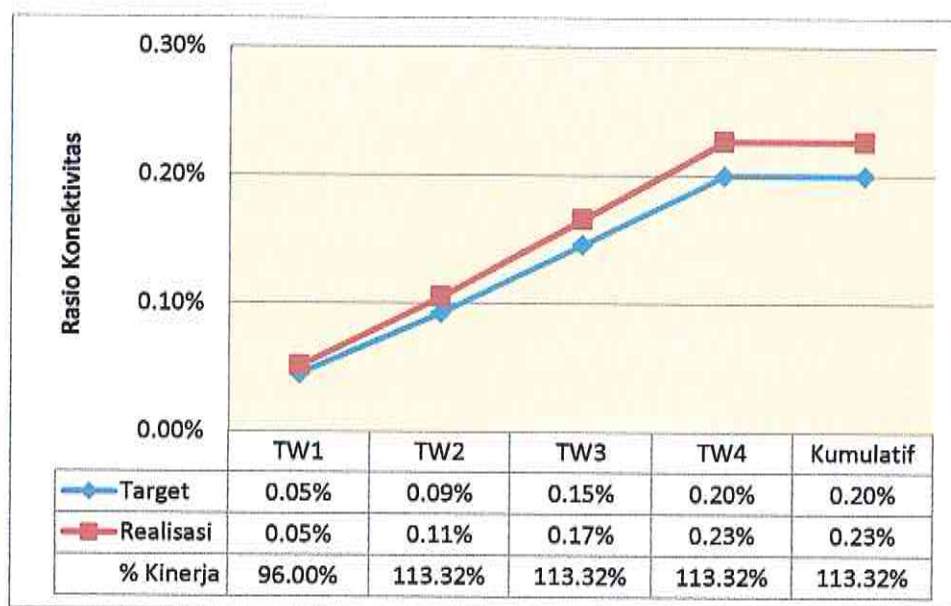
2. IKP 3 yaitu *Modal Share Angkutan Barang Kereta Api*

Modal share angkutan barang kereta api diukur dengan persentase antara jumlah angkutan barang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan barang moda lain secara nasional.

Realisasi *Modal share* angkutan barang kereta api pada tahun 2017 sebesar 0,23%, atau capaian kinerja sebesar 113,32% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,2%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.27 dan Gambar III.39

Tabel III.27
Capaian Kinerja *Modal share* Angkutan Barang Kereta Api
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Modal share angkutan penumpang kereta api	%	0,20	0,05	0,11	0,17	0,23	0,23	113,32



Gambar III.39
Capaian Kinerja *Modal Share* Angkutan Penumpang Kereta Api
Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Realisasi *Modal share* angkutan barang kereta api tahun 2017 sebesar 0,23%, dimana jumlah barang terangkut sebanyak 40.133.099 ton. Keberhasilan capaian kinerja sebesar 113,32% didukung dengan adanya kebijakan/kegiatan/kondisi yaitu :

- a) Beroperasinya jalur ganda lintas utara sampai dengan Surabaya pada tahun 2014 memberikan dampak pada penambahan frekuensi KA Barang sehingga jumlah angkutan barang yang terangkut bertambah;
- b) Adanya penambahan rangkaian untuk angkutan batu bara di wilayah Sumatera Selatan yang semula 60 gerbong menjadi 64 gerbong;
- c) Peningkatan pelayanan jasa angkutan barang oleh Operator melalui penyediaan fasilitas *door to door* berupa penyediaan jasa angkutan truk dari stasiun bongkar muat sampai dengan tujuan serta penambahan fasilitas bongkar muat distasiun berupa *crane*.

III.2.4.3. Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ketiga adalah **Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 4 yaitu Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)

Capaian Indikator Kinerja Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada tahun 2017 sebesar 152,73%. Pada Tahun 2017 telah terjadi 17 kali kejadian kecelakaan perkeretaapian dengan menggunakan perhitungan *Rate of Accident* (RoA) yang merupakan Salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu :

$$\text{Rate of Accident} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Regulator melaksanakan inventarisasi jumlah kejadian kecelakaan kereta api dengan kategori anjlogan, tabrakan KA dengan KA dan terguling sedangkan faktor normalisasi perjutaan Km tempuh didapatkan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Penyelenggara Perkeretaapian. Perhitungan Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) telah dilakukan sejak tahun 2007 yaitu sebesar 2,99 Ratio kecelakaan/ 1 juta km dengan jumlah kecelakaan 139 kejadian dan pada tahun 2017 dengan berbagai upaya peningkatan keselamatan yang telah dilaksanakan selama ini jumlah kejadian kecelakaan menurun signifikan yaitu sebanyak 122 kejadian dari 139 kejadian menjadi 17 kejadian. Berikut ini adalah Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) dari tahun 2007 s.d 2017 adalah sebagai berikut :

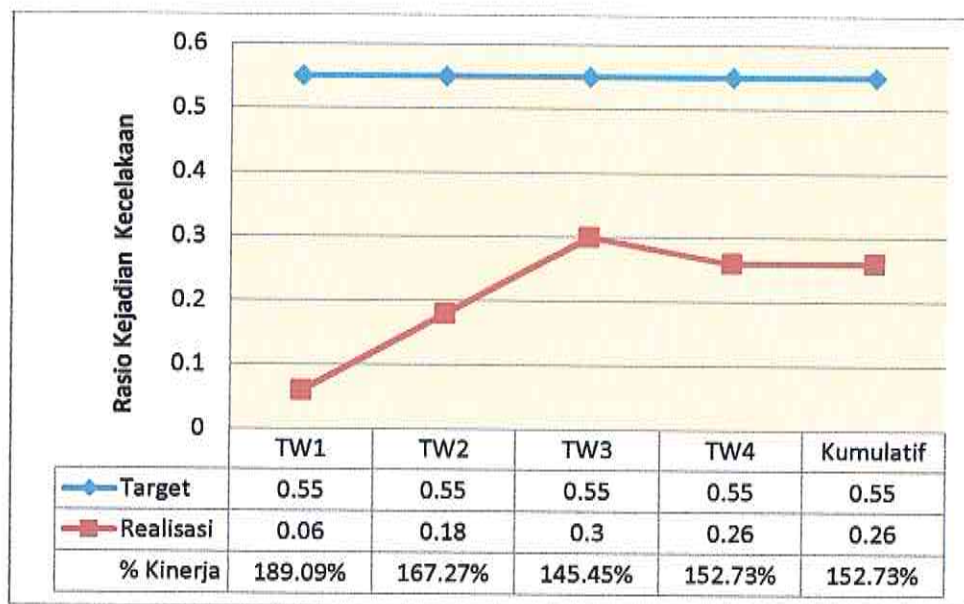
Tabel III.28
Rate Of Accident (RoA) Transportasi Perkeretaapian

Tahun	Jumlah Kecelakaan	KM Tempuh	RoA (Rate of Accident)
2007	139	46.414.271	2,99
2008	126	47.568.579	2,65
2009	69	48.188.833	1,43
2010	42	48.722.833	0,86
2011	33	50.140.079	0,66
2012	31	65.635.028	0,47
2013	39	53.961.479	0,72
2014	39	60.363.012	0,65
2015	73	63.710.056	1,15
2016	15	63.062.950	0,24
2017	17	66.489.586	0,26

Realisasi Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) pada Tahun 2017 sebesar 0,26 Ratio kecelakaan/ 1 juta km atau capaian kinerja sebesar 152,73% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 0,55 Ratio kecelakaan/ 1 juta km. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.29 dan Gambar III.40.

Tabel III.29
Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*rate of accident*)
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api	Ratio kecelakaan / 1 juta km	0,55	0,06	0,18	0,30	0,26	0,26	152,73



Gambar III.40
Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*rate of accident*) Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Realisasi Indikator Kinerja Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) sebesar 0,26 atau Capaian Kinerja sebesar 152,73 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,55 Ratio Kecelakaan/1 Juta km. Realisasi ratio kejadian kecelakaan sebesar 0,26 didapatkan dari perhitungan menggunakan formula diatas dimana jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2017 sebanyak 17 kali kejadian dan Km tempuhnya sebesar 66.489.586 Km. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung juga adanya pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang keselamatan transportasi perkeretaapian antara lain :

- 1) Audit Keselamatan Perkeretaapian dan *Safety Assessment*;
- 2) Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian;
- 3) Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api;
- 4) Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian;
- 5) Sertifikasi, pemeliharaan sertifikat dan ISO Manajemen Mutu Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- 6) *In House Training* Bidang Rekayasa Struktur Jalan Rel dan Jembatan;
- 7) Peningkatan kualitas PPNS Perkeretaapian;
- 8) Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor dan Konsultan;

- 9) Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Perkeretaapian;
- 10) Rakor Keselamatan Perkeretaapian;
- 11) Workshop Preventif Kecelakaan di Bidang Perkeretaapian;
- 12) Evaluasi Bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- 13) Pemeriksaan Peralatan Penangan Kecelakaan Kereta Api;
- 14) Bimbingan Teknis Analisis Kecelakaan Kereta Api;
- 15) Bimbingan Teknis Penanganan Kecelakaan Kereta Api;
- 16) Program Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
- 17) Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Audit dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian;
- 18) Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana dan Petugas Prasarana, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- 19) Evaluasi Kinerja PPNS Perkeretaapian;
- 20) P4GN Pada Transportasi Kereta Api;
- 21) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keselamatan Perkeretaapian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.6 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 117,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.314.095.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp. 3.990.668.252,- dari realisasi sebesar Rp. 19.323.426.748,-

Tabel III.30
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Tar-get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-angan (%)	Fisik (%)	Efisi-ensi (%)
Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	0,55	23,314	19,323	3,990	117,12	152,73	17,12

2. IKP 5 yaitu Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Pengukuran dan evaluasi terhadap Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api merupakan upaya Pemerintah dalam penyediaan transportasi kereta api yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

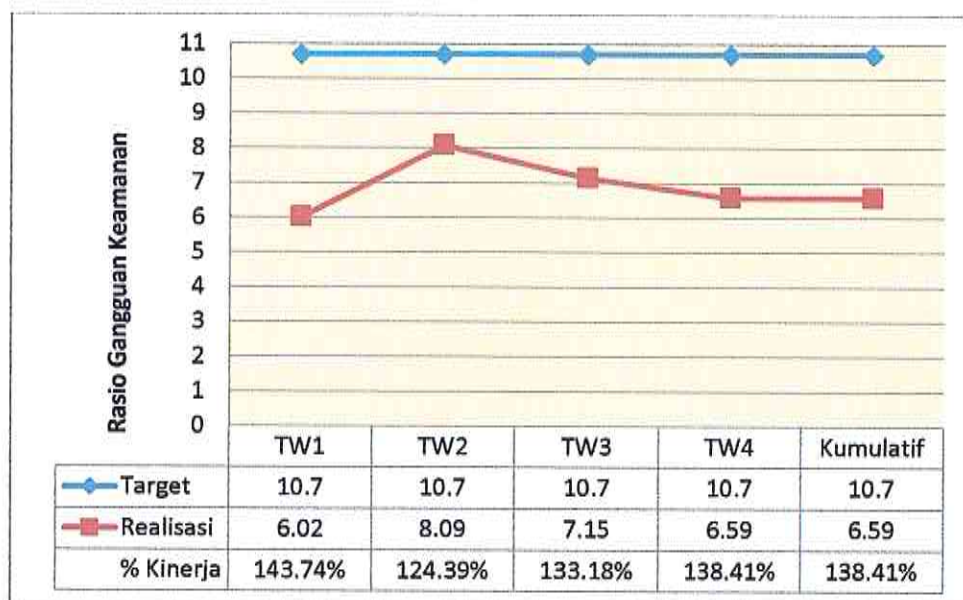
Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api diperoleh dari hasil analisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah gangguan keamanan perkeretaapian dan dinormalisasi dengan perjutaan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu :

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan} = \frac{\text{Jml Kejadian Gangguan Keamanan}}{\text{Km tempuh}} \times 1.000.000$$

Realisasi Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 6,59 Ratio gangguan keamanan / 1 juta km atau Capaian sebesar 138,41% dari target yang ditetapkan tahun 2017 yaitu sebesar 10,7 Ratio gangguan keamanan/ 1 juta km. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.31 dan Gambar III.41

Tabel III.31
Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Ratio gangguan keamanan / 1 juta km	10,7	6,02	8,09	7,15	6,59	6,59	138,41



Gambar III.41
Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pada indikator Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (kejadian vandalisme), didukung adanya pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a) Penyidikan dan Evaluasi Tindak Pidana Perkeretaapian;
- b) Penyuluhan Regulasi Pidana Perkeretaapian dan Sosialisasi Tata Cara Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang;
- c) Identifikasi/ Pendataan dan Peningkatan Keselamatan di Daerah Rawan Pengrusakan dan Pencurian di Jalur Kereta Api;
- d) Penegakan Hukum dan Korwas PPNS di Bidang Perkeretaapian;
- e) Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api.

3. IKP 6 yaitu Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian diukur melalui persentase perbandingan jumlah penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana dan SDM Operator Perkeretaapian) tahun berjalan dengan target penerbitan sertifikat perkeretaapian

sampai dengan tahun 2019, dimana total target penerbitan sertifikat perkeretaapian sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10.384 sertifikat.

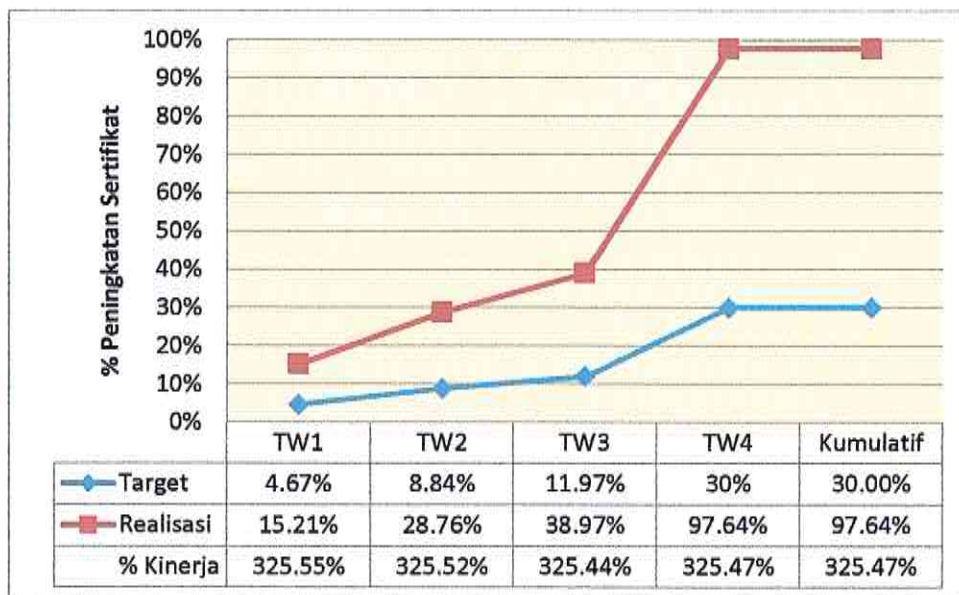
Penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM) Tahun 2017 sebanyak 10.139 sertifikat atau Capaian Kinerja sebesar 325,47% dari target yang ditetapkan sebanyak 3.115 sertifikat atau 30% dari total target sertifikasi sampai dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2017 telah diterbitkan sertifikat perkeretaapian sebanyak 10.139 sertifikat terdiri dari :

- a) Sertifikat SDM Operator Perkeretaapian sebanyak 6.146 sertifikat
- b) Sertifikat Sarana Perkeretaapian sebanyak 3.533 sertifikat
- c) Sertifikat Prasarana Perkeretaapian sebanyak 460 sertifikat

Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.32 dan Gambar III.42

Tabel III.32
Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	30	15,21	28,76	38,97	97,64	97,64	325,47%



Gambar III.42
Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM) Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Realisasi sebesar 97,64% atau Capaian Kinerja sebesar 325,47% dari target yang ditetapkan sebesar 40%, diperoleh dari hasil penerbitan sertifikat pada tahun 2017 yang terdiri dari :

a) Penerbitan sertifikat SDM Operator Perkeretaapian sebanyak 6.146 sertifikat terdiri dari :

- Sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian sebanyak 1.688 sertifikat;
- Sertifikasi Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) sebanyak 559 sertifikat;
- Sertifikasi Penjaga Perlintasan (JPL) sebanyak 425 sertifikat;
- Sertifikasi Juru Penilik Jalan (JPJ)/Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian sebanyak 230 sertifikat;
- Sertifikasi *Train Watcher* sebanyak 1.307 sertifikat;
- Sertifikasi Tenaga Perawatan prasarana sebanyak 915 sertifikat;
- Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana sebanyak 1.022 sertifikat.

b) Penerbitan sertifikat Sarana Perkeretaapian sebanyak 3.533 sertifikat terdiri dari :

- Sertifikasi Lokomotif sebanyak 205 sertifikat;

- Sertifikasi Kereta dengan Penggerak Sendiri sebanyak 477 sertifikat;
- Sertifikasi Kereta yang ditarik Lokomotif sebanyak 636 sertifikat;
- Sertifikasi Gerbong sebanyak 2.181 sertifikat;
- Sertifikasi Peralatan Khusus sebanyak 34 sertifikat.

c) Penerbitan sertifikat Prasarana Perkeretaapian sebanyak 460 sertifikat terdiri dari :

- Sertifikasi Uji Pertama Jalur dan Bangunan sebanyak 14 sertifikat;
- Sertifikasi Uji Berkala Jalur dan Bangunan sebanyak 387 sertifikat;
- Sertifikasi Uji Pertama Fasilitas Operasi KA sebanyak 7 sertifikat;
- Sertifikasi Uji Berkala Fasilitas Operasi KA sebanyak 52 sertifikat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran untuk penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM) sebesar Rp. 13.465.466.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.654.246.009,- yang diperoleh dari kegiatan antara lain :

- Pagu kegiatan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebesar Rp. 2.013.945.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 853.990.435,-
- Pagu kegiatan sertifikasi sarana perkeretaapian sebesar Rp. 7.684.782.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.657.161.574,-
- Pagu kegiatan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp. 3.766.739.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.143.094.000,-

Tabel **III.9** memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 35,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 13.465.466.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana *output* telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp. 4.811.219.991,- dari realisasi sebesar Rp. 8.654.246.009,-

Tabel III.33
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Tar-get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-angan (%)	Fisik (%)	Efisi-ensi (%)
Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	100	13,465	8,654	4,811	135,73	325,47	35,73

III.2.4.4. Analisis Pencapaian Sasaran Keempat

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang keempat adalah **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 7 yaitu Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

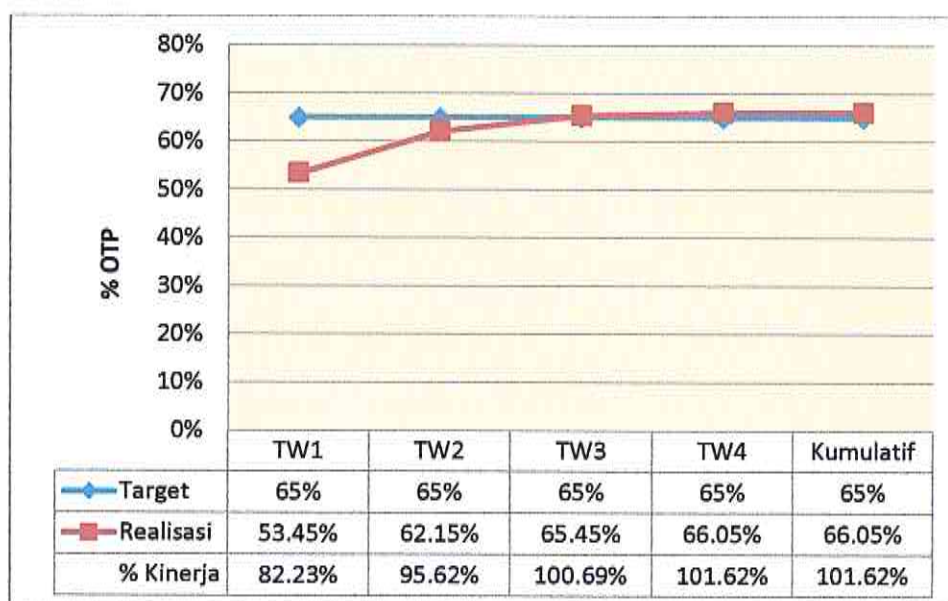
On time performance (OTP) atau ketepatan waktu pelayanan transportasi kereta api yang diukur dalam hal ini adalah ketepatan waktu kedatangan untuk seluruh perjalanan kereta api penumpang.

Prosentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api diperoleh dengan cara membandingkan Persentase capaian (OTP) angkutan penumpang kereta api pada tahun berjalan dengan target OTP.

Realisasi Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api tahun 2017 sebesar 66,05% atau capaian kinerja sebesar 101,62% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 65%. Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.34 dan Gambar III.43

Tabel III.34
Capaian Kinerja Prosentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api
Tahun 2017

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	65	53,45	62,15	65,45	66,05	66,05	101,62%



Gambar III.43
Capaian Kinerja Prosentase *Capaian on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api
Kereta Api Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pencapaian keberhasilan tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan *on time performance* (OTP) angkutan penumpang kereta api antara lain :

- 1) Perencanaan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) untuk perjalanan tahun 2017 tersusun dengan baik;
- 2) Adanya penambahan kapasitas jalur kereta api di beberapa lintas operasi yang semula *single track* menjadi *double track* di tahun 2017;

- 3) Adanya peningkatan fasilitas persinyalan di beberapa lintas yang semula menggunakan sinyal mekanik menjadi sinyal elektrik, sehingga waktu pelayanan dalam pengoperasian perkeretaapian dengan menggunakan sinyal elektrik lebih cepat dan frekuensi KA yang dapat terlayani lebih banyak;
- 4) Efisiensi waktu yang dilakukan oleh Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) yang dapat menangani keterlambatan KA dengan adanya susulan atau percepatan perjalanan kereta api di lintas.

2. IKP 8 yaitu Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

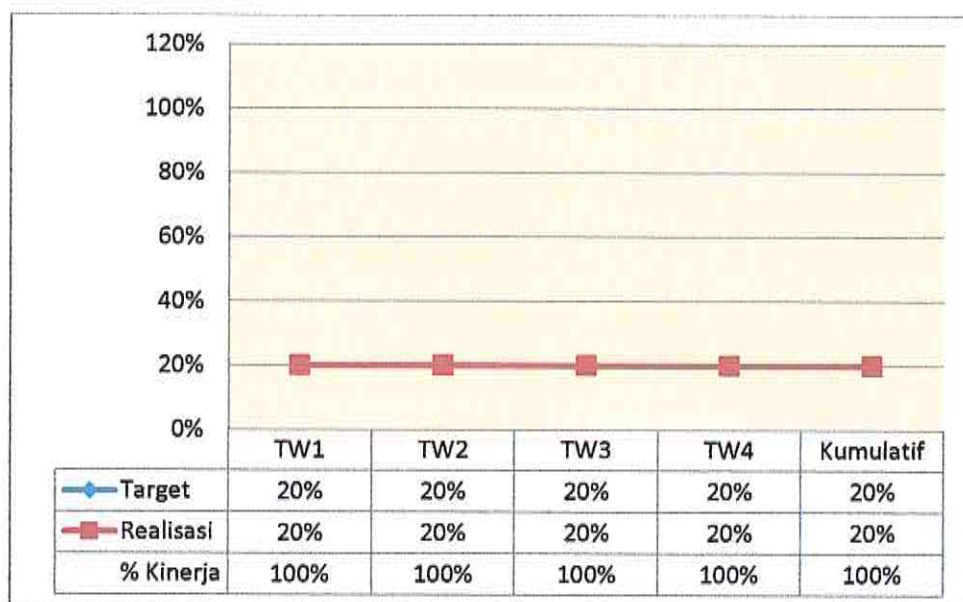
Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan diukur melalui persentase peningkatan antara jumlah kota yang terlayani angkutan kereta api perkotaan pada tahun berjalan dibanding dengan jumlah kota yang terlayani angkutan kereta api pada tahun 2016 sebanyak 5 kota

Realisasi prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan pada tahun 2017 sebesar 20% (6 kota) atau Capaian Kinerja sebesar 20% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 20% (6 Kota). Realisasi kumulatif per-triwulan dapat dilihat pada Tabel III.35 dan Gambar III.44

Tabel III.35

Capaian Kinerja Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan Tahun 2017

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	s/d TW4	
Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20	20	20	20	20	20	100



Gambar III.44

Capaian Kinerja Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan Tahun 2017

Wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan pada tahun 2017 sebanyak 6 kota atau mengalami kenaikan sebanyak 1 kota dibanding tahun 2016 sebanyak 5 kota sehingga Prosentase peningkatan wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan transportasi kereta api pada tahun 2017 sebesar 20% dibanding dengan *baseline* 2016 (5 kota). Wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan sebagai berikut :

Tabel III.36

Wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

No.	Wilayah Perkotaan	Tahun	
		2016 (Baseline)	2017
1	Jakarta	√	√
2	Bandung	√	√
3	Semarang	√	√
4	Yogyakarta	√	√
5	Surabaya	√	√
6	Medan		√

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Analisis keberhasilan terhadap capaian Indikator Kinerja Program Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan sebesar 100% yaitu adanya 6 wilayah perkotaan yang telah tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan antara lain :

1) Jakarta

Pada daerah Jabodetabek (Jakarta Bogor Tangerang Bekasi) terdapat KRL (Kereta Rel Listrik) yang memiliki beberapa lintas pelayanan, misalnya Jakarta Kota – Bekasi, Jakarta Kota – Bogor, Tanah Abang – Maja dan Tanah Abang – Tangerang. Pada tahun 2017 terdapat tambahan lintas pelayanan diantaranya Cikarang – Jakarta Kota dan Tanah Abang – Rangkasbitung. Dan adanya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 215 Tahun 2015 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. KAI Commuter Jabodetabek.

2) Bandung

Pada wilayah perkotaan Bandung terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Kiaracondong – Cicalengka, yaitu Ekonomi Lokal Bandung Raya. KA Perkotaan di Bandung beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

3) Semarang

Pada wilayah perkotaan Semarang terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Semarang Poncol – Tegal dan Solo, yaitu Ekonomi Kaligung dan Kalijaga. KA Perkotaan di Semarang beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

4) Yogyakarta

Pada lintas Yogya – Solo realisasi perjalanan KA Perkotaan di tahun 2017 terdapat 2 kereta, diantara nya Sidomukti dan Prambanan Ekspres (Prameks). KA Perkotaan di Yogyakarta beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

5) Surabaya

Pada wilayah perkotaan Surabaya realisasi perjalanan KA Perkotaan di tahun 2017 terdapat 3 kereta, diantaranya KA Penataran yang melayani lintas Surabaya – Blitar, KA Tumapel yang melayani lintas Surabaya – Malang dan KA Jenggala yang melayani lintas Surabaya – Mojokerto. KA Perkotaan di Surabaya beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

6) Medan

Pada Wilayah perkotaan Medan terdapat KA Perkotaan yang melayani lintas Binjai – Medan yaitu Sri Lelawangsa. KA Perkotaan di Medan beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.434 Tahun 2016 tentang Izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

3. IKP 9 yaitu Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian diukur melalui persentase peningkatan penurunan gas rumah kaca pada tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sebanyak 3,31 Juta ton CO₂e. Dimana pada tahun 2017 target penurunan gas rumah kaca sebesar 3,51 Juta ton CO₂e sehingga diperoleh target prosentase peningkatan penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian pada tahun 2017 sebesar 6,04%.

Metode perhitungan yang dilakukan untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sub sektor Kereta Api yaitu :

a. Rumus

$$\Delta E = E_{KBM} - E_{KA}$$

dimana, ΔE = Indikasi pengurangan emisi kendaraan bermotor oleh KA (kg/thn)

E_{KBM} = Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA (kg/thn)

E_{KA} = Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn)

$$K_{BBM} = \ell_{BBM} \times p \times q$$

dimana, K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (litr/thn)

ℓ_{BBM} = Konsumsi bahan bakar spesifik (ltr/km/pnp)

p = Panjang rata-rata perjalanan (km)

q = Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute tersebut (org/thn)

$$E_{co2} = K_{BBM} \times e_{co2}$$

dimana, E_{co2} = Jumlah emisi CO2 (kg/thn)

K_{BBM} = Jumlah konsumsi BBM (ltr/thn)

e_{co2} = Tingkat emisi bahan bakar (kg/ltr)

b. Koefisien

- Tingkat emisi bahan bakar (Sumber: Studi Kebutuhan Energi Sub Sektor Perkeretaapian, 2009)

$$e_{co2} \text{ Solar} = 2,6664 \text{ kg/ltr}$$

$$e_{co2} \text{ Premium} = 2,2606 \text{ kg/ltr}$$

$$e_{co2} \text{ BBG} = 1,4659 \text{ kg/ltr}$$

- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan penumpang (Sumber: Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS,2010)

$$\ell_{BBM \text{ KA}} = 0,002 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{BBM \text{ BUS}} = 0,0125 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{BBM \text{ Mobil}} = 0,020 \text{ ltr/pnp/km}$$

$$\ell_{BBM \text{ Spd Mtr}} = 0,025 \text{ ltr/pnp/km}$$

- Konsumsi bahan bakar spesifik angkutan barang (Sumber: Studi Pengembangan Transportasi KA yang efisien dan ramah lingkungan,2010)

$$\ell_{BBM \text{ KA}} = 0,00032 \text{ ltr/ton/km}$$

$$\ell_{BBM \text{ TRUCK}} = 0,018 \text{ ltr/ton/km}$$

c. Asumsi

- 1) Jumlah penumpang atau barang yang melewati rute (q) dihitung dengan mengalikan prediksi jumlah penumpang tahunan dengan *load factor* sebesar 0,7. *Load factor* sebesar 0,7 diperoleh dari Studi Perhitungan Load Factor Kereta Api Ekonomi Nasional (2009) yang menggambarkan tingkat okupansi penumpang sebesar 70%;

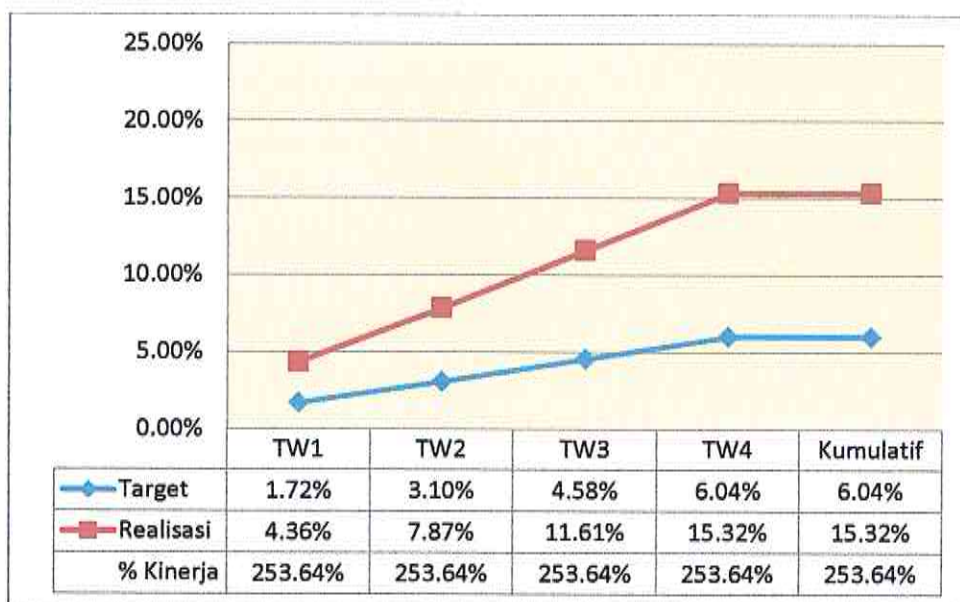
- 2) Panjang rata-rata perjalanan (p) diperoleh dengan mengalikan panjang lintasan dengan 0,5. Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut;
- 3) Proporsi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4.

Metode yang dipergunakan tersebut telah diverifikasi oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Metode tersebut diatas diperoleh Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 15,32% (3,817 Juta ton CO₂e) atau capaian kinerja sebesar 253,64% dari target yang ditetapkan sebesar 6,04% (3,51 Juta ton CO₂e). Realisasi kumulatif per-triwulan ditunjukkan pada Tabel III.37 dan Gambar III.45

Tabel III.37
Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	6,04	4,36	7,87	11,61	15,32	15,32	253,64 %



Gambar III.45

Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Capaian keberhasilan dan perhitungan yang dilakukan dalam menganalisa penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor KA sebagai berikut :

- b) Jumlah penumpang pada tahun 2017 sebanyak 390.934.523 penumpang atau mengalami kenaikan sebesar 22,105 % dibanding tahun 2016 dengan jumlah penumpang sebanyak 320.169.000 penumpang;
- c) Rincian jumlah penumpang tahun 2017 sebanyak 390.934.523 penumpang yaitu Penumpang Jawa : 69.658.005, Penumpang Sumatera : 6.958.635 & Penumpang Jabodetabek : 314.317.883;
- d) Terdapat penambahan panjang lintasan yang beroperasi di wilayah Jabotabek sepanjang 17,146 Km dikarenakan adanya perpanjangan operasi KRL yang semula dari Tanah Abang sampai dengan Maja mulai 1 April 2017 beroperasi sampai dengan Rangkasbitung;
- e) Panjang rata-rata perjalanan (p) yang di capai pada tahun diperoleh dari Panjang Lintasan yang beroperasi x 0,5, Nilai 0,5 diambil dengan mengasumsikan hanya 50% dari jumlah penumpang yang menjalani lintasan program/proyek tersebut.

- f) Proporsi pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan KA (emisi yang direduksi dengan KA) adalah bus 0,2; mobil 0,2; sepeda motor 0,4 (sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dijelaskan pada asumsi tersebut diatas.

III.2.4.5. Analisis Pencapaian Sasaran Kelima

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kelima adalah **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi**, yang diukur dengan 2 IKP yaitu :

1. IKP 10 yaitu Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

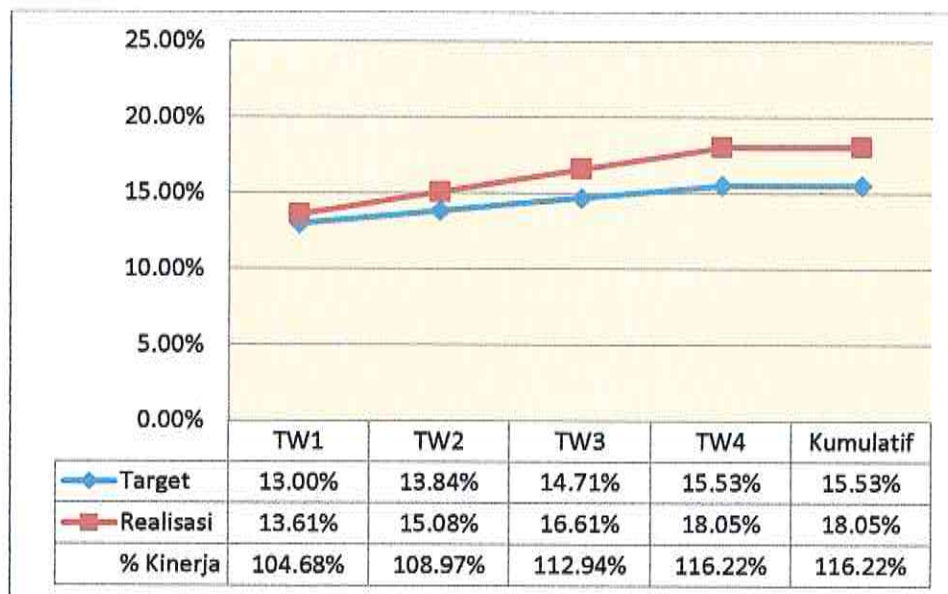
Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis diukur melalui persentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis pada tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sebanyak 294.839.165 penumpang. Dimana pada tahun 2017 target penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis sebanyak 340.624.392 penumpang sehingga diperoleh target prosentase penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis pada tahun 2017 sebesar 15,34%.

Realisasi Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis Tahun 2017 mencapai 18,05% atau capaian kinerja sebesar 116,23% dari target yang ditetapkan sebesar 15,53%. Analisis capaian & realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.38 dan Gambar III. 46

Tabel III.38

Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Penyediaan Tempat Duduk Kereta Api PSO dan Perintis Tahun 2017

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	15,53	13,61	15,08	16,61	18,05	18,05	116,23



Gambar III.46

Capaian Kinerja Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian Tahun 2017

Rincian Realisasi penyediaan tempat duduk kereta api PSO terdiri dari KA Penumpang (Jarak Jauh, Jarak dekat, Jarak sedang, KRD Ekonomi dan KA Ekonomi lebar), KRL Jabodetabek dan KA Perintis, dengan rincian jumlah penumpang sebagai berikut :

Tabel III.39

Realisasi Penumpang KA PSO Tahun 2017

Jenis KA	Realisasi Jumlah Penumpang Tahun 2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	*)Triwulan IV
KA Ekonomi Jarak Jauh	1.369.073	1.431.735	1.527.152	1.289.438
KA Ekonomi Jarak Sedang	1.297.858	1.319.442	1.434.645	1.190.271
KA Ekonomi Jarak Dekat	7.616.441	6.150.674	5.776.719	5.530.545
KRD Ekonomi	1.517.574	1.597.067	1.694.727	1.521.199
KA Ekonomi Lebaran	-	59.850	16.975	-
TOTAL	11.800.946	10.558.768	10.450.218	9.531.453

Tabel III.40

Realisasi Penumpang KRL Jabodetabek Tahun 2017

Jenis KA	Realisasi Jumlah Penumpang Tahun 2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	*)Triwulan IV
KRL Jabodetabek	71.364.341	76.870.800	80.467.588	75.554.184
TOTAL	71.364.341	76.870.800	80.467.588	75.554.184

Tabel III.41

Realisasi Penumpang KA Perintis Tahun 2017

Nama KA	Realisasi Jumlah Penumpang Tahun 2017			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Cut Meutia	22.118	14.477	9.846	8.698
Lembah Anai	10.814	14.968	12.225	6.634
Kertalaya	9.695	7.829	6.866	8.578
Siliwangi	181.390	201.285	180.693	203.849
Bathara Kresna	28.232	17.935	15.313	18.540
Jenggala	153.270	118.168	107.787	157.837
TOTAL	405.519	374.662	332.730	404.136

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Analisis keberhasilan terhadap capaian Indikator Kinerja Program Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis sebesar 116,23% yaitu :

- Adanya peningkatan minat masyarakat pengguna moda Kereta Api terutama pada KRL Jabodetabek yang pada tahun 2017 terdapat penambahan lintas pelayanan yaitu Cikarang – Jakarta kota dan Rangkasbitung – Tanah Abang.
- Adanya penambahan rangkaian KA dalam rangka pelaksanaan Angkutan lebaran Tahun 2017, Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun baru 2018

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 101,96% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp. 2.192.651.036.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp. 42.881.960.946,- dari realisasi sebesar Rp. 2.149.769.075.054,-

Tabel III.42
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	Tar-get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-angan (%)	Fisik (%)	Efisi-ensi (%)
Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	100	2.192	2.149	42,88	101,96	100	1,96

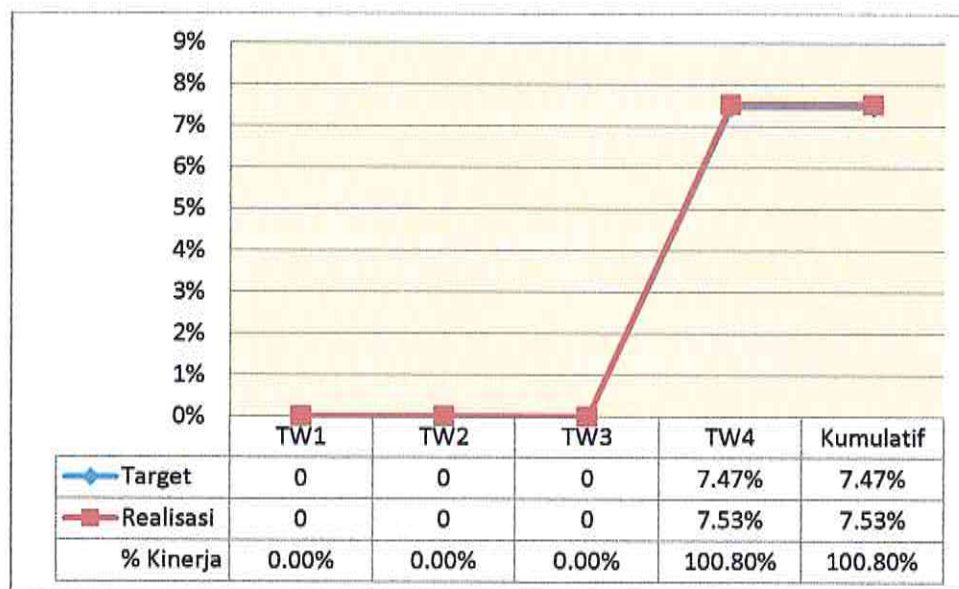
2. IKP 11 yaitu Capaian Indikator Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun diukur melalui persentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun pada tahun berjalan dibanding dengan *baseline* pada tahun 2014 sepanjang 5.196 Km'sp. Dimana pada tahun 2017 target panjang jalur kereta api yang terbangun sepanjang 5.584,2 Km'sp sehingga diperoleh target prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun pada tahun 2017 sebesar 7,47%.

Realisasi Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017 sebesar 7,53% atau capaian sebesar 100,80% dari target yang ditetapkan sebesar 7,47% Km'sp. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.43 dan Gambar III.47

Tabel III.43
Capaian Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	7,47	-	-	-	7,53	7,53	100,80



Gambar III.47
Capaian Kinerja Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan capaian pelaksanaan pembangunan jalur kereta api terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya pembangunan jalur kereta api yaitu kesiapan lahan, pelaksanaan sesuai dengan time schedule, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pekerjaan pembangunan jalur kereta api kepada pelaksana secara terus menerus, kesiapan peralatan kerja dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan, spesifikasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP).

Rincian realisasi pekerjaan pembangunan jalur kereta api pada tahun 2017 sepanjang 178,15 Km'sp, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III.44
Daftar Realisasi Rekerjaan Jalur Kereta Api Tahun 2017

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Reaktivasi Jalur KA antara Stasiun Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas Tahap 1 (2,15 Km'sp)	2.15	Km'sp
2	Pembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 0+000 s.d 28+000 Tahap II Lintas Binjai - Besitang (BNB-1)	28.00	Km'sp
3	Pembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 28+000 s.d 56+000 Tahap II Lintas Binjai - Besitang (BNB-2)	28.00	Km'sp
4	Pembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 56+000 s.d 68+000 Tahap II Lintas Binjai - Besitang (BNB-3)	12.00	Km'sp
5	Pembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 68+000 s.d 78+400 Tahap II Lintas Binjai -Besitang (BNB-4)	10.00	Km'sp
6	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda antara KM 322 + 500 - KM 330 + 000 Lintas Stasiun Prabumulih - Stasiun Lembaki	7.50	Km'sp
7	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda antara KM 330+000 - KM 336 + 200 Lintas Stasiun Prabumulih - Stasiun Lembak	6.20	Km'sp
8	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda antara Stasiun Payakabung - Stasiun Simpang KM 382+450 - KM 387+100	4.70	Km'sp
9	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda antara Stasiun Simpang - Stasiun Kertapati KM 387+100 - KM 394+500	7.40	Km'sp
10	Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda antara Stasiun Simpang - Stasiun Kertapati KM 394+500 - KM 398+850	4.30	Km'sp
11	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.195+600 - Km.200+100	4.40	Km'sp
12	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.200+100 - Km.202+200	2.10	Km'sp
13	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.202+200 - Km.208+000	5.80	Km'sp
14	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.208+000 - Km.210+100	2.00	Km'sp
15	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.210+100 - Km.214+250	4.10	Km'sp
16	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.214+250 - Km.218+500	4.30	Km'sp

17	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.218+500 - Km.222+800	4.30	Km'sp
18	Pembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.222+800 - Km.227+900	5.10	Km'sp
19	Pembangunan Double Track (Pemasangan Rel) termasuk perbaikan tanah dan saluran Km. 69+925 - Km. 79+550 antara Maja - Rangkasbitung (9,6 Km) MYC 2016-2017)	9.60	Km'sp
20	Pembangunan Jalan KA Km 354+000 - Km 358+400 sepanjang 4.400 M'jr antara Purwokerto - Notog (Multi Years 2015 - 2017)	4.40	Km'sp
21	Pembangunan Jalan KA Km 358+400 - Km 364+000 sepanjang 5.600 M'jr antara Notog - Kebasen dan Penataan Emplasemen Stasiun Notog (Multi Years 2015 - 2017)	5.60	Km'sp
22	Pembangunan Jalan KA Km 368+800 - Km 376+600 sepanjang 7.800 M'jr antara Randegan - Kroya dan Penataan Emplasemen Stasiun Randegan (Muti Years 2015 - 2017)	7.80	Km'sp
23	Pembangunan Jalan KA Km 350+400- Km 354+000 antara Purwokerto - Notog (3,6 Km'sp)	3.60	Km'sp
24	Pembangunan Jalan KA Km. 364+000 - Km. 368+800 antara Kebasen randegan -dan Penataa Emplasemen Stasiun (4,8 Km'sp)	4.80	Km'sp
JUMLAH		178,15	Km'sp

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.17 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 111,58% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 9.452.281.720.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp. 1.094.296.040.000,- dari realisasi sebesar Rp. 8.357.985.680.000,-

Tabel III.45
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	Tar-get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-angan (%)	Fisik (%)	Efisi-ensi (%)
Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	100	9.452	8.357	1.094	111,58	100	11,58

III.2.4.6. Analisis Pencapaian Sasaran Keenam

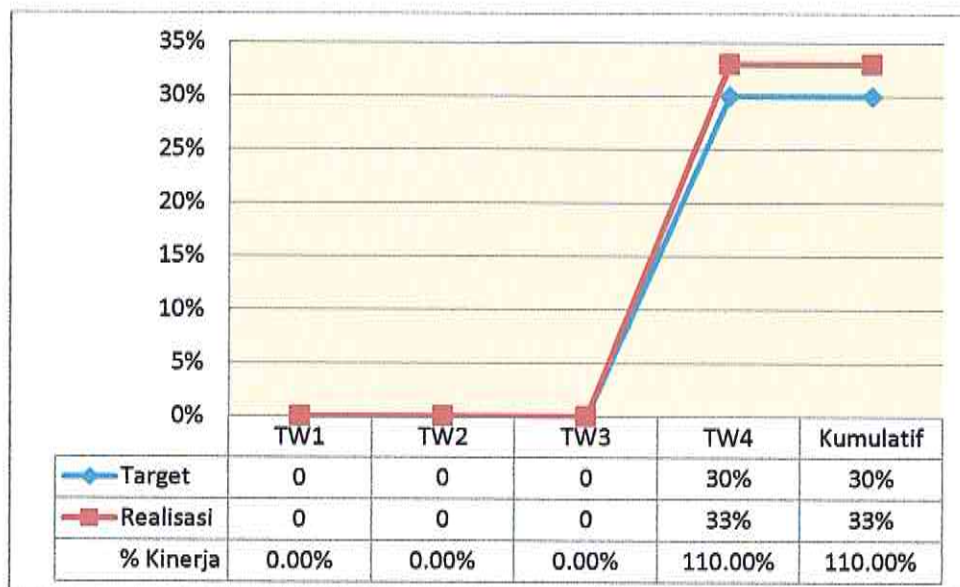
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang keenam adalah **Sasaran Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**, yang diukur dengan IKP 12 yaitu Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian.

Pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 33% atau capaian kinerja mencapai 110% dari target yang telah ditetapkan sebesar 30%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabl III.46 dan Gambar III.48

Tabel III.46

Capaian Kinerja Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	30	-	-	-	33	33	110



Gambar III.48

Capaian Kinerja Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Capaian kinerja Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian Tahun 2017 mencapai 110% dari target yang telah ditetapkan sebesar 30%. Dimana pada tahun 2017 telah selesai disusun 11 peraturan yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor . 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun. 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- b. Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
- c. Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. Permenhub Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
- e. Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- f. Permenhub Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- g. Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- h. Permenhub Nomor PM 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);
- i. Permenhub Nomor PM 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);
- j. Permenhub Nomor PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api Dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa;
- k. Permenhub Nomor PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.19 memperlihatkan efisiensi sumber daya dilihat dari daya serap anggaran terdapat efisiensi sebesar 49,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.439.080.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimana output telah terpenuhi. Penggunaan anggaran tersisa Rp. 1,203,596,750,- dari realisasi sebesar Rp. 1.235.483.250,-

Tabel III.47
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	Tar-Get	Pagu DIPA Miliar (Rp)	Realisasi Miliar (Rp)	Sisa Realisasi Keuangan Miliar (Rp)	Keu-Angan (%)	Fisik (%)	Efisi-Ensi (%)
Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	100	2,439	1,235	1,203	149,35	110	49,35

III.2.4.7. Analisis Pencapaian Sasaran Ketujuh

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ketujuh adalah **Sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema Pendanaan Alternatif**, yang diukur dengan IKP 13 yaitu Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif.

Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif diukur melalui persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif.

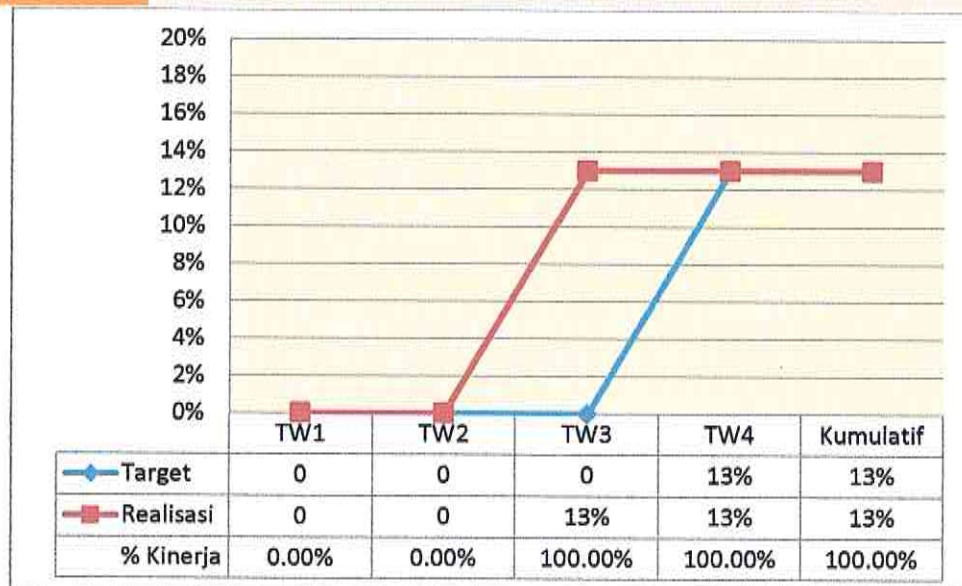
Realisasi Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif Tahun 2017 sebesar 13% (2 dokumen) atau capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 13% (2 dokumen).

Dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) yang tersedia pada tahun 2017 sebanyak 2 dokumen yaitu untuk proyek KA Angkutan Batu Bara lintas Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung dan KA Angkutan Batu Bara lintas Tanjung Enim-Tanjung Api api. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III. 48 dan Gambar III.49

Tabel III.48

Capaian Kinerja Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif tahun 2017

Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	13	-	-	-	13	13	100



Gambar III.49

Capaian Kinerja Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Realisasi Prosentase peningkatan Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif tahun 2017 sebesar 13 % atau capaian kinerja sebesar 100%, dengan jumlah 2 dokumen perencanaan awal (OBC/FBC), diantaranya:

- a) Dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) untuk proyek KA Angkutan Batu Bara (Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung), berupa :
 - 1) Tersedianya dokumen perencanaan awal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) Adanya Surat dari PT. Perkeretaapian Tambun Bungai kepada Gubernur Kalteng nomor: 006/PTB/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 perihal Jaminan Pemerintah proyek kereta api umum Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung, yang berisi :
 - Permintaan Jaminan pemerintah;
 - Sudah ditandatangani coal transport agreement (CTA);
 - Partispasi miner untuk investasi dalam PT. PTB selaku badan usaha pelaksana proyek.
 - 3) Tanggal 17 April 2017 terdapat Nota Dinas laporan hasil rapat penyiapan proyek KA Purukcahu-Bangkuang-Batannjung di Prop. Kalteng Nomor:ND-11/D.III.M.EKON.03/04/2017.
 - 4) Tanggal 31 Agustus 2017 terdapat Surat dari Kemenko bidang Perekonomian kepada Gubernur Kalteng no.S-2/2/M.EKON/08/2017 perihal tindaklanjut kegiatan proyek strategis nasional KA Purukcahu-Batanjung di Prov Kalteng, yang berisi Agar Pemprov Kalteng memenuhi :
 - Adendum Perjanjian Kerjasama;
 - Pembahasan perjanjian penyelesaian utang dengan DPRD;
 - Penerbitan revisi izin lingkungan dan penyampaian permohonan IPPKH ke Kementerian KLH;
 - Penerbitan SK Gubernur ttg Panitia Pengadaan Tanah dan Penetapan Lokasi;
 - Beberapa tindaklanjut bersama dengan PT. Perkeretaapian Tambun Bungai.

- b) Dokumen Perencanaan awal (OBC/FBC) untuk proyek KA Angkutan Batu Bara Tanjung Enim-Tanjung Api api, berupa :
- 1) Tersedianya dokumen perencanaan awal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Adanya Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-api di Propinsi Sumatera Selatan oleh Menteri Perhubungan Nomor: KA 005/1/23/PHB 2016.

III.2.4.8. Analisis Pencapaian Sasaran Kedelapan

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedelapan adalah **Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional**, yang diukur dengan IKP 14 yaitu **Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis**

Di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian saat ini untuk Jabatan Fungsional Tertentu belum ada dikarenakan Jabatan yang dimaksud diluar lingkup PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, namun saat ini telah memiliki SDM dengan kompetensi teknis yaitu :

- Auditor Perkeretaapian;
- Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
- Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api;
- Tenaga Penguji Awak Sarana Perkeretaapian

Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017 diukur melalui rasio peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis yang diukur dengan persentase rasio antara jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat dibandingkan dengan jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan.

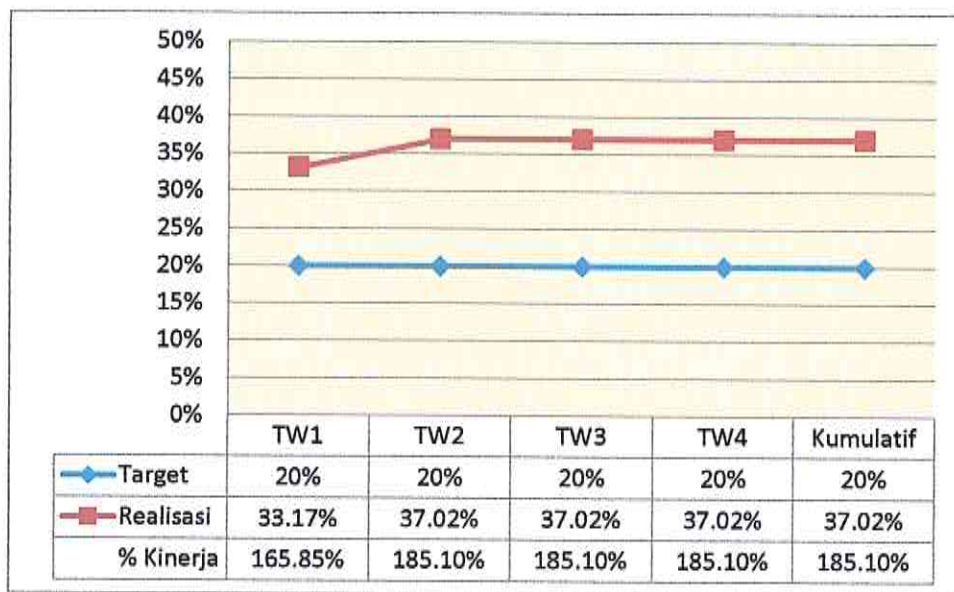
Realisasi Indikator Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017 sebesar 37,02% atau capaian sebesar

185,10% dari target yang ditetapkan sebesar 20%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.49 dan Gambar III. 50.

Tabel III.49

Capaian Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	20	33,17	37,02	37,02	37,02	37,02	185,10



Gambar III.50

Capaian Kinerja Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis sampai dengan tahun 2017 sebanyak 225 pegawai atau 42,71% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 597 pegawai. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 20% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau sebanyak 119 pegawai. Realisasi Rasio peningkatan pegawai Ditjen

Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis Tahun 2017 sebesar 42,71% atau capaian kinerja sebesar 213,55% dari target yang ditetapkan sebesar 20%.

221 pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kompetensi teknis tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor. KP.801/SK.95/DJKA/12/17 tentang Penetapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian Kualifikasi Auditor, Inspektur, Tenaga Penguji Sarana, Prasarana dan Awak Sarana Perkeretaapian, Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.50

Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis s.d Tahun 2017

NO	KUALIFIKASI	JUMLAH (Orang)
1	Auditor	16
2	Inspektur Sarana Perkeretaapian	23
3	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	43
4	Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian	39
5	Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api	62
6	Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api	30
7	Tenaga Penguji Awak Sarana Perkeretaapian	8
TOTAL		221

III.2.4.9. Analisis Pencapaian Sasaran Kesembilan

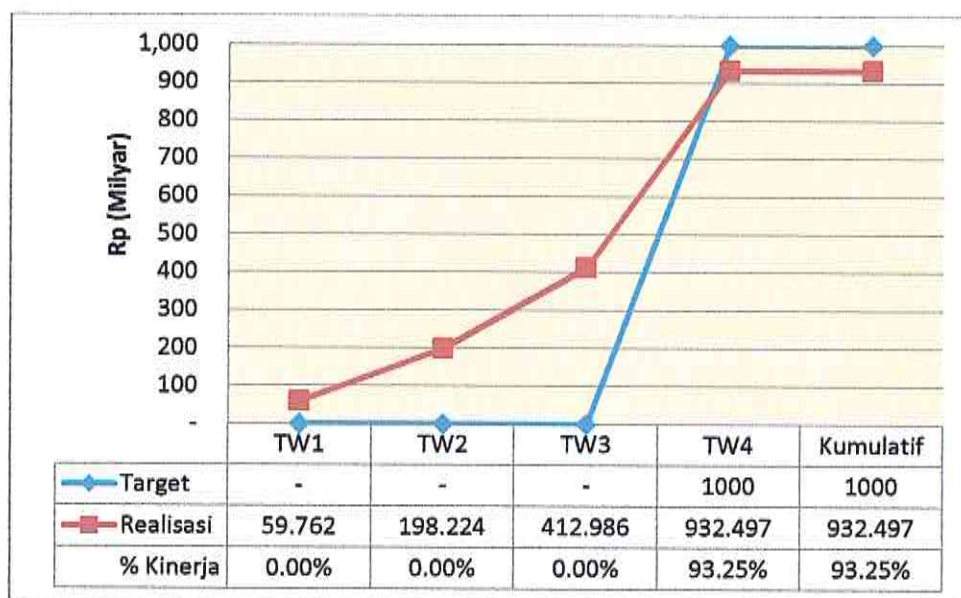
Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedelapan adalah **Sasaran Mewujudkan Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Ditjen Perkeretaapian**, yang diukur dengan IKP yaitu :

1. IKP 15 yaitu Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017 sebesar Rp. 932,497 Milyar atau capai sebesar 93,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000 Milyar. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.51 dan Gambar III.51

Tabel III.51
Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp.	1.000	59,76	198,22	412,98	932,50	932,50	93,25



Gambar III.51
Capaian Kinerja Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

Analisis Kegagalan Pencapaian Target

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 sebesar Rp. 932,50 Milyar terdiri dari sebagaimana Tabel III.52

Tabel III.52
Capaian Kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017

NO	JENIS PENDAPATAN	NILAI
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	859,285,627,547
	A. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	3,362,200,000
	B. Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	13,818,620,000
	C. Jasa Pelayanan Penerbitan Ijin Bidang Perkeretaapian	2,398,330,000
	D. Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian	342,309,000
	E. Penggunaan Sarana Perkeretaapian	370,935,000
	F. Pelayanan Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian	134,700,000
	G. TAC (Track Acces Charge)	838,858,533,547
2	Pendapatan Non Fungsional	73,211,929,405
	A. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	54,851,610,265
	B. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8,027,282,211
	C. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-
	D. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,740,501,820
	E. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	121,821
	F. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,752,423,859
	G. Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,791,489,429
	H. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-
	I. Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR)	48,500,000
TOTAL		932,497,556,952

Faktor - Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja Program Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain :

- a) Kurangnya jumlah SDM penguji sarana dan prasarana perkeretaapian, sehingga belum mampu memenuhi permintaan untuk pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian.
- b) Di dalam rumusan TAC saat ini masih terdapat komponen IMO sehingga saat IMO dilakukan penghematan sebesar Rp. 419.934.998.000,- mengakibatkan penerimaan TAC juga mengalami penurunan.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sewa lahan pada Ditjen Perkeretaapian.
- d) Pendapatan non fungsional pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagian besar berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Alternatif Perbaikan Untuk Masa Depan

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu:

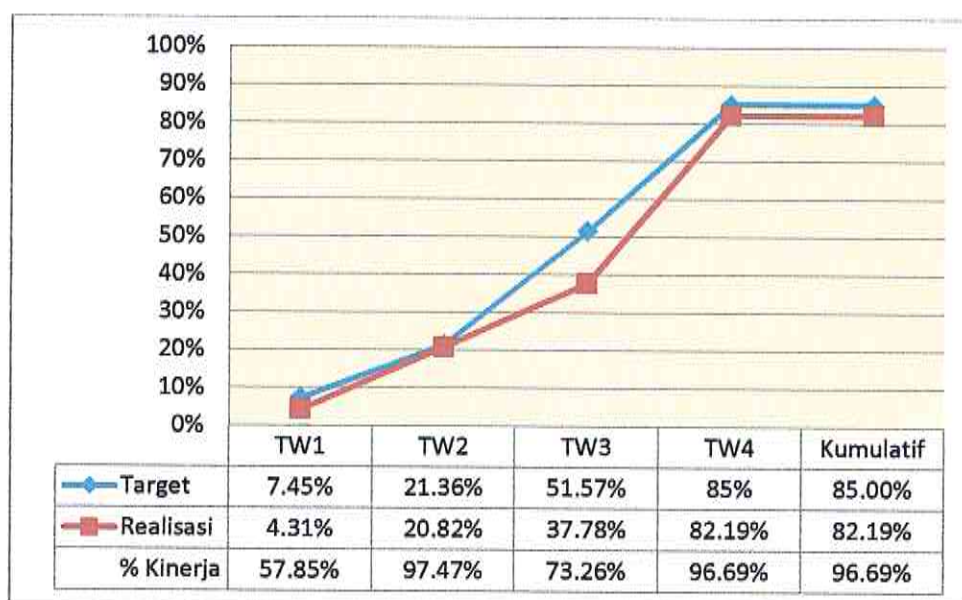
- a) Ditjen Perkeretaapian akan menambah jumlah tenaga penguji di tahun berikutnya untuk memenuhi permintaan pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian.
- b) Ditjen Perkeretaapian sedang mengusulkan revisi PP 15 tahun 2016 terkait perhitungan TAC agar formulasi perhitungannya tidak tergantung dari IMO yang dibayar dan saat ini prosesnya sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan.
- c) Melakukan revisi terhadap peraturan terkait PNBP untuk memperjelas dan memperbaharui pembagian tugas dan fungsi Balai, sehingga proses dalam administrasi penerimaan PNBP sesuai pada tupoksinya.
- d) Menetapkan bendahara penerimaan untuk menerima PNBP pada satker dan balai sehingga administrasi PNBP lebih efisien.

2. IKP 16 yaitu Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 82.19 % atau capaian sebesar 96,69% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.53 dan Gambar III.16

Tabel III.53
Capaian Kinerja Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	85	4,31	20,82	37,78	82,19	82,19	96,69



Gambar III.52
Capaian Kinerja Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017

Analisis Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja Program Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian yaitu antara lain :

- Adanya APBN-P dana luncuran SBSN dan pencantuman PHLN yang menambah pagu anggaran dalam DIPA di semester dua tahun anggaran 2017 sehingga mengakibatkan turunnya persentase realisasi pada Ditjen Perkeretaapian.
- Terdapat perubahan skema pembiayaan pada Tram Surabaya dan dananya tidak dapat dialihkan sehingga memperbesar persentase dana yang tidak dapat diserap.

- c) Adanya proses revisi dan rekomposisi yang mengakibatkan tertundanya proses pekerjaan di lapangan.

Alternatif Perbaikan Untuk Masa Depan

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian yaitu:

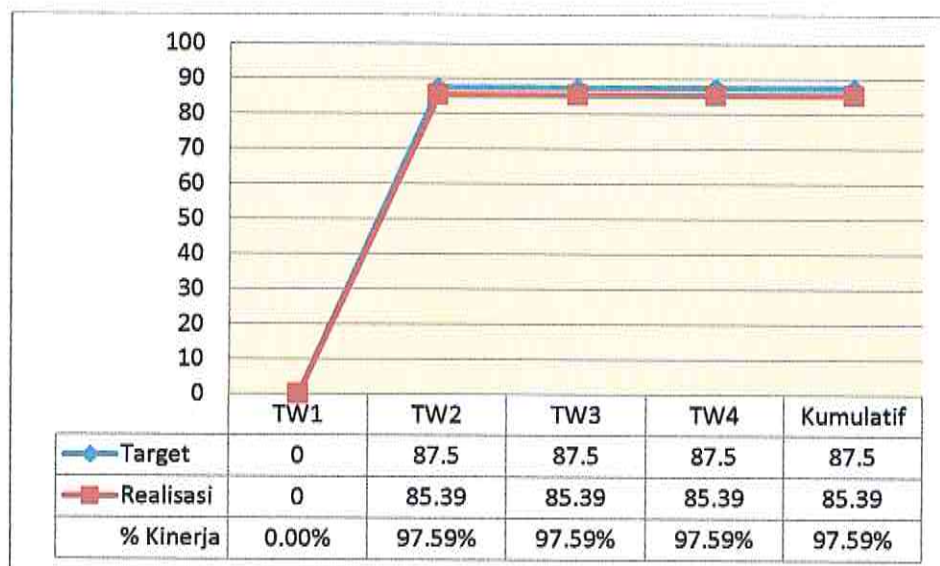
- a) Di tahun 2018 diharapkan perencanaan pekerjaan, proses lelang, dan administrasi lainnya dapat diselesaikan di awal tahun sehingga pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan tidak tertunda oleh masalah administrasi.
- b) Akan dibentuk Project Management Unit (PMU) yang akan membantu tim di lapangan dalam manajemen dan pelaksanaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- c) Komunikasi yang rutin antara PPK, Balai dan pusat terkait progress pekerjaan sehingga apabila ada kendala dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
- d) Setiap Direktur di lingkungan Ditjen Perkeretaapian akan memantau langsung pekerjaan di lapangan untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat berjalan sesuai target.

3. IKP 17 yaitu Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 85.39 atau capaian sebesar 97,59% dari target yang ditetapkan sebesar 87,50. Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.54 dan Gambar III.53

Tabel III.54
Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2017					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	87,50	-	85,39	85,39	85,39	85,39	97,59



Gambar III.53
Capaian Kinerja Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

Analisis Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja Program AKIP Ditjen Perkeretaapian, antar alain :

- Indikator Kinerja Program masih berbasis *Output* belum berbasis *Outcome*;
- Visi dan Misi belum tercantum pada Dokumen Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian Tahun 2015-2019;
- Tujuan dan ukuran keberhasilan belum secara jelas dan rinci ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perkeretaapian;
- Tujuan dan target keberhasilan belum secara jelas dan rinci ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perkeretaapian.

Alternatif Perbaikan Untuk Masa Depan

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja AKIP Ditjen Perkeretaapian yaitu:

- Telah dilakukan Reviu Renstra Ditjen Perkeretaapian yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor. PR. 004/SK. 94/DJKA/12/17 tanggal 11 Desember 2017, yang didalamnya memuat upaya perbaikan SAKIP antara lain :

- Telah dilakukan Revisi Indikator Kinerja Program yang semula berbasis *Output* menjadi berbasis *Outcome*;
 - Visi dan Misi Ditjen Perkeretaapian telah tercantum dalam Dokumen Reviu Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019.
- b) Telah dilakukan Penyusunan Perjanjian Kinerja berjenjang sampai dengan level Eselon IV;
 - c) Akan dilaksanakan Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja secara berkala apabila terjadi perubahan Pimpinan dan Alokasi Anggaran sampai dengan level Eselon III Unit Mandiri;
 - d) Akan dilaksanakan reviu secara berkala minimal triwulanan terhadap Capaian target yang tercantum dalam Indikator Kinerja Program sampai dengan level Eselon III Unit Mandiri.

4. IKP 18 yaitu Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Dasar Hukum pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 926 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 78 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 619 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 618 Tahun 2017 Tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Tingkat maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian diukur dengan capaian tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan dibandingkan dengan target capaian maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian sampai tahun 2019;

Target Tingkat Maturasi/Kematangan implementasi SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2019 yaitu pada Level 3, hal ini sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : S-13/D1/03/02/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peningkatan Kapabilitas , dimana ditargetkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina SPIP pada Tahun 2019 untuk seluruh Kementerian/Lembaga Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP pada **Level 3**. Berikut ini adalah tingkat maturitas SPIP dan karakteristiknya :

Tabel III.55
Tingkat Maturasi SPIP

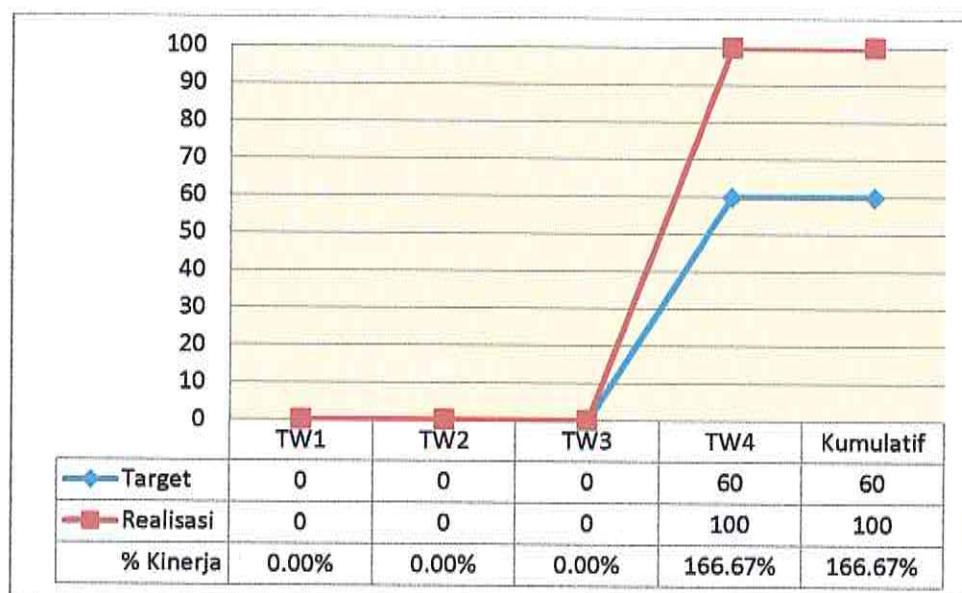
Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 0 Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
Level 1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
Level 2 Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Level 3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Level 4 Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.

Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berke- lanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

Realisasi tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 yaitu pada Level 3 (100%) atau capaian kinerja sebesar 166,67% dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu pada Level 2 (60%). Realisasi kumulatif triwulanan sebagaimana disebutkan pada Tabel III.56 dan Gambar III.54

Tabel III.56
Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Tahun 2016					Kinerja (%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	60 Level 2	-	-	-	100 Level 3	100 Level 3	166,67



Gambar III.54
Capaian Kinerja Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Capaian kinerja Indikator Kinerja Program tingkat maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar 166,67% dari target yang ditetapkan yaitu pada Level 2 (60%). Keberhasilan Capaian Kinerja ini diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan berupa :

- a) Sosialisasi Implementasi SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b) Penyusunan Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian mulai dari Tingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III Unit Mandiri Balai Teknik/Balai Pengujian/Balai Perawatan;
- c) Penyusunan Survei *Control Environment Evaluation* (CEE)/Evaluasi Lingkungan Pengendalian di setiap Eselon I, Eselon II dan Eselon III Mandiri;
- d) Penyusunan Resiko Pengendalian di setiap Eselon I, Eselon II dan Eselon III Mandiri dan;
- e) Telah memasukan Tingkat Maturitas SPIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Program pada Reviu Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dengan target level 3 untuk tahun 2019.

III.2. 5. CAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN LAINNYA TAHUN 2017

Capaian keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian lainnya pada tahun 2017 yaitu :

- a) Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 22,02% dari tahun 2016. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 82,19% atau Rp. 15,489 Triliun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 60,17% atau Rp. 6,262 Triliun;
- b) Balai Pengujian Perkeretaapian pada tahun 2017 telah mendapatkan Sertifikasi System Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 yang bertujuan agar kinerja dan batas waktu proses pelaksanaan pengujian pada Balai Pengujian Perkeretaapian disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan;
- c) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah pada tahun 2017 memperoleh Penghargaan / *Award* untuk capaian kinerja terbaik dalam hal

- pengelolaan proyek yang dibayai melalui Suku Bunga Syariah Negara (SBSN) dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
- d) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat pada tahun 2017 memperoleh Penghargaan Peringkat II untuk Kinerja Pelaksanaan Tingkat Satker Semester I Tahun 2017 Kategori Belanja Modal di Atas Rp. 20 Milyar dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

III.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Ditjen Perkeretaapian TA.2017 ialah sebagai berikut :

- a. Total akhir alokasi dana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar Rp. 18.845.733.287.000,-
- b. Rincian Pagu setelah APBN-P per Sumber Dana :
- 1) Berdasarkan Sumber Pembiayaan:**
- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| Rupiah Murni | : Rp. 7.678.777.318.000.- (40,75%) |
| Pinjaman Luar Negeri | : Rp. 1.411.943.807.000.- (7,49%) |
| Hibah Luar Negeri | : Rp. 5.250.000.000.- (0,03%) |
| SBSN | : Rp. 9.749.762.162.000.- (51,73%) |
- 2) Berdasarkan Jenis Belanja:**
- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Belanja Pegawai | : Rp. 102.754.267.000.- (0,55%) |
| Belanja Barang | : Rp. 1.959.532.753.000.- (10,40%) |
| Belanja Modal | : Rp. 16.783.446.267.000.- (89,06%) |
- c. Alokasi DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 sebesar **Rp. 18.845.733.287.000,-** dengan Realisasi Anggaran posisi s.d 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 15.489.390.773.655,- (82,19 %)**, terdiri dari :
- 1) Berdasarkan Sumber Pembiayaan:**
- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| Rupiah Murni | : Rp. 6.517.012.879.122.- (84,87%) |
| Pinjaman Luar Negeri | : Rp. 746.877.187.447.- (52,90%) |
| Hibah Luar Negeri | : Rp. 0 (0,36%) |
| SBSN | : Rp. 8.225.500.707.086.- (84,37%) |

2) Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	:	Rp. 65.521.513.024,- (63,77%)
Belanja Barang	:	Rp. 1.809.294.468.883,- (92,33%)
Belanja Modal	:	Rp. 13.614.574.791.748,- (81,12%)

- d. Total dana tidak terserap Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2017 sebesar **Rp. 3.356.803.977.043,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.57
Rincian Dana Tidak Terserap Ditjen Perkeretaapian Tahun 2016

No	Uraian	Alokasi (Rupiah)
1	Kegiatan Tidak Dilaksanakan	816.067.779.000,-
2	Sisa Kontrak	516.243.191.592 ,-
3	Blokir Anggaran	137.657.429.000,-
4	SBSN/PHLN	1.394.743.460.324,-
5	Transito / Sisa Kegiatan	491.906.458.727,-
6	Cutt off	185.658.400,-
Total Dana Tidak Terserap		3.356.803.977.043,-

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

IV.1.1. PENCAPAIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2017

1. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Laporan Kinerja Direktorat tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun ketiga dari Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019;
3. Sesuai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan infrastruktur perkeretaapian, diharapkan *output* dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan nasional khususnya sektor transportasi;
4. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017 menggambarkan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2017, dimana terdapat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja program yang dapat melampaui beberapa target dalam Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 dan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017, sehingga terlihat nilai manfaat dari pembangunan infrastruktur bidang perkeretaapian dirasakan

masyarakat. Capaian rata-rata terhadap target Kementerian Perhubungan Tahun 2017 adalah sebesar 131,62%, yaitu secara ringkas pada tabel berikut :

Tabel IV.1

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2017

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,28	0,25	89,29
SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 <i>Modal share</i> angkutan penumpang kereta api	% total nasional	4,0	5,03	125,75
	IK3 <i>Modal share</i> angkutan barang kereta api	% total nasional	0,2	0,23	115,00
SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55	0,26	152,73
	IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	10,70	6,59	138,41
	IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	30	97,64	325,47

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	65	66,05	101,62
	IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20	20	100,00
	IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	6,04	15,32	253,64
SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	15,53	18,05	116,23
	IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	7,47	7,53	100,80
SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	30	33	110,00
SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program	IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan	%	13	13	100%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif				
SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	20	37,02	185,10
SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp	1000	932,497	93,25
	IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	85	82,19	96,69
	IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	87,5	85,39	97,59
	IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	60 (level 2)	100 (Level 3)	166,67
RATA-RATA % CAPAIAN					131,62

IV.1.2. PRESTASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2017

Sepanjang tahun 2017, berbagai penghargaan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, antara lain:

- a). Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 22,02% dari tahun 2016. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 82,19% atau Rp. 15,489 Triliun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 60,17% atau Rp. 6,262 Triliun;
- b). Balai Pengujian Perkeretaapian pada tahun 2017 telah mendapatkan Sertifikasi System Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 yang bertujuan agar kinerja dan batas waktu proses pelaksanaan pengujian pada Balai Pengujian Perkeretaapian disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan;
- c). Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah pada tahun 2017 memperoleh Penghargaan / *Award* untuk capaian kinerja terbaik dalam hal pengelolaan proyek yang dibayai melalui Suku Bunga Syariah Negara (SBSN) dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
- d). Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat pada tahun 2017 memperoleh Penghargaan Peringkat II untuk Kinerja Pelaksanaan Tingkat Satker Semester I Tahun 2017 Kategori Belanja Modal di Atas Rp. 20 Milyar dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

IV.2. SARAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mewujudkan terciptanya *Good Governance*, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyiapkan saran tindak lanjut di masa mendatang, yaitu:

IV.2.1. PERENCANAAN KINERJA

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan perencanaan kinerja dari tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan unit kerja yang terendah meliputi antara lain:

1. Menyiapkan konsep penyempurnaan IKU yang bersifat *outcome*, direncanakan akan diimplementasikan pada Tahun 2018 sejalan dengan dengan penyempurnaan Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
2. Melakukan percepatan pelaksanaan anggaran;
3. Menyusun dan meyiapkan administrasi (Teknik dan Keuangan) untuk percepatan penyiapan anggaran.
4. Menyiapkan dokumen pendukung untuk pelelangan tidak mengikat, termasuk untuk kegiatan yang strategis.

IV.2.2. PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan pengukuran kinerja meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring melalui *e-performance* pada Tahun 2018 sampai dengan unit kerja Eselon III Mandiri;
2. Penyempurnaan manual IKU/IKK dan legalisasinya.

IV.2.3. PELAPORAN KINERJA

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan pelaporan kinerja meliputi :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban perencanaan dan penganggaran;
2. Laporan Kinerja dijadikan tolak ukur evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
3. Indikator kinerja dalam laporan kinerja harus selaras dengan indikator kinerja di atasnya;
4. Penggunaan sistem pelaporan kinerja secara elektronik.

IV.2.4. EVALUASI KINERJA

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan evaluasi kinerja meliputi :

1. Evaluasi kinerja tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan standar kualitas serta secara rutin dilaksanakan sosialisasi atas pedoman evaluasi kinerja yang berlaku;
2. Setiap unit kerja wajib menyusun evaluasi kinerja tepat waktu dan diusulkan adanya *reward* bagi unit kerja yang menyelesaikan evaluasi kinerja secara tepat waktu dan berkualitas;
3. Perlu dilakukan pelatihan evaluator SAKIP oleh Biro Perencanaan yang dilatih langsung oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
4. Melakukan evaluasi atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan upaya tidak lanjut yang harus dilakukan, termasuk pada kegiatan *Multiyears Contract*;
5. Menyiapkan Rapermen penyempurnaan Juknis SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

IV.2.5. CAPAIAN KINERJA

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan capaian kinerja meliputi :

1. Perlu adanya komitmen dari Pimpinan unit kerja atas pelaksanaan SAKIP pada unit kerja masing-masing;
2. Perlu ditingkatkan kembali cakupan wilayah program pemberian *reward and punishment* bagi tiap unit kerja yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
3. Secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN A
REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2017

VISI :

Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional.

MISI :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api;
5. Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 <i>Modal share</i> angkutan penumpang kereta api IK3 <i>Modal share</i> angkutan barang kereta api
	SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>) IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian
	SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	30
	SP7 Meningkatkan peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	13
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis	%	20
	SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Milyar Rp	1000
		IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	85
		IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	87,5
		IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	%	60 (level 2)

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA
DITJEN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2017

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun Anggaran : 2017

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2017
Stakeholders Perspective	SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,28
	SP2 Tervujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 <i>Modal share</i> angkutan penumpang kereta api	% total nasional	4,0
		IK3 <i>Modal share</i> angkutan barang kereta api	% total nasional	0,2
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP3 Meningkatkan KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	10,70
		IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	30
		IK7 Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	65
		IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan	%	20
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	6,04
	SP5 Meningkatkan KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis	%	15,53
		IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	%	7,47

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian
	SP7 Meningkatkan peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif
	SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian
		IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian
		IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Juist Organisme Escor 1 : Directeur Général Fokkerelapin
Tahun Anggaran : 2017

Juist Organisme Escor 1 : Directeur Général Fokkerelapin
Tahun Anggaran : 2017

PERSPECTIVE	SAJARAN PROJEK	INDIKATOR KEBERHASILAN (K-3)	SITUASI	TARGET TANPA 2017					REALISASI TANPA 2017					% CAPAIAN	KETERANGAN
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	KUMULATIF	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	KUMULATIF		
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SPS Terlewatnya PERUMSIAN REGULA 3 DAN KEB JAKAM dalam penyelesaian perkembangan SPS Mengingat peran B1 dan Ukhla dalam program pembangunan perkotaan di era sistem PENCANAAN ALTERNATIF	IK1: Peningkatan pencapaian target kegiatan (rencana dan pelaksanaan) perkembangan di dalam proses tahapan IK1: Peningkatan pencapaian target kegiatan (rencana dan pelaksanaan) perkembangan di dalam proses tahapan IK1: Peningkatan pencapaian target kegiatan (rencana dan pelaksanaan) perkembangan di dalam proses tahapan IK1: Peningkatan pencapaian target kegiatan (rencana dan pelaksanaan) perkembangan di dalam proses tahapan	%	0	0	0	30	30	0	0	0	33	33	10.00%	
				-	-	-	10	10	-	-	-	11	11		
				-	-	-	13	13	-	-	-	13	13	10.00%	
				-	-	-	2	2	-	-	-	2	2		
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SPS Terlewatnya SDM Dalam 5 pelaksanaan yang Konsisten dan Profesional SPS Terlewatnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan kerja Perencanaan	IK1: Rasio pertambahan pegawai dan Diklat Perencanaan yang memiliki sertifikat JPT, Teks IK1: Target Realisasi dan Baku Peta (RBP) IK1: Peningkatan pencapaian target kegiatan (rencana dan pelaksanaan) perkembangan di dalam proses tahapan IK1: Target realisasi SPP dan Perencanaan	%	20	20	20	20	20	33.17	37.02	37.02	37.02	37.02	15.15%	
				-	-	-	110	110	33.17	37.02	37.02	37.02	37.02		
				-	-	-	1000	1000	33.17	37.02	37.02	37.02	37.02	13.25%	
				-	-	-	85	85	33.17	37.02	37.02	37.02	37.02	14.00%	
			Nilai	7.45	21.36	51.17	87.5	87.5	4.31	20.82	37.18	52.15	82.18	17.59%	
				-	-	-	87.5	87.5	-	-	-	86.32	86.32		
				-	-	-	-	-	-	-	-	100	100		
				-	-	-	-	-	-	-	-	Level 3	Level 3	15.67%	

LAMPIRAN D
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2016 S.D 2017

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun Anggaran : 2017

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015-2016						CAPAIAN TAHUN 2017			KETERANGAN
				TAHUN 2015			TAHUN 2016			TARGET	REALISASI	%	
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%				
Stakeholders Perspective	SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	-	-	-	0.28	-	-	0.28	0.25	89.28%	
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, budaya saling dan memberikan nilai tambah	IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api	% total nasional	-	-	-	-	3.78	-	4.0	5.03	125.75%	
	IK3 Modal share angkutan barang kereta api	% total nasional	-	-	-	-	0.18	-	0.2	0.23	115.00%		
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP3 Meningkatkan KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio Kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0.55	1.15	-8.09%	0.55	0.24	156.36%	0.55	0.26	152.73%	
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/1 juta km tempuh	14.44	-	-	-	13.34	-	10.7	8.59	138.41%	
		IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)	%	-	-	-	10	-	-	30	97.84	325.47%	
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK7 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	Sertifikat	-	-	-	-	63.72	-	65	66.05	101.62%	
		IK8 Prosentase wilayah perbatasan yang tersedia layanan angkutan kereta api perbatasan	%	0	0	-	0	0	-	20	20	100.00%	
		IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	Kota	5	5	-	5	5	-	6	6	-	
SP5 Meningkatkan KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSD dan permits	%	-	0.3	-	-	0.91	100%	6.04	15.32	253.64%		
		Juta tonCO2/tdm	-	3.32	-	-	3.34	-	3.51	3.817	-		
		%	-	3.59	-	-	12.2	-	15.53	18.05	116.23%		
	IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun	Perumpang	-	305.347.011	-	-	330.626.237	-	340.824.392	348.055.495	-		
		%	3.45	3.45	100%	3.45	3.45	100%	7.47	7.53	100.80%		
		Km/tp	5.375.30	5.375.30	-	5.375.30	5.375.30	-	5.584.20	5.587.38	-		

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015-2016						CAPAIAN TAHUN 2017				KETERANGAN		
				TAHUN 2015			TAHUN 2016			TARGET	REALISASI	%	TARGET		REALISASI	%
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%							
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBUANGAN dalam penyelenggaraan dan keberlanjutan.	IK12 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	33	110.00%		
	SP7 Meningkatkan peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF	IK13 Persentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBS/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif	%	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1			
			Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100.00%		
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JF/ITeknis	%	-	-	-	-	-	-	-	-	20	37.32	185.10%		
	SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	119	221			
		IK16 Persentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Milyar Rp	1500	905	60.33%	1500	922	61.47%	-	-	1000	832.497	83.25%		
		IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	%	85	85.78	101.20%	65	60.17	92.57%	-	-	85	82.19	96.69%		
		IK18 Tingkat maturasi SPJP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83.92	88.61	103.41%	83.92	85.38	101.72%	-	-	87.5	85.39	97.59%		
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	60	100	166.67%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	(level 2)	Level 3			